

BUNGA RAMPAI AKADEMI DEMOKRASI

MERAWAT NALAR, MENUMBUHKAN DEMOKRASI



BUNGA RAMPAI AKADEMI DEMOKRASI

MERAWAT NALAR, MENUMBUHKAN DEMOKRASI



Bunga Rampai Akademi Demokrasi

Merawat Nalar, Menumbuhkan Demokrasi

Editor

Ajid Fuad Muzaki

Kontributor

Akademi Demokrasi Siswa

Addarun Nafis Jawahir

Ahmad Najmi Tsaqib

Anggit Varnesya

Anselma Putri

Bintang Arif Dya Putra

Dominique Emanuela Sebastian Saragih

Fahri Novan Dwi Kusnadi

Ghanisa Aimar Adzani

Hadis Rajwa

Janeeta S

Kevin Kilian Heryanda

M. Ilham

Meida Amelia

Muh Syabril Diandra

Rania Amira

Valleydhio Rusyda

Akademi Demokrasi Mahasiswa

Agseel Jesisca

Ajrina Widia Ghaisani

Bazli Banin Danisha Falah

Dhika Saputra

Fakhira Khairunnisa

Fakhriyah Khoirun Nisa

Fuji Asih

Hasna Tsaqila

Hilmi Hafizh Muhammad

Mulya Wiguna

Puji Akmaliana Binti Asbaruna

Rahmad Aidil Ali Lubis

Rahma Noor Zakia

Rikza Anung Andita Putra

Safira Irawa

Shovi Yasmin

Syafira Sugianto

Wildan Irsyad

Akademi Demokrasi Guru

Eva Wira

Robi Kurniawan

Tri Gayuh Waluyati

Fasilitator

Annisa Alfath

Ajid Fuad Muzaki

Iqbal Kholidin

Usep Hasan Sadikin

Desain & Layout

Faiza Nairurrahma Pambudi

Penerbit

Perludem, Jl. Tebet Timur IV B, No.14, Tebet, Jakarta, 12820.



Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang pemilihan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

PENGANTAR

Buku ini berawal dari sebuah ruang belajar bernama Akademi Demokrasi Perludem. Inisiatif ini lahir dari keyakinan bahwa demokrasi yang kuat tidak hanya ditopang oleh institusi dan regulasi yang baik, tetapi juga oleh warga negara yang memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik. Di tengah dinamika demokrasi Indonesia yang terus berkembang, pendidikan demokrasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, terutama bagi generasi muda yang kelak akan menentukan arah bangsa.

Melalui Akademi Demokrasi, Perludem menghadirkan ruang belajar bagi siswa, mahasiswa, dan guru untuk mendalami berbagai aspek demokrasi, mulai dari prinsip-prinsip dasar demokrasi, aktor-aktor demokrasi, tantangan demokrasi di ruang digital, hingga keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Perjumpaan tersebut kemudian menjadi ruang dialog untuk mendorong peserta bertukar gagasan, mempertanyakan berbagai persoalan demokrasi, merefleksikan pengalaman mereka sebagai bagian dari masyarakat, hingga menyusun agenda bersama untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Sebagai bagian dari proses pembelajaran tersebut, para peserta diberikan kesempatan untuk menuangkan pengalaman, kegelisahan, refleksi, hingga rekomendasi mereka ke dalam tulisan. Dari proses

itulah lahir buku *Bunga Rampai Akademi Demokrasi: Merawat Nalar, Menumbuhkan Demokrasi*. Kumpulan tulisan ini menjadi rekam jejak perjalanan belajar para peserta dalam memaknai demokrasi dari sudut pandang masing-masing.

Beragam tema diangkat dalam buku ini. Mulai dari pentingnya partisipasi generasi muda, pendidikan politik, demokrasi di ruang digital, keterbukaan informasi, kesetaraan, representasi politik, hingga pengalaman berdemokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman perspektif tersebut menunjukkan bahwa demokrasi adalah nilai yang hidup dalam keseharian warga negara.

Tulisan-tulisan dalam buku ini juga memperlihatkan bahwa generasi muda dan para pendidik memiliki kepedulian yang besar terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Dengan gaya bertutur yang beragam, setiap penulis menuangkan refleksi yang jujur mengenai tantangan demokrasi sekaligus harapan agar ruang-ruang partisipasi publik terus tumbuh dan terjaga.

Perludem meyakini bahwa pendidikan demokrasi merupakan investasi jangka panjang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditopang oleh institusi yang kuat, tetapi juga oleh warga negara yang memiliki nalar kritis, menghargai perbedaan, menjunjung nilai-nilai demokrasi, dan berani mengambil bagian dalam kehidupan publik. Karena itu, harapannya Akademi Demokrasi menjadi salah satu ruang untuk mendorong lahirnya warga negara yang aktif, inklusif, dan bertanggung jawab.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Akademi Demokrasi yang telah berbagi gagasan melalui tulisan-tulisan dalam buku ini. Terima kasih juga kepada para fasilitator dan seluruh pihak yang

telah mendukung penyelenggaraan Akademi Demokrasi serta proses penerbitan buku ini.

Semoga bunga rampai ini menjadi dokumentasi hasil pembelajaran dan menginspirasi lebih banyak orang untuk terus merawat nalar, memperluas ruang dialog, dan menumbuhkan semangat demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, demokrasi yang sehat selalu bertumbuh dari warga negara yang mau belajar, berpikir, dan berpartisipasi.

Heroik Mutaqin Pratama

Direktur Eksekutif Perludem

DAFTAR ISI

Pengantar	v
-----------	---

AKADEMI DEMOKRASI SISWA

Addarun Nafis Jawahir	Belajar Demokrasi dari Ruang Organisasi	3
Ahmad Najmi Tsaqib	Demokrasi Dimulai dari Generasi Muda	7
Anggit Varnesya	Mencari Perspektif atau Meminjam Keyakinan?	11
Anselma Putri	Menumbuhkan Kesadaran Demokrasi di Kalangan Pemuda	15
Bintang Arif Dya Putra	Anak Muda Berani Bersuara	19
Dominique Emanuela Sebastian Saragih	Mic dan Ruang Digital: Apa Artinya Demokrasi Bagiku?	23
Fahri Novan Dwi Kusnadi	Demokrasi Tidak Dibangun di Ruang Tertutup	27
Ghanisa Aimar Adzani	Hak untuk Bersuara, Tanggung Jawab untuk Mendengar	31
Hadist Rajwa	Pendidikan Politik untuk Masa Depan Demokrasi	35
Janeeta S	Hak Bersuara di Tengah Bayang-Bayang Pembungkaman	39
Kevin Kilian Heryanda	Demokrasi Tidak Hidup dengan Sendirinya	45
M. Ilham	Kedaulatan Rakyat atau Kedaulatan Elite?	49
Meida Amelia	Haruskah Pemimpin Selalu Laki-Laki?	55
Muh Syabril Diandra	Menyemai Benih Demokrasi di Akar Rumput: Refleksi tentang Demokrasi dan Ruang Digital	59
Rania Amira	Museum Demokrasi: Refleksi Negosiasi	63
Valleydhio Rusyda	Menguji Demokrasi dari Bangku Sekolah	67

AKADEMI DEMOKRASI MAHASISWA

Agse! Jesisca	Ketika 30 Persen Hanya Angka: Perempuan di Ruang Pengawasan Pemilu	75
Ajrina Widia Ghaisani	Refleksi Pemilih Pemula Melawan Politik FOMO pada Pemilu 2024	79
Bazli Banin Danisha Falah	Parpol Satire: Ekspresi Baru dari Partisipasi Politik	85
Dhika Saputra	Barak Militer Bukan Solusi Kenakalan Remaja	91

Fakhira Khairunnisa	Alarm Merah Indeks Demokrasi Indonesia	97
Fakhriyah Khoirun Nisa	Demokrasi di Bawah Bayang-Bayang Kecerdasan Buatan	101
Fuji Asih	Generasi Melek Digital Belum Tentu Melek Demokrasi	105
Hasna Tsaqila	Ketika Masa Depan Anak Menjadi Mata Uang Politik	109
Hilmi Hafizh Muhammad	Ironi Trias Politica dan Partai Politik di Indonesia	115
Mulya Wiguna	Belajar Demokrasi, Menghidupi Demokrasi	121
Puji Akmaliana Binti Asbaruna	Demokrasi yang Inklusif Melalui Pemenuhan Hak Kesehatan Perempuan Sepanjang Siklus Kehidupan	125
Rahmad Aidil Ali Lubis	Minoritas Memilih, tetapi Tak Pernah Diwakili	131
Rahma Noor Zakia	Warisan Beracun Divide et Impera: Senjata Politik Paling Efektif	137
Rikza Anung Andita Putra	Siapa Mengisi Jeda Demokrasi Lokal? Catatan atas Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal	141
Safira Irawa	Demokrasi yang Tumbuh dalam Saba Kampung Kota	147
Shovi Yasmin	Demokrasi Dimulai dari Cara Kita Bermedia Sosial	151
Wildan Irsyad	Masalah Demokrasi dan Gejala No Viral No Justice	155

AKADEMI DEMOKRASI GURU

Eva Wira	Belajar Demokrasi dengan Mempraktikkan Demokrasi	163
Robi Kurniawan	Demokrasi Internal Partai Kunci Kualitas Demokrasi	169
Tri Gayuh Waluyati	Guru Sebagai Agen Perubahan dalam Literasi Demokrasi	175

AKADEMI DEMOKRASI FASILITATOR

Annisa Alfath	Ketika Layar Menjadi Arena: KSBE dan Utang Keadilan Digital bagi Perempuan Politik	183
Ajid Fuad Muzaki	Pecunia Non Olet dalam Demokrasi	187
Iqbal Kholidin	Mengapa Kita Gagal Berdemokrasi?	194
Usep Hasan Sadikin	Aturan Diskriminatif versus Demokrasi	199
Profil Penulis		205



AKADEMI DEMOKRASI SISWA





BELAJAR DEMOKRASI DARI RUANG ORGANISASI

Oleh: **Addarun Nafis Jawahir**

Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, pernah mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi tersebut menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat bukan sekadar objek yang menerima kebijakan negara, tetapi juga menjadi subjek yang berhak menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kebebasan menyampaikan pendapat, memberikan kritik, serta berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Dalam praktiknya, demokrasi bukanlah sistem yang selalu berjalan tanpa tantangan. Perbedaan pendapat, kritik terhadap kebijakan, hingga perdebatan mengenai arah pembangunan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokratis. Justru keberagaman pandangan tersebut menjadi tanda bahwa masyarakat memiliki ruang untuk berpikir, berdiskusi, dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Demokrasi yang sehat tidak diukur dari hilangnya perbedaan, melainkan dari kemampuan setiap pihak untuk menyelesaikan perbedaan tersebut melalui dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap aturan yang berlaku.

Indonesia sebagai negara demokrasi juga menghadapi dinamika yang

serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai peristiwa politik telah memunculkan berbagai respons dari masyarakat. Polemik yang mengiringi Pemilu 2024, termasuk perdebatan mengenai pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu contoh bagaimana isu politik mampu memunculkan berbagai pandangan di tengah masyarakat. Setelah pergantian pemerintahan pun, berbagai kebijakan publik terus menjadi bahan diskusi, kritik, maupun dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi merupakan proses yang terus berjalan dan selalu membutuhkan keterlibatan warga negara.

Dalam negara demokrasi, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui berbagai cara. Ada jalur formal melalui mekanisme hukum dan kelembagaan negara, seperti pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, penyampaian aspirasi kepada lembaga legislatif, atau mekanisme hukum lainnya. Di sisi lain, terdapat pula jalur nonformal yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti diskusi publik, demonstrasi, mimbar bebas, petisi, maupun kampanye di media sosial. Selama dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain, seluruh bentuk partisipasi tersebut merupakan bagian dari praktik demokrasi.

Sebagai pelajar, saya melihat bahwa generasi muda memiliki posisi yang penting dalam menjaga kehidupan demokrasi. Pelajar bukan hanya calon pemimpin masa depan, tetapi juga warga negara yang hidup di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik saat ini. Oleh karena itu, pelajar perlu memiliki kepedulian terhadap kondisi bangsa. Kepedulian tersebut tidak harus diwujudkan dengan ikut dalam politik praktis, melainkan dapat dimulai dari membangun sikap kritis, gemar berdiskusi,

menghargai perbedaan pendapat, serta berani menyampaikan gagasan secara santun dan bertanggung jawab.

Sayangnya, tidak semua pelajar memiliki kesadaran tersebut. Masih banyak yang menganggap persoalan sosial dan politik sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Tidak sedikit pula yang memilih bersikap apatis karena merasa suara mereka tidak akan membawa perubahan. Padahal, sikap apatis justru dapat mengurangi kualitas demokrasi. Demokrasi hanya akan tumbuh apabila masyarakat, termasuk generasi muda, mau berpartisipasi sesuai dengan kapasitasnya.

Salah satu ruang yang dapat menjadi tempat belajar demokrasi adalah organisasi pelajar. Namun, kenyataannya minat pelajar untuk mengikuti organisasi di sekolah cenderung mengalami penurunan. Sebagian beranggapan bahwa organisasi hanya menyita waktu, mengganggu kegiatan belajar, atau tidak memberikan manfaat secara langsung. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Organisasi justru menjadi tempat yang mempertemukan berbagai karakter, latar belakang, serta cara berpikir yang berbeda. Perbedaan tersebut mendorong setiap anggota untuk belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bersama.

Di dalam organisasi, demokrasi tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi dipraktikkan secara langsung. Setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengikuti musyawarah, menerima kritik, serta menghargai keputusan bersama meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan pribadi. Pengalaman seperti ini sulit diperoleh apabila seseorang hanya mempelajari demokrasi melalui buku pelajaran atau ruang kelas. Organisasi mengajarkan bahwa sebuah keputusan yang baik lahir dari proses dialog, bukan dari pemaksaan kehendak.

Lebih dari itu, organisasi juga membentuk karakter kepemimpinan yang demokratis. Seorang pemimpin organisasi tidak cukup hanya mampu memberikan instruksi, tetapi juga harus mampu mendengarkan aspirasi

anggotanya, membuka ruang diskusi, serta mengambil keputusan secara adil. Sebaliknya, anggota organisasi juga belajar bahwa kritik harus disampaikan dengan argumentasi yang baik, bukan sekadar berdasarkan emosi. Budaya saling menghargai inilah yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan demokrasi.

Pengalaman berorganisasi juga mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk didengar. Tidak semua usulan akan diterima, tetapi setiap gagasan tetap layak memperoleh kesempatan untuk disampaikan. Nilai seperti inilah yang seringkali terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, menghormati pendapat orang lain merupakan salah satu syarat utama agar demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Pembelajaran demokrasi tidak harus selalu dimulai dari ruang-ruang politik yang besar. Organisasi pelajar justru menjadi tempat yang paling dekat untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari organisasi, pelajar belajar bekerja sama, menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, menerima kritik dengan lapang dada, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah disepakati bersama. Pengalaman-pengalaman tersebut akan menjadi bekal berharga ketika mereka nantinya berperan sebagai warga negara maupun pemimpin di masa depan.

Oleh karena itu, sudah saatnya pelajar memandang organisasi bukan sekadar kegiatan tambahan di luar kelas, melainkan sebagai ruang pembelajaran yang membentuk karakter demokratis. Demokrasi tidak hanya dipelajari melalui teori, tetapi juga dibangun melalui kebiasaan berdialog, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Semakin banyak pelajar yang aktif dalam organisasi, semakin besar pula peluang lahirnya generasi muda yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu menjaga kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang.

■ **Addarun Nafis Jawahir**, Pelajar SMAN 1 Depok.

DEMOKRASI DIMULAI DARI GENERASI MUDA

Oleh: **Ahmad Najmi Tsaqib**

“Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

Kalimat tersebut telah lama diperkenalkan kepada kita sejak duduk di bangku sekolah. Namun, semakin banyak pengalaman yang saya peroleh, semakin saya menyadari bahwa demokrasi jauh lebih luas. Demokrasi bukan hanya mekanisme memilih pemimpin setiap lima tahun sekali, melainkan budaya yang menempatkan warga negara sebagai aktor utama dalam kehidupan berbangsa. Demokrasi hadir ketika masyarakat berani menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta terlibat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama.

Kesadaran tersebut semakin kuat setelah saya mengikuti Akademi Demokrasi. Program itu mengubah cara pandang saya sebagai warga negara sekaligus generasi muda bahwa demokrasi harus terus dipelajari dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pelajaran yang paling berkesan bagi saya adalah bahwa demokrasi tidak berhenti ketika hasil pemilu diumumkan. Justru setelah proses elektoral selesai, masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bahwa para pemegang kekuasaan menjalankan amanah.

Dari materi tersebut saya menyadari bahwa demokrasi membutuhkan warga negara yang aktif, bukan sekadar warga negara yang patuh.

Demokrasi hanya dapat tumbuh apabila masyarakat berani bertanya, mengkritik secara santun, sekaligus menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi bersama.

Hal lain yang saya pelajari adalah pentingnya literasi informasi di era digital. Saat ini setiap orang dapat menjadi produsen sekaligus penyebar informasi hanya melalui telepon genggam yang dimilikinya. Kemudahan tersebut memang membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran yang memecah belah masyarakat. Karena itu, kebebasan berekspresi harus selalu disertai dengan tanggung jawab untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain.

Bagi saya, cara menggunakan media sosial akan ikut menentukan kualitas demokrasi Indonesia pada masa mendatang. Apabila ruang digital dipenuhi informasi yang akurat, diskusi yang sehat, dan sikap saling menghargai, demokrasi akan tumbuh semakin kuat. Sebaliknya, apabila ruang digital dipenuhi kebencian dan disinformasi, kualitas demokrasi juga akan ikut tergerus.

Pemahaman tersebut semakin bermakna ketika saya mengingat kembali pengalaman sebagai anggota Dewan Parlemen Pelajar. Dalam setiap sidang maupun forum diskusi, saya belajar bahwa tidak semua pendapat dapat langsung diterima. Setiap gagasan harus disampaikan berdasarkan argumentasi yang kuat, didukung oleh data, serta dibuka untuk menerima kritik dan masukan dari peserta lain.

Saya masih mengingat salah satu forum ketika usulan yang saya sampaikan memperoleh banyak tanggapan dari peserta lain. Pada awalnya saya merasa bahwa pendapat saya kurang dihargai. Namun

setelah diskusi selesai, saya justru menyadari bahwa berbagai kritik tersebut membuat gagasan yang saya bawa menjadi lebih matang. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi bukan tentang memenangkan ego pribadi, melainkan menemukan keputusan terbaik bagi kepentingan bersama melalui proses dialog.

Pengalaman tersebut kemudian diperkaya ketika saya mengikuti *Asia–Europe Conference and Exchange Program* sebagai delegasi Indonesia. Berdiskusi dengan pemuda dari berbagai negara membuat saya memahami bahwa setiap negara memiliki perjalanan demokrasi yang berbeda-beda. Ada negara yang telah lama menjalankan demokrasi secara mapan, ada pula yang masih menghadapi berbagai tantangan. Tapi saya menemukan satu kesamaan, yaitu semua negara terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan.

Interaksi dengan peserta dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan pandangan politik juga mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bekerja sama. Justru melalui keberagaman tersebut saya belajar bahwa demokrasi tumbuh ketika setiap orang bersedia mendengarkan sebelum menghakimi serta menghormati pandangan yang berbeda.

Berbagai pengalaman tersebut membuat saya semakin yakin bahwa membangun demokrasi tidak selalu harus dimulai dari jabatan politik ataupun posisi di pemerintahan. Sebagai pelajar, saya dapat memulainya dengan membiasakan budaya dialog di lingkungan sekolah dan organisasi. Setiap orang harus diberi ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, sementara perbedaan pandangan harus dipandang sebagai kesempatan untuk memperkaya diskusi, bukan sebagai alasan untuk saling menjatuhkan.

Di ruang digital, saya ingin terus membiasakan diri memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Saya juga percaya bahwa media sosial dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk

menyebarkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan partisipasi publik, bukan sekadar menjadi tempat memperdebatkan perbedaan tanpa solusi. Di sisi lain, generasi muda juga perlu lebih banyak terlibat dalam berbagai organisasi, forum kepemudaan, maupun kegiatan sosial agar mampu menyampaikan gagasan yang konstruktif sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat dengan para pembuat kebijakan.

Mengikuti Akademi Demokrasi memberikan pelajaran yang jauh melampaui teori mengenai sistem politik. akademi ini mengajarkan bahwa demokrasi adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pengalaman sebagai anggota Dewan Parlemen Pelajar, delegasi internasional, dan peserta Akademi Demokrasi semakin memperkuat keyakinan saya bahwa perubahan tidak selalu lahir dari ruang-ruang kekuasaan. Perubahan juga dapat dimulai dari generasi muda.

■ **Ahmad Najmi Tsaqib**, Pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 12 Jakarta.

MENCARI PERSPEKTIF ATAU MEMINJAM KEYAKINAN?

Oleh: **Anggit Varnesya**

Video itu bahkan belum selesai diputar, namun jari saya sudah buru-buru turun ke kolom komentar. Tidak, bukan untuk ikutan berdebat, apalagi nimbrung komentar. Saya cuma pengen tahu satu hal saja sebenarnya: *“Video ini memang kayak gitu kejadiannya? Atau jangan-jangan ada konteks yang saya lewatkan? Atau malah saya sendiri yang salah nangkap maksudnya?”*

Saya baca satu komentar, terus lanjut ke komentar yang lain, dan yang lain lagi. Semuanya terdengar begitu yakin, seolah mereka sudah selesai mengambil kesimpulan sementara, sementara saya bahkan belum selesai menonton videonya. Dan entah kenapa, semakin banyak saya membaca, semakin saya merasa tidak perlu lagi menarik kesimpulan sendiri. Rasanya seperti kolom komentar sudah menyelesaikan pekerjaan itu untuk saya.

Baru beberapa menit setelah layar HP saya matikan, saya mencoba mengingat-ingat kembali isi videonya, kali ini tanpa melihat komentar. Dan anehnya, keyakinan yang tadi saya “pinjam” dari kolom komentar itu mulai goyah. Padahal isi videonya tidak berubah sedikitpun.

Awalnya, saya mengira hanya sedang mencari konteks. Rasanya masuk akal, toh di media sosial potongan video-videonya memang sering menyesatkan, dan membaca kolom komentar bukan sesuatu yang keliru.

Saya pun masih percaya kolom komentar bisa membantu menemukan hal yang luput dari saya. Berkali-kali saya justru menemukan informasi tambahan dari orang lain yang sudah capek-capek mencari sumber aslinya lebih dulu.

Tapi kali ini rasanya berbeda, saya tidak hanya ingin mencari tahu, saya cuma ingin ditemani buat yakin. Ya, sebenarnya yang saya cari ternyata bukan lagi sekadar konteks, melainkan apa orang lain yang melihat hal yang sama seperti yang saya lihat. Dan ketika menemukannya, entah kenapa saya jadi lebih berani mempercayai penilaian saya sendiri.

Di situlah saya mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Kenapa keyakinan saya terhadap sebuah pendapat baru terasa cukup setelah tahu jika ada orang lain yang berpikir serupa? Mungkin, selama ini bukan konteks atau informasi yang saya cari. Melainkan *rasa aman*. Entah sejak kapan, saya mulai memperlakukan penilaian saya sendiri seolah-olah belum cukup layak untuk dipercaya.

Kesadaran itu mengingatkan saya pada satu sesi presentasi di Akademi Demokrasi Perludem beberapa waktu lalu. Pada saat itu saya sempat membahas soal bahaya *echo chamber*, bagaimana kita bisa terjebak mendengar suara yang sama berulang-ulang sampai lupa bahwa selalu ada perspektif lain di luar sana. Dan pada saat itu, saya dengan yakin menawarkan solusi untuk memperluas perspektif, dengar banyak sudut pandang, jangan puas hanya dengan satu sisi, dan lain sebagainya.

Ironisnya, baru sekarang saya sadar, mungkin selama ini saya yang salah memahami arti memperluas perspektif. Saya awalnya mengira sedang memperluas perspektif. Padahal, yang saya lakukan hanya mengumpulkan lebih banyak suara agar penilaian saya terasa lebih aman untuk dipercaya. Ternyata, saya hanya memperbanyak tempat untuk meminjam keyakinan. Dari yang tadinya meminjam satu keyakinan, sekarang saya meminjam sepuluh, dua puluh, tapi ya tetap *minjem*.

Sambil terus memikirkannya, saya teringat satu istilah yang pernah saya baca sebelumnya, yakni:

informational social influence. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh dua psikolog, *Morton Deutsch* dan *Harold Gerard*, lewat penelitiannya pada 1955. Sederhananya, teori ini menjelaskan bahwa ketika situasi terasa tidak jelas, manusia cenderung menganggap orang lain mengetahui sesuatu yang tidak diketahui, lalu menggunakan penilaiannya sebagai acuan dalam membentuk penilaian kita sendiri.

Dan kalau dipikir-pikir lagi, itulah yang terjadi ketika saya menonton video itu. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, sehingga mencari komentar terasa seperti cara tercepat untuk menemukan konteks videonya. Ibarat kata, saya mencari orang lain untuk dijadikan “jangkar”.

Saya rasa, sampai di titik ini, tidak ada yang salah. Tidak mungkin juga kan kita mengetahui semua hal sendiri. Mendengar orang lain justru seringkali membantu kita melihat konteks yang sebelumnya itu luput. Persoalannya, muncul ketika kebiasaan mencari konteks perlahan berubah menjadi kebiasaan “meminjam” keyakinan. Ketika saya tidak lagi menggunakan pendapat orang lain untuk menguji penilaian saya sendiri, melainkan untuk menggantikannya.

Namun bagaimana jika kebiasaan ini hanya berhenti di saya dan kolom komentar, mungkin dampaknya memang tidak terlalu besar. Paling-paling saya cuma jadi orang yang lebih lama mengambil sikap. Tapi saya jadi penasaran, bagaimana kalau cara berpikir yang sama ternyata dipraktikkan oleh jutaan orang? Bagaimana kalau kita semua sama-sama menunggu diyakinkan dulu, baru kita berani mempercayai pertimbangan kita sendiri?

Kalau begitu, coba bayangkan jika kebiasaan itu ikut terbawa ke ruang publik. Ke ruang tempat kita memilih pemimpin, menyusun pendapat, menentukan arah bersama, atau sekadar memutuskan

siapa yang layak dipercaya. Yang hilang mungkin bukan cuma keberanian untuk berpendapat. Yang lebih dulu hilang justru proses mempertimbangkannya.

Dan bukankah itu agak ironis? Karena kita sendiri yang sering bilang demokrasi adalah soal kebebasan berpendapat. Padahal, sebelum seseorang bisa berpendapat, bukankah ia harus lebih dulu mempertimbangkan? Mungkin disitulah seharusnya perspektif itu bekerja. Bukan untuk menyediakan jawaban yang paling nyaman diikuti, melainkan untuk menguji apakah jawaban yang kita pegang memang pantas dipertahankan.

Lalu saya jadi bertanya-tanya, kalau bahkan pendapat saya sendiri baru terasa layak setelah disetujui orang lain, apa sebenarnya yang sedang saya bawa ke ruang demokrasi? Sebuah pertimbangan, atau sekadar keyakinan yang lagi-lagi saya pinjam?

Mungkin saya akhirnya mengerti, memperluas perspektif ternyata tidak sama dengan meminjam keyakinan. Saya boleh berubah pikiran. Saya bahkan boleh salah. Tapi saya harus memastikan bahwa keputusan untuk berubah itu benar-benar lahir dari pertimbangan saya sendiri.

Mungkin nanti, saat video berikutnya belum selesai diputar, jari saya akan tetap turun duluan ke kolom komentar. Kebiasaan ini *nggak* akan hilang cuma karena sekarang saya sudah tahu namanya. Bedanya, kali ini saya ingin memberi ruang pada pikiran saya sendiri sedikit lebih lama. Tidak untuk membuktikan jika saya selalu benar, tapi supaya saya tahu dulu apa yang benar-benar saya pikirkan.

Sebab mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi, “Orang-orang berpendapat apa?” Melainkan, “*Kalau semua komentarnya saling bertolak belakang, mana yang akan saya percaya?*”

■ **Anggit Varnesya**, Pelajar SMA Budi Mulia.

MENUMBUHKAN KESADARAN DEMOKRASI DI KALANGAN PEMUDA

Oleh: **Anselma Putri**

Pemuda merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga sekaligus memajukan kehidupan demokrasi. Sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan kekuatan moral, generasi muda memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan publik, menjadi pemilih yang kritis, serta memperkuat partisipasi warga negara. Masa depan demokrasi Indonesia juga ditentukan juga oleh sejauh mana kaum muda mampu mengambil bagian dalam ruang-ruang demokrasi secara aktif dan bertanggung jawab.

Demokrasi pada hakikatnya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui sistem ini, setiap warga negara memiliki hak, kesempatan, dan kebebasan untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam proses pengambilan keputusan publik. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang bersumber dari kehendak rakyat.

Meski demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa masih banyak anak muda yang memandang

politik sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Politik seringkali dipersepsikan rumit, penuh konflik, bahkan identik dengan perebutan kekuasaan semata. Akibatnya, tidak sedikit generasi muda yang memilih bersikap apatis terhadap persoalan demokrasi. Kondisi ini menunjukkan, pendidikan politik yang berkelanjutan masih menjadi kebutuhan penting, baik melalui jalur formal maupun pendidikan nonformal.

Dalam konteks tersebut, organisasi masyarakat sipil memiliki kontribusi yang tidak kalah penting. Sebagai organisasi independen di luar struktur pemerintahan, berbagai lembaga swadaya masyarakat berperan memperkuat demokrasi melalui pendidikan publik, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu organisasi yang secara konsisten menjalankan peran tersebut adalah Perludem. Melalui berbagai program, salah satunya akademi demokrasi yang saya ikuti, Perludem berupaya meningkatkan literasi demokrasi sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang lebih kritis dan partisipatif.

Dua hari satu malam sering kali berlalu begitu saja dan tidak terasa apa-apa. Namun, waktu yang singkat bersama Perludem kemarin menyisakan pengalaman yang berbeda. Akademi demokrasi kemarin menjadi ruang pertemuan yang sangat hidup. Kita diberikan kesempatan untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman-teman disana, menambah banyak wawasan dan praktik langsung melalui presentasi yang disiapkan dengan waktu yang singkat. Perludem memberikan sebuah pandangan baru terhadap arah demokrasi, di sana, materi-materi perihal arah demokrasi seperti tentang pemilihan dan hukum tata negara tidak lagi terasa berjarak. Karena kami, para pemuda yang hadir, diberikan ruang yang setara untuk saling bertukar pikiran melalui diskusi kelompok yang terasa sangat hangat dan kondusif.

Bagi saya pribadi, ada kebanggaan dan rasa syukur yang sangat mendalam karena bisa diberikan kesempatan yang luar biasa hebatnya karena bisa berpartisipasi menjadi bagian dari Akademi Demokrasi Perludem. Mengapa rasa syukur ini begitu besar? Karena saya sebagai pemuda dapat berkontribusi dengan situasi dan kondisi negara saat ini. Kami tidak hanya diajari untuk paham, tetapi dipicu untuk berani menyuarakan hak, berani mempertahankan pendapat, dan berani membuka mata terhadap dinamika politik yang sedang membentuk masa depan kita.

**Karena jika bukan kita yang peduli, siapa lagi?
Karena tidak sedikit pula remaja masa kini
yang tidak peduli dengan negara nya sendiri.
Namun Perludem mengajak remaja untuk
membangkitkan semangat nasionalisme yang
hampir pudar di sebagian orang khususnya di era
digitalisasi ini.**

Selama dua hari satu malam, kita diberikan pemahaman materi terkait pengantar demokrasi, aktor-aktor demokrasi, demokrasi di ruang digital, dan keterampilan demokrasi. Keempat materi tersebut menurut saya, sangat relevan dengan kondisi negara saat ini. Jika kita analogikan secara sederhana, keempat materi itu seperti sebuah kaca mata yang sangat kita butuhkan untuk membaca kondisi negara saat ini.

Kombinasi materi itu menurut saya, sangat kontekstual dengan kegelisahan zaman sekarang. Saya dan mungkin teman yang lain merasa menjadi pribadi yang berbeda ketika kita melangkah keluar dari ruangan. Kami pulang dengan pemikiran yang lebih utuh untuk ikut mengawal arah demokrasi bangsa ini.

Pengalaman tersebut juga mengubah cara saya memaknai demokrasi. Selama ini, demokrasi seringkali diasosiasikan dengan pemilu, parlemen, kampanye politik, atau demonstrasi di jalan. Padahal, demokrasi juga hadir dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Demokrasi hidup ketika anggota keluarga berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama, ketika warga bermusyawarah mengenai kepentingan

lingkungan, atau ketika seseorang menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan.

Hal yang sama juga berlaku di ruang digital. Setiap kali seseorang memilih untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menghindari penyebaran hoaks, atau menyampaikan kritik secara santun dan berbasis argumentasi, berarti sedang menjalankan nilai-nilai demokrasi.

Dari situ kita tersadar, kita tidak perlu menunggu menjadi anggota dewan atau pejabat publik untuk bisa berdemokrasi. Setiap keputusan yang kita ambil untuk melibatkan dialog, menghargai kesepakatan bersama, dan menghormati hak orang lain di sekitar kita, adalah tindakan demokratis yang paling murni.

■ **Anselma Putri**, Pelajar SMAN 3 Tangerang Selatan

ANAK MUDA BERANI BERSUARA

Oleh: **Bintang Arif Dya Putra**

Mengapa demokrasi penting? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi menurut saya jawabannya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Demokrasi memberi setiap warga negara hak untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan ikut menentukan arah bangsa. Demokrasi juga menjadi cara untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa serta mendorong pemerintahan yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Karena itulah saya merasa demokrasi bukan hanya urusan pemerintah atau orang-orang yang berkecimpung di dunia politik, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara, termasuk anak muda.

Pemahaman itu semakin saya rasakan ketika mengikuti Akademi Demokrasi Perludem. Di sana saya belajar banyak hal, mulai dari pemahaman dasar tentang demokrasi, sistem politik, simulasi debat, kampanye, hingga pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Dari kegiatan itu saya mulai menyadari bahwa menjadi warga negara yang baik perlu berani belajar, berdiskusi, dan peduli terhadap persoalan di sekitar kita.

Salah satu hal yang paling berkesan bagi saya adalah ketika mempelajari bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk

menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan, dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Demokrasi juga mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara dihadapan hukum tanpa membedakan latar belakangnya. Nilai-nilai tersebut membuat cara pandang saya terhadap demokrasi berubah.

Sebagai anak muda yang mulai tertarik mempelajari politik dan demokrasi, saya cukup sering menemukan teman, keluarga, bahkan guru yang menganggap politik sebagai sesuatu yang tidak penting. Ada juga yang beranggapan bahwa anak muda belum perlu mempelajari hal-hal seperti itu. Saya masih ingat ketika seorang teman berkata kepada saya, *“Ngapain sih ikut-ikutan begituan? Nggak seberapa penting. Lagian kamu juga nggak cocok ikut begituan.”* Mendengar perkataan itu, saya sempat berpikir, *“Apa benar anak muda seperti saya tidak pantas belajar politik dan demokrasi?”*

Namun, setelah saya mengikuti Akademi Demokrasi, saya justru semakin yakin bahwa anak muda harus berani belajar dan terlibat. Saya menyadari bahwa banyak orang acuh terhadap politik karena belum memahami bahwa keputusan politik sebenarnya sangat memengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

Pengalaman itu membuat saya mencoba berbagi dengan teman-teman di sekitar saya. Saya mulai mengajak mereka berdiskusi tentang pentingnya memilih pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Awalnya mereka kurang tertarik karena menganggap politik adalah pembahasan yang membosankan. Namun, ketika saya menjelaskan dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sekolah dan lingkungan sekitar, mereka mulai memahami bahwa politik ternyata bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka.

Pengalaman lain yang tidak kalah berharga adalah ketika saya bertemu dengan banyak peserta dari berbagai sekolah dalam kegiatan Akademi Demokrasi. Kami berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki semangat yang sama untuk belajar dan berdiskusi. Dari mereka saya belajar bahwa perbedaan pendapat bukanlah alasan untuk saling menjatuhkan. Justru melalui perbedaan itulah kita bisa saling memahami dan menemukan solusi yang lebih baik.

Saya juga belajar bahwa keberanian bersuara tidak harus dilakukan dengan cara yang keras atau menghina orang lain. Menurut saya, keberanian yang sesungguhnya adalah mampu menyampaikan pendapat dengan santun, berdasarkan fakta, dan tetap menghormati orang yang memiliki pandangan berbeda. Hal-hal sederhana seperti itulah yang menurut saya menjadi bagian dari praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Saya juga berharap sekolah dapat lebih sering mengadakan forum diskusi atau musyawarah mengenai isu-isu yang dekat dengan kehidupan pelajar. Dengan begitu, siswa dapat belajar menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, serta mencari solusi bersama. Menurut saya, kegiatan seperti ini merupakan latihan demokrasi yang sederhana, tetapi memiliki manfaat besar bagi generasi muda.

Sebagai generasi muda, kita tidak boleh takut untuk memahami politik dan demokrasi. Justru kita harus menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan peduli terhadap masa depan bangsa. Bagi saya, anak muda berani bersuara bukan berarti melawan, tetapi menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap Indonesia. Saya berharap semakin banyak anak muda yang mau belajar, berani menyampaikan aspirasi dengan

santun, serta tidak apatis terhadap demokrasi. Karena saya percaya, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk bersuara.

■ **Bintang Arif Dya Putra**, Pelajar SMA Yadika 5 Jakarta.

MIC DAN RUANG DIGITAL: APA ARTINYA DEMOKRASI BAGIKU?

Oleh: **Dominique Emanuela Sebastian Saragih**

“Cek, satu, dua, tiga,” suaraku memantul keras mengalahkan dengung mikrofon, sementara hidungku menangkap aroma manis parfum ruangan dan bau keringat dingin di tangan. Aku yang sedang gugup menggeser bingkai kacamataku.

Hari itu adalah tanggal 2 Mei 2026. Riuh keramaian bercampur hawa dingin AC aula SMA Negeri 28 Jakarta masih membekas kuat di kepalaku. Aku berdiri di sana sebagai ketua pelaksana acara IGNITE 2026, aku merasa sudah mencapai puncak leadership di masa SMA.

Ratusan pasang mata menatapku, menunggu aba-aba dariku. Tapi, di balik semua kebanggaan itu, kepalaku kosong kalau bicara soal hal-hal yang lebih besar seperti esensi demokrasi.

Aku belum sadar kalau mikrofon di tanganku hari itu akan punya makna yang jauh lebih dalam. Sebuah makna yang baru benar-benar aku temukan dan pahami setelah aku nekat terjun mengikuti Akademi Demokrasi Perludem.

Dulu, buatku kata demokrasi itu artinya cuma satu: *Pembahasan membosankan di buku PPKN*. Bagiku, demokrasi itu berat. Itu dunianya bapak-bapak berjas di acara debat TV, atau rutinitas *nyoblos* di TPS setiap lima tahun sekali. Di luar itu? *Definitely not my business*.

Sebagai anak SMA kelas 10, duniaku cuma berputar di sekitar tugas sekolah dan hobi. Aku jauh lebih suka menyusun *script* untuk rekaman *podcast*. Selain itu, waktuku juga habis untuk kampanye lingkungan. Aku sukanya turun ke lapangan bersama teman-teman di komunitas Marine Buddies Jakarta untuk menyuarakan krisis iklim. Aku merasa hal-hal yang aku lakukan itu murni cuma kegiatan sosial, atau sekadar *passion* biasa. Aku nggak kepikiran sedetikpun kalau aktivitasku itu punya irisan yang kuat dengan nilai-nilai demokrasi.

Sampai akhirnya, pandangan sempitku itu mulai tercerahkan setelah aku mengikuti Akademi Demokrasi Perludem selama dua hari.

Aku mendapatkan banyak sekali ilmu baru, salah satunya bagaimana demokrasi di ruang digital. Materi itu memberiku semacam *culture shock*. Ternyata, ruang digital adalah pilar dalam menjalankan demokrasi hari ini. Membuat *podcast* edukasi, mengkritik kebijakan lewat postingan Instagram, atau debatin hoaks, itu semua termasuk bentuk *citizen journalism*. Selama ini aku bukan cuma penonton, tapi aku sudah menjadi aktor demokrasi!

Aku jadi ingat sebuah artikel yang pernah kubaca dari Rumah Pemilu (2017.) Di sana, Ibu Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem saat itu) menyoroti betapa pentingnya membuka ruang partisipasi yang lebih luas untuk anak muda. Keterlibatan kita krusial untuk mengimbangi sistem penyelenggaraan pemilu yang makin melekat dengan teknologi digital. Kita punya porsi sebagai aktor demokrasi masa kini yang paling paham bahasa ruang virtual.

Lalu, pemahamanku semakin ditarik lebih dalam saat pelatihan mendapatkan materi keterampilan demokrasi. Aku belajar dua *core values* yang akhirnya mengubah caraku melihat diriku sendiri: *curiosity* (rasa ingin tahu) dan *responsibility* (tanggung jawab). Dulu kukira kebebasan bersuara itu artinya kita bebas koar-koar apa saja tanpa filter. Ternyata salah besar, demokrasi butuh pondasi tanggung jawab.

Aku jadi *flashback* ke tugas pelajaran Fisika beberapa waktu lalu,

yang membahas energi terbarukan dan ancaman krisis energi global. Waktu itu aku harus riset sangat dalam. Rasa ingin tahu (*curiosity*) itulah yang membuatku sabar mengumpulkan data-data soal emisi karbon dan dampak lingkungan. Lalu, membawa data valid itu menjadi bahan kampanye lingkungan dan membujuk orang di sekitarku agar mengubah kebiasaan membuang plastik, itu adalah bentuk *responsibility*.

Selain itu, aku juga belajar bahwa menggunakan data secara kolektif penting untuk menekan pembuat kebijakan adalah bentuk *public pressure*. Dan *public pressure* merupakan salah satu keterampilan demokratis yang paling kuat! Aksiku di Marine Buddies Jakarta bukan sekadar main-main, itu adalah bentuk demokrasi partisipatif. Aku sedang mempraktikkan pengawasan dan desakan kepada sistem pemerintahan agar berpihak pada keberlanjutan hidup kita.

Sekarang, kalau ditanya “Apa artinya demokrasi bagiku?” jawabanku sudah berubah. Demokrasi bukan sekadar teori sejarah yang dihafalkan, demokrasi adalah sebuah kombinasi yang menantang. Ia berawal dari *curiosity* untuk terus belajar mengenali masalah di lingkungan sekitarmu, dan berakhir pada *responsibility* untuk berani angkat bicara dengan data dan fakta yang benar.

Dalam Catatan Awal Tahun Perludem (2024), Perludem menuliskan sebuah pernyataan pengingat bahwa mewujudkan demokratisasi mesti terus diupayakan setiap saat. Demokrasi tidak akan bisa bertahan, apalagi membaik, kalau kita cuma diam dan berharap sistem berjalan otomatis. Harus ada yang berani mengambil langkah. Harus ada yang terus bergerak.

Kedepannya, jika aku mendapat kesempatan untuk memegang mikrofon lagi, entah itu menjadi MC di acara sekolah, memandu obrolan di *podcast*

bareng teman-teman, atau sekadar melakukan presentasi keliling kelas. Aku akan mengingat semua pelajaran ini. Mikrofon ku bukan cuma alat pengeras suara agar orang memperhatikanku. Mikrofon adalah sarana demokrasi. Dari ruang kelas SMA Negeri 28 Jakarta, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.

Because democracy is not just a high-level concept, it's our everyday responsibility to keep asking, keep learning, and keep speaking up. And when the time comes, I'm ready to take the mic.

■ **Dominique Emanuela Sebastian Saragih**, Pelajar SMAN 28 Jakarta.

DEMOKRASI TIDAK DIBANGUN DI RUANG TERTUTUP

Oleh: **Fahri Novan Dwi Kusnadi**

"Dengan segala hormat, saya mengundang para wartawan dan media untuk minum kopi di luar ya... karena di sini saya mau bicara dari hati ke hati."

Kalimat yang diucapkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi, Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta Convention Center, Jumat (26/6). Kalimat itu memang terdengar sangat santun, bahkan berhasil memancing tawa hadirin, namun hal itu langsung ramai dibicarakan di media sosial. Sebab setelah ujaran Presiden, media-media yang turut meliput langsung mematikan atau menutup *live*-nya secara serentak. Hal ini memicu banyak pendapat dan kegaduhan publik, khususnya bila dilihat dalam perspektif transparansi demokrasi, undangan minum kopi tersebut adalah sebuah ironi. Ini menjadi penanda halus bagaimana pers yang seharusnya sebagai mata dan telinga untuk masyarakat luas, perlahan digeser keluar dari ruang demokrasi.

Apabila kita telusuri lebih dalam, tujuan dari forum tersebut untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan sektor industri dengan maksud supaya hasil penelitian dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia. Melalui forum itu,

pemerintah bersama lebih dari 2.600 peserta yang terdiri dari 219 rektor, 44 direktur perguruan tinggi vokasi, 6 ketua perguruan tinggi, 1.596 dosen dan ilmuwan, serta 300 peneliti termasuk dari BRIN ingin mendorong lahirnya inovasi yang bermanfaat, meningkatkan kemandirian bangsa di bidang pangan, energi, dan industri, dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

Jika dilihat kembali dari tujuannya, maka masyarakat juga perlu tahu apa yang akan dibahas karena hasil dari forum ini akan menentukan nasib masa depan bangsa Indonesia. Dengan demikian pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menunjukkan bahwa forum tersebut bukanlah rapat kabinet tertutup maupun rapat kekeluargaan.

Maka tindakan pengusiran halus oleh Presiden Prabowo Subianto dengan alasan ingin bicara “dari hati ke hati” untuk memaparkan data dan fakta, perlu dikaji ulang dalam konteks nilai-nilai demokrasi yang menjunjung keterbukaan. Sebab tata kelola negara hukum, kebijakan publik, dan strategi pangan, serta data kemiskinan bukan urusan yang romantis atau rahasia keluarga. Demokrasi menuntut pembicaraan “dari data ke data” di ruang terbuka, bukan berdasarkan perasaan dekat pada ruang tertutup.

Tindakan pemerintah ini juga sangat mengkhawatirkan, karena selain menimbulkan kecurigaan di masyarakat umum, hal ini juga bertolak belakang dengan semangat reformasi yang ada di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 3 dan 6 mengenai fungsi kontrol sosial pers. Ketika para pers diperintahkan keluar atau mematikan kameranya, artinya fungsi kontrol sosial yang dilindungi dalam undang-undang otomatis lumpuh. Padahal kita selalu memahami bahwa ada

satu pilar yang turut memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi, yaitu pers sebagai pengawas eksternal. Pers merupakan mata serta telinga masyarakat, ia bertugas mengawasi jalannya tiga pilar seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Ironisnya, fenomena tersebut juga tidak sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menjamin hak setiap warga negara mengakses informasi. Hal ini berarti ada jutaan hak konstitusional rakyat yang ikut dipotong untuk mengetahui kemana arah kebijakan sains dan ekonomi kita mau dibawa. Padahal strategi kemandirian ekonomi, inovasi yang bermanfaat seperti riset bensin, sawit, atau kompor listrik, serta kebijakan yang berlandaskan ilmu bukan strategi militer atau pertahanan negara yang harus disembunyikan dari rakyat. Menutup ruang saat membahas hal ini justru memperlihatkan sikap pemerintah yang terlalu protektif dan “alergi” dipantau oleh publik sejak awal proses.

Ini adalah kritik tajam gaya sensor baru. Kalau dulu pers dibungkam dengan cara kasar, paksaan, serta penyitaan, sekarang zaman sudah berubah, lebih halus dan santun melalui senyuman, lelucon, dan undangan minum kopi. Cara ini jauh lebih berdampak dan berbahaya, karena mayoritas masyarakat tidak merasa kehilangan hak informasinya, padahal dampaknya tetap serupa yaitu akses publik diputus secara sepihak.

Pernahkan kalian membayangkan, apa yang terjadi pada 219 rektor dan ribuan ilmuwan atau para akademisi yang ditinggal di dalam ruangan tanpa sorotan media? Percakapan apa yang telah terjadi? Dan kerjasama apa yang tidak terpublikasi? Jika para elite akademisi dikumpulkan oleh elite penguasa di ruang tertutup, ada risiko domestikasi kaum intelektual. Kampus-kampus penghasil mahasiswa kritis yang berani bersuara harus

bersikap independensi. Tanpa pengawasan pers, forum ilmiah yang selalu mengedepankan kebenaran berdasarkan fakta dan data dapat berisiko menjadi ruang yang hanya sekedar memberi stempel legalitas atas segala keinginan dan data sepihak dari pemerintah.

Dampak jika hal ini terus dibiarkan, maka akan terjadi hambatan informasi, bahkan hilangnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Ketika publik sengaja dibutakan oleh perdebatan data, rakyat dipaksa menelan mentah-mentah hasil akhir dari pemerintah tanpa pernah tahu data tersebut valid atau justru penuh dengan masalah. Pada akhirnya segala perdebatan tidak akan berfungsi dan hanya dianggap sebagai pengkritik pemerintah, di sanalah demokrasi mengalami erosi.

Kita harus belajar dari sejarah, demokrasi tidak butuh rasa sopan santun yang perlahan menutup pintu bagi kebenaran. Demokrasi yang baik adalah yang berani terbuka lebar pada ruang dialog, maka apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut dirasa kurang pantas, mengingat posisinya sebagai pemimpin negara demokrasi yang diatur oleh undang-undang.

Dalam era keterbukaan seperti saat ini, pemerintah selayaknya menunjukkan sikap kredibilitas kepada publik melalui pers dengan membuka ruang dialog seluas-luasnya. Hal ini nantinya akan berdampak baik di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah berkurangnya sikap skeptis masyarakat dan akan meningkatkan kepercayaan publik pada kebijakan-kebijakan pemerintah selanjutnya.

■ **Fahri Novan Dwi Kusnadi**, Pelajar SMAN 19 Bekasi.

HAK UNTUK BERSUARA, TANGGUNG JAWAB UNTUK MENDENGAR

Oleh: **Ghanisa Aimar Adzani**

Sebelum mengikuti Akademi Demokrasi Perludem, saya mengira demokrasi hanya berhubungan dengan pemilu, pemerintahan, dan politik. Selama ini saya hanya memahami konsep demokrasi formal saja, yaitu sistem yang kekuasaannya di tangan rakyat. Saya tidak pernah menyadari bahwa demokrasi dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Namun setelah mengikuti Akademi Demokrasi, pandangan saya banyak yang berubah.

Awalnya alasan saya ikut sangat sederhana. Hanya karena penasaran dan ingin lebih tau banyak tentang demokrasi. Selama ini saya sering dengar istilah demokrasi, melalui mata pelajaran sekolah, pemberitaan, dan internet. Pengetahuan saya masih terasa minim sekali, kemudian saat mengetahui acara itu diadakan oleh Perludem, saya jadi makin tertarik. Saya yakin sekali, materinya akan berkualitas karena Perludem fokus di bidang demokrasi dan pemilu.

Pelatihan itu sangat membekas bagi saya, dan bagian paling berkesan adalah contoh-contoh keseharian yang diberikan fasilitator. Umumnya, contoh yang diberikan sangat dekat dengan kehidupan kami sebagai

pelajar. Misalnya, proses belajar di kelas, pemilihan ketua OSIS, dan bagaimana cara kami menyampaikan pendapat di lingkungan sekolah. Nah, baru saat itulah saya merasa demokrasi itu bukan cuma soal DPR atau pemilu saja.

Saya mulai melihat demokrasi ternyata hadir dalam kehidupan sehari-hari, melalui diskusi dan praktik berorganisasi. Sebenarnya saya sudah tahu kalau kegiatan-kegiatan itu bagian dari demokrasi. Namun, contoh tersebut membuat saya berpikir ternyata selama ini saya sering menjalani praktik demokrasi tanpa benar-benar memaknai prosesnya. Saya terbiasa bertanya di kelas, berdiskusi, atau mengikuti pemilihan ketua OSIS, tetapi jarang menyadari bahwa semua itu juga melatih keberanian untuk menyampaikan pendapat sekaligus menghargai keputusan bersama.

Meski begitu, saya juga sadar kalau demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Ada satu pengalaman, saya pernah ikut forum aspirasi siswa di sekolah. Waktu itu, para siswa diberikan kesempatan berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Tapi, jawaban yang kami terima lebih banyak dibalas dengan pembelaan, bukan benar-benar tanggapan atas aspirasi kami. Dari situ saya belajar bahwa memberi kesempatan untuk berbicara saja itu tidak cukup, demokrasi membutuhkan kemauan untuk mendengar, jika tidak dialog sebatas formalitas belaka.

Selain itu, saya juga mendapat pengetahuan lebih dalam soal aktor-aktor demokrasi. Sejak awal saya memang percaya bahwa rakyat memegang peran penting dalam demokrasi. Namun, pelatihan ini membuat saya memahami bahwa demokrasi juga dijaga oleh banyak aktor lain, seperti masyarakat sipil, media, dan komunitas. Dari situ saya semakin

yakin bahwa kita sebagai warga negara juga punya peran yang sangat penting, karena demokrasi nggak bakal jalan tanpa partisipasi rakyatnya.

Materi tentang demokrasi di ruang digital juga menambah perspektif baru bagi saya. Saat ini, media sosial sudah menjadi ruang yang dekat sekali dengan pemuda. Namun perlu diingat, media sosial membuat kita mudah menyampaikan aspirasi, diskusi, dan mengawasi kebijakan publik. Tapi ruang digital juga penuh tantangan, seperti misinformasi, disinformasi, penyebaran data pribadi. Dari materi ini, saya jadi paham bahwa kebebasan berpendapat harus dibersamai juga dengan tanggung jawab.

Kita harus bijak dalam menerima, memilah informasi, dan berpikir kritis sebelum memulai bersuara. Pengalaman itu mengubah cara pandang saya, ternyata demokrasi bukan hanya soal berani berbicara, tapi juga soal kemampuan berdialog, menyusun argumen yang baik, verifikasi informasi, dan menghargai sudut pandang orang lain. Hal ini juga agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi konflik, tapi jadi proses belajar bersama.

Selama Akademi Demokrasi, kami juga diberi kesempatan untuk presentasi ulang materi yang sudah disampaikan fasilitator secara berkelompok. Kelompok saya mendapatkan materi tentang aktor demokrasi. Waktu menyusun *mockup* presentasi, saya sengaja menambahkan kutipan:

“Democracy is not just about voting, but it’s about public reasoning”-- **Amartya Sen.**

Kalimat itu membekas bagi saya, karena menyadarkan bahwa demokrasi tidak cuma soal memilih atau menyampaikan pendapat saja. Tapi juga bagaimana masyarakat diberi ruang untuk berpikir kritis, mengelola informasi secara rasional, dan membangun dialog yang sehat dan aman.

Pengalaman ini makin menguatkan ketertarikan saya sama Ilmu Politik. Dari awal saya memang ingin lanjut studi ilmu politik, karena isu-isu

politik dan demokrasi selalu menarik untuk dipelajari. Saya ingin terus meningkatkan literasi informasi dengan membaca berita dari berbagai sudut pandang, belajar memahami isu publik secara kritis, dan berani menyampaikan pendapat dengan argumen yang baik, sambil tetap dapat menghargai pendapat orang lain.

Akademi Demokrasi Perludem mengajarkan saya bahwa demokrasi bukan cuma hak untuk bicara, tapi juga tanggung jawab dalam mendengar, menghargai perbedaan, dan membangun ruang dialog yang sehat. Bagi saya, demokrasi akan benar-benar berarti ketika setiap orang tidak hanya ingin didengar, tapi juga bersedia untuk mendengarkan. Dari situlah saya paham, hak untuk bersuara harus berjalan seiring dengan tanggung jawab untuk mendengar.

■ **Ghanisa Aimar Adzani**, Pelajar SMAN 8 Depok.

PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MASA DEPAN DEMOKRASI

Oleh: **Hadist Rajwa**

Pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak generasi muda penerus masa depan bangsa yang cerdas, kritis, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam bernegara dan berbangsa. Saat ini, banyak sekali pihak-pihak yang mengadakan pendidikan politik yang dapat dan mudah diakses oleh banyak sekali generasi muda, seperti Akademi Demokrasi, Academia Politica, Remaja Bernegara, Parlemen Remaja, Parlemen Pelajar, Dan yang lainnya.

Dalam program-program tersebut, para peserta bukan hanya belajar, tetapi juga merasakan sudut pandang pemangku kebijakan, sehingga dapat melihat lebih luas lagi kondisi negara dan lebih paham bagaimana cara berbangsa dan bernegara dengan baik. Dari situ, kita juga dapat mengetahui bahwa politik dan demokrasi bukan hanya tentang pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun ataupun partai politik, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagaimana cara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan khalayak.

Di era globalisasi dan digital saat ini. Informasi bergerak sangat amat cepat yang membuat generasi muda rentan untuk mendapatkan misinformasi dan disinformasi. Oleh karena itu, pendidikan politik

menjadi bekal yang sangatlah penting untuk generasi muda agar dapat dan mampu mencari dan menampung informasi dengan bijak, bernalar kritis, tidak mudah diprovokasi dan memprovokasi, serta dapat membuat keputusan berdasarkan fakta yang ada.

Menurut pengamatan saya, saat ini juga proses politik sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Banyak calon pemangku kebijakan datang dan hadir untuk menarik peminat dan pendukung yang dapat memperkuat suara mereka di kancah pemilu. Media sosial berperan penting, sebagai contoh Pada pemilu 2024 pasangan Prabowo Subianto-Gibran rakabuming raka menggunakan kecerdasan buatan dalam pemilu, seperti pembuatan animasi berbasis AI yang menonjolkan sisi ataupun karakter imut yang menarik perhatian khalayak umum dan dipublikasikan ke sosial media dan mendapatkan banyak sekali penonton.

Nah, dari sinilah peran pendidikan politik seperti hal-hal yang sudah disebutkan tadi sangatlah penting, karena politik itu menentukan hak dan juga kewajiban seorang berbangsa, bernegara, berdemokrasi, dan setiap warga negara dapat mengambil peran dalam membangun Indonesia. Pendidikan politik bukan hanya bertujuan menciptakan masyarakat yang memahami sistem pemerintahan, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang memiliki integritas, rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama, serta mampu berpikir kritis dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Dengan adanya pendidikan politik, generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, melainkan mampu menjadi pelaku yang aktif, solutif, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan negara.

Selain itu, pendidikan demokrasi juga mengajarkan bahwa setiap pendapat memiliki nilai yang sama dan harus disampaikan dengan cara yang santun, bertanggung jawab, serta berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi bukan sekadar memberikan suara pada saat pemilu, tetapi juga bagaimana kita menghargai perbedaan pendapat, membangun budaya musyawarah, serta mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama. Nilai-nilai inilah yang harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, adil, dan menjunjung tinggi semangat persatuan.

Melalui berbagai program pendidikan politik, peserta juga mendapatkan pengalaman yang tidak bisa diperoleh hanya melalui pembelajaran di dalam kelas. Sebagai contoh, dalam Parlemen Remaja maupun Parlemen Pelajar, para peserta diberikan kesempatan untuk merasakan secara langsung bagaimana menjadi seorang anggota legislatif. Mereka belajar menyusun gagasan, membahas rancangan kebijakan, melakukan sidang, berdiskusi, hingga memahami bagaimana sebuah keputusan negara lahir melalui proses yang panjang, penuh pertimbangan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kemudian, melalui Academia Politica, generasi muda diajak untuk memahami praktik demokrasi secara lebih mendalam. Peserta belajar bagaimana menyampaikan aspirasi kepada para pemangku kebijakan secara tepat, membangun argumentasi yang kuat berdasarkan data, serta memahami pentingnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Dari sini, peserta menyadari bahwa setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan ikut mengawal jalannya pemerintahan secara demokratis.

Sementara itu, dalam program Remaja Bernegara, peserta memperoleh gambaran mengenai bagaimana proses politik berjalan dari berbagai sudut pandang, mulai dari partai politik, lembaga legislatif, hingga hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat. Program ini mengajarkan bahwa menjadi bagian dari proses politik berarti harus

mampu mendengarkan kebutuhan masyarakat, memperjuangkan kepentingan publik, serta membangun kepercayaan melalui pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Begitu pula melalui Akademi Demokrasi, peserta diajak untuk memahami prinsip-prinsip demokrasi secara lebih komprehensif, mulai dari pentingnya partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, hingga pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Seluruh pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, karakter, serta kepemimpinan generasi muda. Dengan tujuan menghadirkan lebih banyak warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan Indonesia di masa depan.

■ **Hadist Rajwa**, Pelajar SMAN 12 Jakarta.

HAK BERSUARA DI TENGAH BAYANG-BAYANG PEMBUNGKAMAN

Oleh: **Janeeta S**

Mengapa kritik selalu diasosiasikan sebagai ketidaksukaan atau bahkan kebencian, padahal kritik tidak identik dengan kebencian? Pertanyaan tersebut selalu terlintas di benak saya ketika mempelajari demokrasi dan mengamati bagaimana kebebasan berpendapat dijalankan di ruang publik. Bukankah kritik lahir karena masih adanya harapan untuk memperbaiki, bukan semata-mata untuk menjatuhkan? Namun sayangnya, tidak sedikit orang yang memandang kritik sebagai ancaman, sehingga perbedaan pendapat justru berujung pada ancaman.

Seperti yang saya pahami, demokrasi membutuhkan percakapan yang bebas dan terbuka, serta ruang yang sanggup menampung suara yang beraneka. Dengan begitu demokrasi bukanlah sekedar pesta lima tahunan atau proses memilih pemimpin, tapi juga bagaimana setiap suara tetap didengar bahkan setelah pesta demokrasi itu berakhir.

Demokrasi pada hakikatnya tidak hanya dimaknai sebagai government by the people, yaitu pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga harus berlandaskan government of reason, yakni pemerintahan yang

dijalankan dengan akal sehat, dan berorientasi pada keadilan. Sebab, politik pada dasarnya merupakan upaya untuk mendistribusikan keadilan, sehingga setiap kebijakan yang diambil seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat.

Namun, idealisme tersebut seringkali berbenturan dengan kenyataan. Tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa, *“Suara rakyat dirayakan saat pemilu, lalu dilupakan setelah kursi-kursi terisi.”* Hal itu menggambarkan kegelisahan bahwa partisipasi masyarakat seolah hanya dianggap penting ketika pemilu berlangsung. Setelah itu, suara rakyat perlahan kehilangan ruang untuk didengar.

Padahal, demokrasi tidak boleh berhenti ketika pemilu selesai. Justru setelah pemilu, demokrasi diuji melalui keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik, mendengarkan aspirasi, serta memberikan ruang bagi warga negara. Sangat disayangkan karena sebagian masyarakat masih merasakan demokrasi hanya hadir sebagai konsep, belum sepenuhnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Realitas menunjukkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan nilai-nilai idealnya. Kritik masih sering disamakan dengan ujaran kebencian atau bentuk dari permusuhan, padahal keduanya memiliki makna yang sangat berbeda. Kritik bertujuan untuk memperbaiki, sedangkan kebencian hanya bertujuan untuk menjatuhkan. Ketika masyarakat tidak lagi mampu membedakan keduanya, ruang demokrasi menjadi semakin sempit dan kebebasan untuk berpendapat pun ikut terancam.

Misalnya, melihat beberapa kejadian belakangan, kritik justru dianggap musuh negeri dan perbedaan dianggap ancaman yang harus diakhiri. Fitnah dan cacian memang berbahaya, tetapi bukan alasan untuk

membungkam perbedaan. Demokrasi justru tumbuh ketika masyarakat mampu menerima kritik sebagai bagian dari proses memperbaiki negara, bukan sebagai ancaman yang harus dibungkam.

Keresahan yang saya rasakan perlahan-lahan mulai terjawab ketika saya mengikuti kegiatan Akademik Demokrasi Perludem. Disana, saya tidak hanya menerima materi saja tetapi memperoleh cara pandang baru dan lebih luas terhadap demokrasi serta kebebasan berpendapat. Pengalaman tersebut mengubah cara saya memandang kritik. Ternyata kritik bukan sekedar menunjukkan siapa yang salah, tetapi juga menjadi sebuah tanggung jawab warga negara agar demokrasi tetap terarah. Ketika masyarakat mulai takut untuk menyuarakan suaranya dan pemerintah tidak lagi bersedia mendengarkan, yang perlahan memudar bukan hanya kebebasan berbicara, melainkan juga esensi demokrasi.

Pada titik itulah saya memahami bahwa demokrasi sebagai konsep ternyata berbeda dengan mengalaminya dalam kehidupan nyata. Akademi Demokrasi seakan mengajak saya menoleh ke belakang, pada sebuah pengalaman yang pernah saya lalui. Dahulu hanya saya anggap kejadian biasa, namun sekarang saya sadar bahwa kejadian tersebut menunjukkan rapuhnya ruang demokrasi di era digital.

Sejak beberapa waktu yang lalu, saya sudah terbiasa menyampaikan pendapat dan juga memberikan kritik melalui beberapa platform di media sosial. Kritik yang saya sampaikan selalu mengupayakan beretika, tidak menjatuhkan pihak manapun, serta berfokus pada persoalan bukan menyerang secara personal. Namun, tidak semua orang memaknainya dengan cara yang sama.

Harapan saya, untuk memperoleh tanggapan yang membangun justru sebaliknya, berujung pada komentar-komentar yang menyerang diri saya

secara personal. Pengalaman tersebut tentu meninggalkan dampak yang tidak kecil, sebagai seorang remaja yang masih dalam proses bertumbuh, saya sempat merasa takut ketika menyatakan pendapat di ruang publik.

Meski saya tidak dapat memastikan siapa yang berada dibalik komentar-komentar tersebut, tetapi dengan adanya pengalaman itu dapat menunjukkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya aman dan bahkan dapat menjadi senjata. Akibatnya, percakapan yang seharusnya diisi dengan pertukaran argumentasi dan memperkaya sudut pandang, perlahan bergeser di mana substansi kritik tenggelam oleh serangan personal.

Saya percaya bahwa demokrasi tidak memaksakan semua orang harus memiliki pendapat yang sama. Sebagaimana adagium Audi Alteram Partem mengajarkan bahwa setiap suara berhak didengar sebelum dihakimi. Demokrasi hanya ingin memastikan bahwasanya perbedaan pendapat tetap memiliki ruang untuk didengar tanpa dibungkam, dan setiap kritik tetap dapat tersampaikan tanpa harus dibalas dengan ujaran kebencian.

Perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan sebuah kesempatan untuk saling memahami dengan menempatkan argumen di atas ego. Di sisi lain, setiap individu, termasuk saya sendiri, memiliki tanggung jawab tetap menjaga etika dalam menyampaikan kritik sehingga kebebasan berpendapat tetap menjadi jembatan lahirnya gagasan.

Kini, saya menemukan jawaban atas pertanyaan yang mengawali tulisan ini, mengapa kritik begitu sering diasosiasikan sebagai kebencian? Jawabannya terletak pada cara sebagian orang memaknai kritik. Alih-alih mendengarkan dan memahami substansi yang disampaikan, sebagian

orang justru lebih cepat bereaksi dan menghakimi. Padahal, kritik yang disampaikan dengan etika tidak lahir dari kebencian, tapi dari harapan agar keadaan dapat berubah ke arah yang lebih baik.

Pada akhirnya, saya menyadari bahwa kritik tidak pernah menjadi musuh demokrasi. Nilai yang terkandung dalam adagium *Salus Populi Suprema Lex Esto*, mengingatkan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Maka dari itu kritik yang disampaikan demi kepentingan seharusnya dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga sebuah demokrasi bukan sebagai ancaman yang harus dibungkam.

Musuh yang sesungguhnya adalah ketika kita berhenti mendengar, dan memilih menghakimi daripada memahami, serta membiarkan rasa takut membungkam keberanian untuk bersuara. Kita selalu membutuhkan perbedaan, karena dari situlah lahir dialog, gagasan, argumentasi dan perubahan. Maka dari itu saya berharap ruang publik, dan khususnya ruang digital dapat menjadi sarana yang aman, di mana setiap suara didengar dan setiap kritik dihargai.

Sebagai generasi muda yang pernah merasakan kritik dibalas dengan perundungan siber, justru saya semakin yakin bahwa diam bukanlah jawaban. Demokrasi selalu membutuhkan perbedaan, sebab dari perbedaanlah lahir dialog, argumentasi dan perubahan. Di tengah derasny arus informasi dan dinamika ruang digital, tentunya generasi muda memiliki peran penting yaitu menjadi pelopor budaya berdialog yang sehat.

■ **Janeeta S**, Pelajar SMA Budi Mulia

DEMOKRASI TIDAK HIDUP DENGAN SENDIRINYA

Oleh: **Kevin Kilian Heryanda**

Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya makna demokrasi? Atau mengapa begitu banyak mahasiswa turun ke jalan mengatasnamakan demokrasi? Sebelum ikut menyuarakan aspirasi atau terlibat dalam berbagai gerakan sosial, sudah semestinya kita memahami terlebih dahulu apa tujuan dan makna demokrasi itu sendiri. Jangan sampai kita hanya mengikuti arus atau sekadar *fear of missing out* (fomo), tanpa benar-benar mengerti nilai yang sedang diperjuangkan.

Demokrasi ibarat sebuah pohon yang tumbuh kokoh. Pohon itu tidak akan menjulang tinggi tanpa akar yang kuat dan batang yang mampu menopangnya. Begitu pula demokrasi, hanya dapat tumbuh apabila ditopang oleh nilai-nilai yang kokoh serta masyarakat yang memahami dan merawatnya.

Sebelum membahas lebih jauh, saya menemukan sebuah kutipan yang menurut saya mampu membuka cara pandang kita tentang demokrasi.

“Demokrasi hanya bisa bekerja jika warga memiliki kesempatan nyata untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, serta memengaruhi arah kebijakan publik.” Robert A. Dahl.

Menurut saya, demokrasi bukanlah sesuatu yang lahir sebagai keputusan

final. Demokrasi terus berkembang melalui kritik, masukan, perbedaan pendapat, bahkan konflik yang terjadi dalam perjalanan sejarah. Karena itu, demokrasi selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Amartya Sen (1999) menjelaskan bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berekspresi, kebebasan memperoleh informasi, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks ini, kebebasan bukan hanya berarti memiliki hak yang tertulis di atas kertas, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang benar-benar dapat menggunakan hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh, seorang pelajar memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, apabila ia takut berbicara karena tekanan sosial, intimidasi, atau minimnya akses terhadap informasi yang benar, maka kebebasan tersebut sesungguhnya belum terwujud sepenuhnya. Akibatnya, demokrasi hanya berjalan secara prosedural tanpa menghadirkan substansi yang sesungguhnya. Kondisi seperti inilah yang berpotensi melahirkan demokrasi semu.

Sebagai generasi muda, terdapat empat nilai utama yang perlu dimiliki dalam kehidupan demokrasi, yaitu kebebasan, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas. Kebebasan menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa rasa takut, kesetaraan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk didengar tanpa memandang latar belakang, partisipasi mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai ruang publik, sedangkan akuntabilitas memastikan setiap pemegang kekuasaan bertanggung jawab.

Namun perlu dicatat, demokrasi tidak berjalan dengan sendirinya, melainkan hidup melalui peran berbagai aktor yang saling melengkapi. Warga negara sebagai pemegang kedaulatan memiliki hak untuk memilih, mengawasi jalannya pemerintahan, dan berpartisipasi dalam pembentukan opini publik. Partai politik berperan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam proses perumusan kebijakan sekaligus melakukan kaderisasi calon pemimpin bangsa. Sementara itu, masyarakat sipil berfungsi mengadvokasi kepentingan publik, memberikan pendidikan politik, serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Di Indonesia, sistem ketatanegaraan menganut prinsip *trias politica*, dalam kerangka pemerintahan presidensial. Melalui sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang utama (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Namun, selain ketiga aktor tersebut, media massa juga memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas kehidupan demokrasi, melalui informasi yang diproduksi.

Sebagai generasi muda, sepatutnya kita memiliki pemahaman bahwa demokrasi adalah ruang yang harus terus dirawat melalui partisipasi, keberanian menyampaikan pendapat, serta kesediaan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, kita tidak hanya menjadi penonton demokrasi, tetapi juga menjadi perintis yang ikut menjaga dan mengembangkannya demi masa depan bangsa.

■ **Kevin Kilian Heryanda**, Pelajar SMAN 1 Jakarta.

KEDAULATAN RAKYAT ATAU KEDAULATAN ELITE?

Oleh: **M. Ilham**

Beberapa waktu lalu, jagat politik, ruang publik, dan ruang digital Indonesia dihebohkan oleh sebuah frasa satir yang dilontarkan oleh Presiden dalam sebuah forum internal, yakni “*Ndasmu*”. Bagi sebagian kalangan, ucapan tersebut barangkali dianggap sekadar seloroh atau ekspresi spontan. Namun, jika kita menelaahnya secara mendalam dengan kacamata kritis, frasa tersebut sejatinya bertindak sebagai sebuah alarm keras yang mengusik kesadaran kita mengenai arah perkembangan politik kontemporer.

Kalimat tersebut memantik sebuah pertanyaan mendasar yang sangat reflektif: apakah esensi kedaulatan rakyat di republik ini memang sedang mengalami simplifikasi dan reduksi sedemikian rupa di panggung politik nasional? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2, dengan sangat eksplisit menitahkan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Kendati demikian, realitas sosio politik yang kita saksikan sehari-hari justru kerap kali mempertontonkan sebuah paradoks yang menganga lebar antara teks suci konstitusi dengan implementasi faktual di lapangan.

Sebelum mendapatkan kesempatan berharga untuk berpartisipasi di Akademi Demokrasi, saya terjebak dalam pemahaman konvensional

yang mengasumsikan bahwa demokrasi hanyalah sebuah ritual prosedural lima tahunan. Demokrasi, dalam benak saya kala itu, hanya sekadar aktivitas mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS), membuka surat suara, mencoblos gambar paslon pilihan, lalu pulang dengan jari yangelingkingnya telah dibasahi tinta ungu.

Namun, setelah berproses di Akademi Demokrasi cakrawala berpikir saya jauh lebih holistik dan terbuka. Saya menyadari bahwa demokrasi bukanlah sebuah benda mati di bilik suara, melainkan sebuah ekosistem yang hidup, dinamis, dan membutuhkan perawatan terus-menerus. Demokrasi yang substansial menurut saya, menuntut adanya pelibatan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), transparansi penuh, akuntabilitas publik dari para pemangku kebijakan, serta supremasi hukum yang tidak terbang pilih.

Apabila kita merefleksikan kehidupan sehari-hari, benih-benih praktik demokrasi sesungguhnya telah ditanam dan diupayakan sejak dini dalam skala mikro. Di lingkungan sekolah, kita dapat mengidentifikasinya melalui proses pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas yang jujur, adil, dan mengedepankan musyawarah. Sementara di lingkungan masyarakat sekitar, nilai demokrasi mewujudkan nyata dalam forum-forum rembuk warga atau musyawarah RT/RW untuk menentukan arah pembangunan fasilitas bersama. Praktik-praktik berskala kecil ini berjalan dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan kesetaraan suara. Sayangnya, ketika sistem pengelolaan ini ditarik ke tingkatan makro dalam skala tata kelola bernegara, wajah demokrasi kita seolah mengalami metamorfosis yang mengkhawatirkan. Suara dan aspirasi rakyat, yang menurut teori kedaulatan merupakan substansi tertinggi dari legitimasi kekuasaan, acap kali hanya dinilai sebagai komoditas politik yang laku

diperjualbelikan menjelang pesta pemilu, untuk kemudian cenderung diabaikan begitu kontestasi selesai.

Kelesuan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini bukanlah sebuah kecurigaan tanpa dasar atau sekadar narasi pesimistis. Penurunan indeks atau stagnasi kualitas ini diperkuat oleh sejumlah tantangan sistemik yang nyata. Tantangan pertama dan yang paling akut adalah masifnya praktik politik uang (*money politics*). Biaya kontestasi politik di Indonesia yang terlampau tinggi menciptakan lingkaran setan yang berbahaya. Tingginya modal yang dikeluarkan oleh kandidat kepala daerah maupun legislator menyebabkan orientasi kerja mereka saat menjabat sering kali bergeser dari pelayanan publik menjadi upaya pengembalian modal investasi politik serta pemuasan syahwat kelompok patronase.

Tantangan kedua terletak pada *cyberspace* kita, yang mengalami degradasi fungsi secara drastis. Media sosial yang awalnya diproyeksikan menjadi ruang publik digital (*digital public sphere*) yang demokratis dan setara, kini justru bertransformasi menjadi ruang gema (*echo chamber*) yang sarat akan polarisasi dan penyebaran disinformasi terstruktur. Berdasarkan laporan dan kajian siber nasional, volume hoaks dan ujaran kebencian selalu mengalami lonjakan eksponensial setiap kali mendekati momentum politik pemilu.

Keberadaan pendengung berbayar (*buzzer*) dan praktik *trolling* politik sengaja direkayasa untuk mengaburkan substansi kebijakan, menyerang karakter lawan politik secara personal, serta membelah masyarakat menjadi kubu-kubu ekstrem yang saling bermusuhan. Untuk itu, fenomena sosiologis “netizen maha benar” yang kerap dipicu oleh kemarahan kolektif hasil manipulasi informasi merupakan bukti nyata bahwa partisipasi publik di ruang digital

saat ini masih bersifat semu, tidak didasari oleh kesadaran kritis melainkan oleh sentimen emosional belaka.

Kondisi digital yang *blur* ini selaras dengan analisis dari para ilmuwan politik internasional. Sebagai contoh, studi klasik mengenai efek bumerang dari *misinformasi* oleh Nyhan dan Reifler (2010), yang mengkonfirmasi betapa sulitnya meluruskan fakta di tengah masyarakat yang telah terpolarisasi secara ideologis. Di Asia Tenggara, riset mendalam oleh Ong dan Cabañes (2018) mengenai arsitektur disinformasi di Filipina menguak bagaimana para elite menggunakan jaringan pekerja digital bayaran untuk memanipulasi opini publik dan merusak kredibilitas institusi demokrasi dari dalam. Pola-pola manipulasi yang mirip inilah yang kini tengah mengancam integritas konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Menghadapi berbagai distorsi sistemik tersebut, generasi muda tidak boleh terjebak dalam sikap apolitis, sinisme, ataupun apatisme massal. Kita harus menyadari bahwa masa depan kualitas demokrasi berada di pundak generasi kita. Langkah konkret yang dapat kita lakukan adalah dengan menginisiasi transformasi dari pemilih yang emosional menjadi pemilih yang rasional dan berbasis pengetahuan. Generasi muda harus memanfaatkan literasi digital yang mereka miliki untuk melacak rekam jejak para kandidat secara objektif, menyaring informasi sebelum membagikannya “*think before you post*”, serta dengan tegas menolak segala bentuk suap atau politik uang dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai penutup, kutipan pemantik "*ndasmu*" di awal tulisan ini sepatutnya kita posisikan sebagai refleksi kolektif dan pengingat yang tajam. Demokrasi bukanlah hak milik eksklusif para elite politik, bukan pula sebuah panggung sandiwara kata-kata tanpa makna yang dimainkan demi kekuasaan belaka. Demokrasi adalah hak prerogatif sakral milik kita semua sebagai warga negara sekaligus pemilik sah republik ini. Kita tidak boleh membiarkan kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan harta, darah, dan air mata oleh para pahlawan reformasi, runtuh dan hancur begitu saja hanya karena kita lalai, abai, dan enggan merawatnya secara konsisten.

■ **M. Ilham**, Pelajar SMAN 1 Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

HARUSKAH PEMIMPIN SELALU LAKI-LAKI?

Oleh: **Meida Amelia**

Mengapa sosok pemimpin sering kali identik dengan laki-laki? Apakah menjadi laki-laki otomatis lebih kompeten untuk memimpin? Sebaliknya, apakah perempuan selalu dianggap memiliki kepemimpinan yang lebih lemah? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang muncul dalam benak saya ketika melihat praktik pemilihan ketua OSIS di sekolah.

Selama bersekolah di salah satu Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di pinggiran Jakarta, saya mendapati bahwa jabatan Ketua OSIS hanya dapat diisi oleh siswa laki-laki. Siswi hanya diperbolehkan menjadi wakil ketua atau anggota. Ketika saya bertanya mengapa demikian, jawaban yang saya terima hampir selalu sama: karena sekolah berada di bawah naungan Kementerian Agama dan berlandaskan nilai-nilai Islam, maka pemimpin harus laki-laki.

Jawaban tersebut justru membuat saya semakin penasaran. Benarkah Islam melarang perempuan menjadi pemimpin? Ataukah persoalannya lebih kompleks daripada sekadar boleh atau tidak boleh?

Rasa ingin tahu itu mendorong saya mencari berbagai referensi. Dari proses tersebut saya memahami bahwa persoalan kepemimpinan perempuan merupakan salah satu isu yang memiliki beragam pandangan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa kepemimpinan tertinggi sebaiknya dipegang oleh laki-laki, sementara

sebagian ulama lain memandang bahwa persoalan tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks, jenis kepemimpinan, dan tujuan yang hendak dicapai.

Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan adalah QS. An-Nisa ayat 34 yang menyebut laki-laki sebagai *qawwam* (pelindung) bagi perempuan, dan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah:

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.” (HR. Bukhari)

Padahal, *asbabul wurud* hadits tersebut ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib, yang menjadi pemicu Perang Jamal pada tahun 36 H. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah, dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas.

Para pensyarah hadits menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Alkisah, negeri Kisra, salah satu bagian dari Persia memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya, pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra.

Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya, ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebutkan kemunduran kerajaan itu akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi, maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta ‘terpaksa’ anak perempuannya yang menjadi raja dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan.

Namun seringkali, orang-orang memakai dalil tersebut tanpa memahami konteks, dan ditempatkan pada konteks yang sembarangan.

Di sisi lain, Al-Qur'an juga menghadirkan kisah Ratu Bilqis dalam Surah An-Naml. Menariknya, Al-Qur'an tidak menyoroti jenis kelaminnya sebagai seorang pemimpin, melainkan menggambarkan kebijaksanaan, sikap musyawarah, dan kerendahan hatinya ketika menghadapi Nabi Sulaiman a.s. Kisah tersebut menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan juga menjadi aspek penting yang mendapat perhatian.

Dari berbagai pandangan tersebut, saya tidak ingin menyimpulkan bahwa satu pendapat lebih benar daripada yang lain. Persoalan ini merupakan wilayah *ijtihad* yang memang membuka ruang perbedaan pendapat. Akan tetapi, pengalaman di sekolah membuat saya bertanya: bagaimana seharusnya prinsip demokrasi diterapkan dalam proses pemilihan ketua OSIS?

Demokrasi mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, serta memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Jika sejak awal siswi tidak diberi kesempatan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS hanya karena jenis kelaminnya, bukankah kesempatan berpartisipasi tersebut menjadi tidak setara?

Apabila alasan yang digunakan adalah ajaran Islam, saya justru melihat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Karena itu, saya bertanya-tanya apakah kebijakan tersebut benar-benar merupakan implementasi nilai-nilai Islam, ataukah hasil dari salah satu penafsiran yang kemudian diterapkan sebagai aturan sekolah.

Robert A. Dahl dalam *On Democracy* menjelaskan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan apabila setiap warga memiliki kesempatan nyata untuk berpartisipasi, menyampaikan pandangan, dan mempengaruhi arah kebijakan. Gagasan tersebut mengingatkan saya bahwa demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan juga tentang apakah setiap orang memperoleh kesempatan yang sama sebelum proses pemilihan berlangsung.

Bagi saya, demokrasi dimulai ketika setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Jika sejak awal ruang tersebut dibatasi berdasarkan gender, maka proses demokrasi belum sepenuhnya terlaksana.

Saya memahami bahwa sekolah tentu memiliki pertimbangannya sendiri. Namun, sekolah juga merupakan tempat peserta didik belajar berpikir kritis, berdialog, dan memahami berbagai sudut pandang. Saya sering membayangkan, bagaimana jika ada seorang siswi yang memiliki kemampuan memimpin yang sangat baik dan dipercaya oleh teman-temannya? Bukankah akan lebih adil apabila ia diberi kesempatan untuk mengikuti proses pencalonan, lalu seluruh warga sekolah menentukan pilihan berdasarkan kapasitas dan integritasnya?

Tulisan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap ajaran Islam ataupun upaya menyatakan bahwa satu pendapat ulama lebih benar daripada pendapat yang lain. Sebaliknya, tulisan ini merupakan refleksi seorang siswi yang berusaha memahami hubungan antara nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang memberikan ruang partisipasi bagi setiap warga.

Karena itu, pertanyaan yang masih saya simpan hingga hari ini bukanlah, *"Haruskah perempuan menjadi pemimpin?"* Melainkan, *"Haruskah kesempatan untuk menjadi pemimpin ditentukan oleh jenis kelamin sebelum kemampuan seseorang sempat dinilai?"*

Saya percaya bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut mungkin berbeda bagi setiap orang. Namun, saya berharap sekolah dapat menjadi ruang yang tidak hanya mengajarkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mendorong peserta didik untuk berdiskusi, berpikir kritis, dan mencari makna keadilan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

■ **Meida Amelia**, Pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 9 Jakarta.

MENYEMAI BENIH DEMOKRASI
DI AKAR RUMPUT:

REFLEKSI TENTANG DEMOKRASI DAN RUANG DIGITAL

Oleh: **Muh Syabril Diandra**

Banyak orang memandang demokrasi hanya sebagai pemilu atau pergantian pemimpin melalui pemungutan suara. Sebelum mengikuti Akademi Demokrasi, saya pun tidak jauh berbeda. Demokrasi yang saya pahami sebatas proses memilih pemimpin setiap beberapa tahun sekali.

Namun, setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, saya menyadari bahwa demokrasi jauh lebih luas daripada sekadar prosedur politik. Demokrasi adalah cara hidup yang mengajarkan kesetaraan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta partisipasi setiap warga dalam menentukan masa depan bersama.

Pemahaman tersebut membuat saya melihat bahwa demokrasi sesungguhnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dari cara kita berdiskusi, menghargai perbedaan pendapat, menyampaikan kritik, hingga mengambil keputusan bersama merupakan bagian dari praktik demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi tidak hanya hidup di ruang parlemen, tetapi juga di sekolah, keluarga, organisasi, dan lingkungan tempat kita tinggal.

Salah satu materi yang paling berkesan bagi saya adalah pembahasan mengenai aktor-aktor demokrasi. Selama ini saya mengira bahwa demokrasi hanya dijalankan oleh pemerintah atau partai politik. Padahal, masyarakat sipil, termasuk generasi muda, juga memiliki peran yang sangat penting. Karena pemuda juga dapat menjadi penggerak perubahan melalui partisipasi aktif di tengah masyarakat.

Namun tantangan demokrasi hari ini juga cukup berat, perkembangan teknologi informasi semakin memperluas ruang partisipasi demokrasi. Saat ini, setiap orang dapat menyampaikan pendapat, mengawasi kebijakan publik, bahkan menggalang dukungan sosial melalui media digital. Melalui media sosial memungkinkan masyarakat menyuarakan aspirasi tanpa harus selalu hadir dalam forum-forum formal.

Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Ruang digital tidak hanya dipenuhi informasi yang bermanfaat, tetapi juga hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi. Algoritma media sosial sering kali membuat seseorang hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya sendiri sehingga ruang diskusi menjadi semakin sempit. Akibatnya, perbedaan pendapat justru menjadi konflik untuk saling menyalahkan.

Karena itu, saya menyadari bahwa demokrasi di era digital membutuhkan kemampuan baru, yaitu literasi digital. Kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi, memahami berbagai sudut pandang, dan berdiskusi secara santun menjadi bekal penting agar ruang digital tetap menjadi ruang publik yang sehat.

Pelajaran lain yang saya peroleh dari Akademi Demokrasi adalah pentingnya keterampilan demokratis. Demokrasi tidak cukup dipahami

sebagai konsep, tetapi juga harus dipraktikkan melalui tindakan nyata. Salah satunya adalah membiasakan pengambilan keputusan berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar asumsi atau kepentingan kelompok tertentu.

Saya membayangkan keterampilan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, misalnya pada setiap menentukan program, masyarakat dapat terlebih dahulu melakukan pendataan mengenai kebutuhan warga, potensi desa, maupun persoalan yang dihadapi, seperti pengelolaan sampah atau pemberdayaan ekonomi. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan kondisi nyata sekaligus melibatkan lebih banyak warga dalam prosesnya.

Selain kemampuan mengumpulkan data, keterampilan berdialog dan menyelesaikan perbedaan pendapat juga menjadi bagian penting dari demokrasi. Dalam setiap komunitas tentu terdapat kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, musyawarah, negosiasi, dan kemampuan mencari titik temu merupakan keterampilan yang perlu terus dilatih agar setiap keputusan dapat diterima secara bersama.

Selain itu, saya juga melihat bahwa media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana advokasi yang positif. Pemuda dapat menggunakan berbagai platform digital untuk mengangkat isu-isu lokal, seperti pelestarian lingkungan, transparansi penggunaan anggaran desa, atau kegiatan sosial di masyarakat. Jika dilakukan dengan informasi yang akurat dan penyampaian yang santun, media digital dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan para pengambil kebijakan.

Melalui Akademi Demokrasi, saya memahami bahwa menjaga demokrasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga

negara. Demokrasi juga membutuhkan partisipasi warga yang memiliki pengetahuan, kepedulian, dan keterampilan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab.

■ **Muh Syabril Diandra**, Pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Bogor.

MUSEUM DEMOKRASI: REFLEKSI NEGOSIASI

Oleh: **Rania Amira**

“Kami menolak tawaran itu”

“Kalau begitu, tidak ada kesepakatan”

“Yang Mulia, kami ingin mengajukan usulan baru”

Awalnya ruangan terasa berat akan kantuk, tiba-tiba berubah menjadi medan peperangan. Simulasi negosiasi yang diadakan oleh tim kami, berubah menjadi perang verbal tanpa henti. Toko A maju dengan gagasan mereka, yakin dengan tawaran yang akan memenangkan hati Sang Raja. Toko B mengobservasi tawaran Toko A, berusaha membuat tawaran mereka lebih baik agar Sang Raja mau menerimanya. Simulasi yang kami kira akan berjalan dengan mulus, berubah menjadi sesuatu yang lebih ‘human’. Argumen saling bertumpuk, interupsi terus terjadi, suasana tegang, dan bahkan tim Raja terlihat beberapa kali tidak kompak dalam menyetujui dan menolak penawaran.

Lalu apa yang kami lakukan sebagai tim pembuat simulasi dan pihak regulator? Kami tertawa melihat semua tingkah lucu mereka, bagaimana nada mereka ketika menyampaikan permohonan, hingga Sang Raja yang meminta Toko A untuk menghibur mereka agar penawaran mereka disetujui. Semua bagai drama komedi yang dipentaskan dengan baik. Saya sendiri, sebagai individu yang pertama kali mengusulkan simulasi

ini kepada tim, tidak menyangka bahwa partisipan akan sangat serius dan sangat konyol dalam menjalani simulasi ini. Saya pun, menyadari ada dua hal yang gagal kami lakukan sebagai pihak regulator.

Pertama, kami gagal untuk menjadi pihak yang tegas. Kami melihat sendiri, di depan mata kami, ada proses ‘menjilat’ yang dilakukan selama berjalannya negosiasi. Terasa seperti candaan belaka, dan memang hanya candaan fana. Tetapi pengalaman ini cukup membuat saya sadar bahwa, “Akan gawat kalau hal seperti ini terjadi di skala yang lebih besar dan serius.” Saya rasa, momen dimana pihak regulator tidak dapat tegas, adalah momen dimana itu akan mencederai mayoritas bagian dari negosiasi dan diskusi. Hal yang seharusnya tidak diperbolehkan, dibiarkan lewat begitu saja. Ditanya apakah mereka lihat? Tentu mereka lihat. Tetapi, apakah mereka cukup peduli untuk menegur dan mendisiplinkan pihak yang menyalahi aturan? Tidak.

Kedua, saya menyadari adanya misinformasi terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap simulasi. Tiap kali saya mendengar adanya pertanyaan dari partisipan, saya perlu berpikir sejenak. Dan saya rasa, hal ini sama krusialnya ketika pihak regulator tidak menyadari adanya kesalahan dalam regulasi, disitulah datang sebuah kehancuran. Kehancuran yang saya maksud disini adalah kehancuran satu gambaran besar regulasi. Idealnya, regulasi dipahami oleh partisipan sebagai satu gambaran besar yang universal dan dicerna dengan pemahaman yang sama.

Gambaran itu ditujukan sebagai pedoman berjalannya regulasi/simulasi.

Kegagalan ini dapat dilihat ketika simulasi negosiasi sesi empat. Toko A dan Toko B memiliki gambaran kecil sendiri mengenai interpretasi terhadap cara memenangkan simulasi. Sang Raja pun juga memiliki gambaran mereka sendiri. Disinilah, pemahaman mengenai simulasi menjadi tidak universal. Yang menciptakan, Toko A kebingungan, Toko B kesusahan menuliskan rumusan negosiasi, dan Sang Raja yang duduk diatas singgasana ciptaan tim mereka sendiri.

Meski melewati rintangan pemahaman yang membingungkan, Toko A dan Toko B berjuang demi memenangkan hati Sang Raja melalui rumusan penawaran mereka. Tentunya, selaras dengan teori negosiasi. Menurut Fisher, Ury, dan Patton (2011), negosiasi yang efektif berasal dari upaya memahami kepentingan yang mendasari posisi tersebut, sehingga dapat ditemukan solusi yang saling menguntungkan.

Ketika ruang diskusi dipenuhi oleh argumen kedua pihak sukses untuk mengidentifikasi masalah dan fokus pada satu kepentingan utama, mencapai keuntungan mutual dengan Sang Raja. Toko A dan Toko B menawarkan solusi untuk membagi beberapa persen margin keuntungan mereka kepada Sang Raja. Namun, atas konsiderasi yang penuh presisi dari tim Sang Raja, Toko A memenangkan perang negosiasi.

Melalui Akademi Demokrasi Perludem, serta simulasi yang tim kami jalankan. Kami melihat terbentuknya pemahaman mengenai negosiasi yang lebih kompleks dari teori saja. Kami melihat bagaimana tiap partisipan fokus ke tujuan utama dengan cara membagi tugas, menciptakan berbagai opsi pilihan, menciptakan rencana kedua ketika rencana pertama mereka gagal, dan bersifat objektif. Tiap pihak memiliki keunggulannya masing-masing. Dan inilah yang

kami rasa, membuat ruang simulasi kami sangat amat hidup dan *'human'*.

Toko A memiliki karakteristik partisipan yang inovatif, seru, dan diwarnai oleh keceriaan. Jika saya harus mendeskripsikan mereka sebagai warna, mereka adalah kuning. Di lain sisi, Toko B lebih serius, tegas, dan cukup terasa ramai. Toko B adalah warna biru. Sang Raja yang bijaksana dan hebat, memiliki karakteristik partisipan yang variatif, ada yang bijaksana, ada yang penuh kalkulasi, dan ada yang terasa seperti pencair suasana. Sang Raja bagai warna ungu.

Bagi saya, Akademi Demokrasi Perludem menjadi museum paling berkesan selama ini. Tiap menyelesaikan satu modul, dan satu simulasi dari tiap tim, terasa seperti ada lukisan baru yang tercipta. Isinya penuh warna dari tiap partisipan yang mengikutinya. Abstrak, unik, dan semuanya tertata rapi di museum ini. Saya bangga dan bersyukur dapat menorehkan warna saya di tiap lukisan yang tercipta, dan dapat menjadi bagian dari Akademi Demokrasi Perludem.

■ **Rania Amira**, Pelajar SMA Budi Mulia.

MENGUJI DEMOKRASI DARI BANGKU SEKOLAH

Oleh: **Valleydhio Rusyda**

Sekolah sebagai institusi pendidikan setidaknya memiliki dua fungsi sosial, yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes sekolah adalah memberikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum pendidikan, sedangkan fungsi latennya adalah membentuk karakter peserta didik, seperti kerja sama, kemandirian, kreativitas, dan kepemimpinan. Kedua fungsi tersebut bertujuan mencetak peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjadi agen sosial yang berkontribusi di masyarakat.

Dalam konteks tersebut, organisasi siswa seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dapat dipandang sebagai laboratorium sosial bagi peserta didik. Melalui organisasi ini, siswa belajar memahami dinamika kepemimpinan, partisipasi, kerja sama, dan pengambilan keputusan. Pengalaman penulis selama berinteraksi dengan OSIS di sekolah Islam terpadu menjadi salah satu contoh bagaimana proses pembelajaran sosial tersebut berlangsung.

Suatu ketika, terdapat seorang siswa yang mendaftarkan diri dalam proses penerimaan anggota baru OSIS. Namun, pada tahap seleksi administrasi, ia dinyatakan tidak lolos karena belum memenuhi salah satu persyaratan, yaitu target kemampuan *tahsin* Al-Qur'an. Sebagai

sekolah Islam terpadu, pendekatan pembelajaran yang digunakan memang menekankan aspek keagamaan. Oleh karena itu, persyaratan keagamaan menjadi bagian dari proses seleksi anggota OSIS.

Meskipun tidak diterima sebagai anggota OSIS, siswa tersebut tetap menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang baik. Ia aktif memimpin berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di sekolah, mulai dari kegiatan ibadah di masjid hingga keterlibatan dalam berbagai acara sekolah. Walaupun tidak memiliki posisi formal dalam organisasi, ia tetap dipercaya dan dihormati oleh teman-temannya.

Seiring berjalannya waktu, dewan guru mulai memperhatikan keaktifannya. Kemudian muncul pertanyaan mengapa siswa yang begitu aktif dan memiliki kemampuan memimpin justru tidak menjadi pengurus OSIS. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa ia sebelumnya gagal dalam proses seleksi karena belum memenuhi target *tahsin* Al-Qur'an yang menjadi salah satu syarat administrasi.

Pada periode berikutnya, siswa tersebut kembali mendaftarkan diri dan berhasil menjadi anggota OSIS. Namun, tantangan lain muncul ketika ia ingin mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS. Berdasarkan aturan yang berlaku, calon Ketua OSIS harus anggota yang telah menjabat sekurang-kurangnya satu tahun. Karena baru bergabung pada periode tersebut, ia tidak dapat mencalonkan diri.

Situasi serupa terjadi ketika ia ingin mengajukan diri sebagai koordinator bidang keagamaan. Kembali, persyaratan masa keanggotaan menjadi penghalang. Padahal, dari sisi kapasitas dan pengalaman, ia memiliki kemampuan yang memadai.

Pengalaman tersebut mengingatkan penulis pada sebuah gambaran

sederhana. Seperti aliran air yang deras namun terhambat oleh batu-batu kecil, potensi besar yang dimiliki seseorang terkadang tertahan oleh aturan yang tidak selalu mempertimbangkan konteks dan kemampuan individu. Pada titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar tentang aturan, melainkan tentang bagaimana aturan tersebut dirancang dan diterapkan.

Setelah mengikuti Akademi Demokrasi yang diselenggarakan Perludem, penulis kembali mengingat pengalaman tersebut. Dari sana muncul sejumlah pertanyaan. Sebagai organisasi yang bertujuan melatih kepemimpinan siswa, apakah persyaratan yang digunakan dalam proses seleksi benar-benar relevan untuk mengukur kapasitas calon pengurus? Apakah kemampuan *tahsin* Al-Qur'an memiliki hubungan langsung dengan kemampuan mengelola organisasi, menyelesaikan masalah, atau memimpin sebuah tim? Selain itu, apakah pengalaman menjabat sebelumnya selalu menjadi ukuran terbaik untuk menentukan kualitas seorang calon pemimpin?

Setidaknya, pengalaman tersebut memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, kepemimpinan tidak selalu lahir dari jabatan formal. Siswa yang tidak memperoleh kesempatan menduduki posisi dalam struktur organisasi tetap mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang dipimpinnya.

Kedua, seseorang tetap dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya meskipun tidak berada dibawah naungan organisasi formal. Kebermanfaatan sosial tidak selalu ditentukan oleh posisi atau jabatan.

Ketiga, aturan yang diterapkan dalam proses seleksi seharusnya memiliki relevansi yang jelas dengan posisi yang akan diduduki. Aturan yang relevan dan proporsional dapat membuka ruang partisipasi yang lebih

luas sekaligus menciptakan organisasi yang lebih inklusif. Demokrasi diuji ketika sebuah institusi menentukan siapa yang diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang sebagai pemimpin.

Sebagai seorang pelajar, penulis meyakini bahwa esensi tertinggi dari ilmu pengetahuan adalah kemampuannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengalaman ini, penulis menyadari bahwa demokrasi tidak hanya hadir dalam pemilihan umum atau ruang-ruang pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sekolah dan organisasi pelajar.

Akademi Demokrasi Perludem menjadi titik balik yang memperluas wawasan penulis tentang demokrasi. Penulis memahami bahwa keterbukaan partisipasi, inklusivitas, dan pengambilan keputusan yang adil merupakan nilai-nilai yang dapat diterapkan mulai dari lingkungan terdekat.

Dalam kegiatan tersebut, penulis juga mempelajari pentingnya advokasi kebijakan. Robert Dahl dalam bukunya *On Democracy* (1998) menyatakan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila warga memiliki kesempatan nyata untuk berpartisipasi, menyampaikan pandangan, dan mempengaruhi arah kebijakan publik. Gagasan ini semakin menguatkan keyakinan penulis bahwa setiap orang perlu diberi ruang untuk berkontribusi dalam menentukan arah bersama.

Berdasarkan refleksi tersebut, penulis menawarkan beberapa gagasan perbaikan.

Pertama, proses seleksi kepengurusan organisasi sebaiknya lebih menitikberatkan pada kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi, seperti kemampuan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, dan pemecahan masalah.

Kedua, organisasi perlu membuka ruang yang lebih fleksibel bagi calon pemimpin potensial. Pengalaman organisasi memang penting, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya syarat untuk menduduki posisi kepemimpinan. Rekam jejak, kapasitas, dan kemampuan memimpin juga perlu menjadi pertimbangan utama.

Ketiga, setiap aturan perlu dievaluasi secara berkala. Demokrasi bukan berarti menghapus seluruh aturan yang ada, melainkan memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dengan tujuan pembinaan dan perkembangan kebutuhan peserta didik.

Melalui langkah-langkah tersebut, penulis berharap nilai-nilai demokrasi yang dipelajari tidak berhenti sebagai teori, tetapi dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi ruang yang lebih terbuka untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Terakhir, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada Perludem yang telah menyelenggarakan Akademi Demokrasi. Kegiatan ini memberikan pengalaman berharga sekaligus membuka wawasan baru tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis berharap semakin banyak generasi muda yang peduli terhadap isu-isu demokrasi dan turut mengawal perkembangannya. Sebab, sebagai penerus bangsa, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, berkarya, dan berpartisipasi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Demokrasi dapat dimulai dari ruang-ruang kecil di sekitar kita sebelum menjangkau ruang yang lebih besar.

■ **Valleydhio Rusyda**, Pelajar SMAN 2 Kota Bogor.



AKADEMI DEMOKRASI MAHASISWA





KETIKA 30 PERSEN HANYA ANGKA: PEREMPUAN DI RUANG PENGAWASAN PEMILU

Oleh: **Agssel Jesisca**

Kita sering sekali terjebak dalam obrolan besar soal pemilu yang harus “luber jurdil”. Fokus kita biasanya habis untuk bicara teknis seperti bagaimana transparansi penghitungan suara, bagaimana netralitas aparat, sampai betapa canggihnya aplikasi Sirekap. Tapi, masih ada satu sudut gelap yang jarang sekali dibicarakan di ruang publik, yaitu soal integritas ‘rumah’ penyelenggara pemilu.

Bagaimana kita bisa percaya pada demokrasi jika di dalamnya masih terselip budaya patriarki yang begitu mengakar? Apalagi saat kita turun langsung ke lapangan, ke kantor-kantor pengawas pemilu, kalau angka 30 persen keterwakilan perempuan sering kali terasa cuma jadi tempelan di atas kertas. Banyak perempuan yang ada di sana, tapi suara dan martabat perempuan masih sering kali dianggap tidak ada.

Integritas itu bukan cuma soal berani menolak amplop suap atau menjaga jarak dari kandidat. Integritas itu lebih luas lagi. Bagaimana mungkin sebuah lembaga berani mengawal marwah demokrasi bangsa ini jika di internalnya sendiri, rasa aman bagi stafnya saja tidak bisa dijamin? Saya paham, lembaga penyelenggara pemilu punya beban kerja yang sangat berat. Tapi, struktur hierarkis yang kaku sering kali

membuat relasi kuasa jadi semena-mena. Di dalam nya terdapat sistem kerja dan budaya senioritas yang seringkali disalahgunakan. Posisi sering di agung-agungkan dan dijadikan tameng untuk berlandung saat mereka melakukan tindakan yang tidak etis. Kasus-kasus kekerasan yang sesekali mencuat ke permukaan itu sebenarnya hanyalah puncak gunung es dari apa yang terjadi sehari-hari di tempat yang seharusnya jadi teladan integritas ini.

Bagi saya, bicara demokrasi juga bicara soal hak perempuan. Tidak akan pernah ada demokrasi yang sehat kalau di dalamnya tidak ada ruang aman bagi perempuan. Banyak teman-teman perempuan yang masuk ke dunia pengawasan pemilu dengan idealisme yang meluap-luap. Tapi yang mereka temui justru lingkungan kerja yang mengobjektifikasi perempuan. Saat kita berani bersuara soal pelecehan, jawabannya selalu sama dan menyakitkan: *"Jaga nama baik lembaga"*, *"Jangan baperan"*, atau yang paling sering, *"Itu kan cuma bercanda"*.

Perlu kita sadari bersama, ini bukan soal kelakuan satu-dua oknum, ini adalah masalah sistemik. Patriarki sudah mengakar begitu dalam di sana, dan itu membuat partisipasi perempuan terus-menerus ditekan. Bagaimana kita mau lantang bicara demokrasi yang inklusif kalau 'rumah' penyelenggaranya saja jadi tempat yang penuh ancaman bagi perempuan?

Menjaga demokrasi harus dimulai dari memanusiakan orang-orang di dalamnya. Lembaga penyelenggara pemilu tidak cukup hanya bermodal pakta integritas di atas kertas. Pakta itu harusnya bukan cuma soal teknis pemilu, tapi komitmen nyata untuk menciptakan etika kerja yang bebas dari kekerasan seksual dan diskriminasi. Menurut saya perlu adanya pemahaman soal relasi kuasa yang setara.

Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang di TPS, tapi juga

tentang partisipasi yang setara tanpa rasa takut. Kalau partisipasi itu diracuni oleh budaya kekerasan, maka demokrasi kita bisa dikatakan sudah sakit dari akarnya. Angka 30 persen tidak akan ada artinya jika perempuan hanya jadi pajangan keterwakilan, sementara martabatnya diinjak-injak di balik pintu tertutup dan dibiarkan.

Kita butuh lebih dari sekadar kuota, kita butuh ruang aman. Kita perlu diakui sebagai aktor demokrasi yang berhak bekerja dengan kepala tegak.

Kita juga harus berani melawan narasi *“Jaga nama baik lembaga”* yang selalu dipakai untuk membungkam para penyintas. Dalam sistem kerja yang patriarkis ini, nama baik sering kali dianggap lebih suci daripada kebenaran itu sendiri. Padahal, integritas lembaga justru diukur dari keberaniannya untuk ‘membersihkan’ diri sendiri. Menutup-nutupi kasus kekerasan atas nama stabilitas adalah pengkhianatan terbesar pada demokrasi dan juga tubuh perempuan. Lembaga yang membungkam korban sebenarnya sudah kehilangan legitimasi moral di mata rakyat.

Dampaknya? tentu sangat sistemik. Kita menciptakan generasi staf perempuan yang ‘terdidik’ untuk diam dan menerima keadaan. Kita belajar bahwa karir di dunia pemilu harus dibayar dengan kemampuan untuk menoleransi pelecehan. Ini trauma yang sangat terstruktur bagi para penyintas. Banyak teman-teman hebat yang akhirnya memilih keluar, karena tidak tahan dengan lingkungan yang *toxic* demi hidup yang lebih aman dan damai. Akhirnya, sistem ini hanya menyisakan mereka yang mampu beradaptasi dengan budaya patriarki dan tidak setara.

Lingkaran setan ini harus diputus. Kita tidak hanya kehilangan individu berbakat, tapi juga membiarkan pola kekuasaan yang opresif terus berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya.

Advokasi untuk ruang aman ini harus jadi agenda prioritas. Kita butuh

kontrol eksternal yang lebih tegas. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus lebih tajam melihat kasus kekerasan berbasis gender, bukan hanya sibuk dengan urusan teknis kepemiluan. Harus ada pendampingan hukum dan psikologis yang nyata bagi para penyintas. Ini bukan pembangkangan pada lembaga, ini justru upaya penyelamatan agar lembaga itu tetap punya nilai kemanusiaan.

Perjuangan kita bukan sekadar meminta hak untuk bekerja, tapi menuntut agar ruang-ruang politik jadi tempat dimana martabat manusia ditempatkan di atas kepentingan politik apa pun. Jika patriarki masih tumbuh subur di rumah pemilu, jangan heran jika kedepannya pemilu kita hanya jadi prosedur kosong tanpa keadilan. Jika kita ingin pemilu yang bersih, kita harus melawan impunitas. Tanpa itu, demokrasi hanyalah topeng semata.

■ **Agسل Jesisca**, Mahasiswa Universitas Pamulang, Tangerang.

REFLEKSI PEMILIH PEMULA MELAWAN POLITIK FOMO PADA PEMILU 2024

Oleh: **Ajrina Widia Ghaisani**

Tahun 2024 menandai sebuah fase yang cukup krusial dalam perjalanan kedewasaan saya sebagai warga negara: kesempatan pertama untuk memberikan hak suara dalam pemilu. Sebagai seorang pemilih pemula yang lahir dan tumbuh di era digital, saya menyadari bahwa Pemilu 2024 terasa sangat berbeda. Ada ekspektasi besar yang dibebankan pada pundak generasi muda, mengingat persentase pemilih pemilih pemula dan milenial mendominasi daftar pemilih tetap (DPT).

Namun, realita yang saya temui di lapangan, khususnya di ruang-ruang digital, justru menghadirkan sebuah paradoks yang menggelisahkan. Di tengah gempuran informasi, media sosial menjelma menjadi arena kampanye yang lebih banyak mengedepankan gimmick politik, joget viral, dan trend *Fear of Missing Out* (FOMO) dibandingkan adu gagasan yang substantif. Menyikapi fenomena ini, saya memutuskan untuk mengambil langkah mundur sejenak, menolak larut dalam keriuhan yang dangkal, dan berusaha menjadi pemilih yang kritis.

Menolak arus FOMO bukanlah perkara yang mudah, terlebih di tengah tekanan sosial dari lingkaran pertemanan. Algoritma media sosial

terus-menerus menyuapi kita dengan konten-konten yang memancing sisi emosional. Salah satu fenomena yang paling masif pada Pemilu 2024 adalah glorifikasi istilah “gemoy” pada salah satu paslon. Narasi “gemoy” yang lucu dan menghibur ini sukses mendominasi ruang digital, menggeser diskursus politik yang seharusnya dipenuhi adu gagasan menjadi sekadar tren visual yang *catchy* (Muhammad Haqiqi et al., 2024).

Namun, ketika saya mematikan layar ponsel dan melihat realita di sekeliling saya, narasi viral tersebut terasa sangat berjarak.

Saya melihat wajah-wajah pekerja keras di jalanan, pedagang kecil yang berjuang mempertahankan usahanya di tengah fluktuasi harga bahan pokok, hingga masyarakat di pelosok yang masih berkutat dengan masalah kesejahteraan dasar. Realita ini menyadarkan saya bahwa gimmick politik “gemoy” berpotensi menjadi bentuk depolitisasi yang menutupi ketiadaan gagasan substantif. Seperti yang disoroti oleh berbagai kajian komunikasi politik, pendekatan yang mengedepankan sentuhan emosional dan hiburan seringkali digunakan sebagai strategi untuk menutupi rekam jejak yang kelam atau kelemahan program kerja (Influence et al., 2025). Gimmick yang menghibur tidak akan pernah bisa menurunkan harga beras atau menyelesaikan persoalan struktural yang dihadapi masyarakat kelas bawah.

Kesadaran inilah yang kemudian membentuk etika politik saya secara personal. Saya meyakini bahwa suara saya terlalu berharga jika hanya digadaikan demi mengikuti tren sesaat. Saya mulai mengubah pola konsumsi informasi politik. Alih-alih menghabiskan waktu menonton potongan video kampanye berdurasi lima belas detik, saya memaksa diri untuk membaca dokumen visi-misi para kandidat dan menelusuri rekam jejak mereka, termasuk pelanggaran etik yang mendahului pencalonan.

Sikap kritis ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat rentetan kontroversi menjelang Pemilu 2024, puncaknya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang

mengubah syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden ini tidak hanya memicu perdebatan hukum, tetapi juga melahirkan skandal pelanggaran etik berat. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara gamblang menyatakan bahwa Ketua MK saat itu, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena adanya konflik kepentingan yang nyata.

Bagi saya, mengabaikan fakta bahwa sebuah pencalonan lahir dari rahim pelanggaran konstitusi demi sebuah tren joget di media sosial adalah bentuk pengkhianatan terhadap akal sehat dan etika demokrasi. Menjadi pemilih kritis berarti memiliki keberanian untuk menolak menormalisasi pelanggaran etik, sepopuler apa pun kandidat tersebut dikemas.

Puncak dari refleksi ini terjadi pada tanggal 14 Februari 2024. Pagi itu, saya melangkah ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungan tempat tinggal saya dengan perasaan campur aduk ada rasa gugup, bangga, sekaligus beban tanggung jawab. Saat menerima lima lembar surat suara yang lebar untuk pertama kalinya, saya merasakan secara langsung beratnya mandat demokrasi yang ada di tangan rakyat. Namun, ada satu hal yang paling membekas dalam ingatan saya hari itu: pemandangan di sekitar TPS.

Di TPS, saya tidak melihat adanya *buzzer* yang saling menjatuhkan atau manipulasi hukum seperti yang terjadi di tingkat elite. Yang saya lihat adalah tetangga-tetangga saya, warga biasa dari berbagai latar belakang profesi, yang rela bangun sejak subuh, bergotong royong mendirikan tenda, dan bekerja keras sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka bekerja dengan penuh dedikasi, mengawal setiap lembar suara, memastikan transparansi penghitungan hingga larut malam. Di sinilah saya menemukan bentuk paling murni dari demokrasi akar rumput. Demokrasi yang sehat ternyata tidak hidup dari gimmick

toksik di dunia maya atau di ruang sidang yang dipenuhi konflik kepentingan, melainkan dari etika politik warga yang bersedia saling menjaga, bermusyawarah, dan menghormati proses yang jujur di dunia nyata.

Pengalaman dari bilik suara dan observasi di TPS tersebut memberikan sebuah pelajaran berharga yang sejalan dengan materi yang saya dapatkan di Akademi Demokrasi. Bahwa pada hakikatnya, kewajiban warga negara tidak berhenti setelah kita mencelupkan jari ke dalam tinta ungu. Partisipasi elektoral hanyalah gerbang pembuka. Tantangan yang jauh lebih besar adalah bagaimana kita mewujudkan partisipasi aktif pasca-pemilu. Jika kita menuntut para pemimpin untuk menepati janji politiknya dan mematuhi etika bernegara, maka kita sebagai pemilih juga harus siap mengawal jalannya roda pemerintahan.

Bagi saya, partisipasi aktif di kehidupan sehari-hari bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mengawal transparansi dana di tingkat kelurahan, membangun ruang diskusi yang memprioritaskan substansi ketimbang gimmick di grup keluarga, hingga tidak membiarkan institusi negara diobok-obok demi kepentingan keluarga tertentu. Kita harus memastikan bahwa isu-isu penting seperti keadilan sosial dan penegakan supremasi hukum tetap menjadi agenda utama yang diawasi, bukan dilupakan setelah masa kampanye usai.

Sebagai penutup, Pemilu 2024 telah memberikan ruang refleksi yang sangat dalam, bagi saya sebagai seorang pemilih pemula. Menghadapi hiruk-pikuk kampanye digital dan ironi hukum di tingkat elite mengajarkan saya untuk memiliki jangkar etika politik yang kuat agar tidak mudah terseret arus FOMO. Demokrasi yang substansial tidak

akan pernah lahir dari masyarakat yang menormalisasi pelanggaran etik karena terbuai oleh gimmick gemoy. Demokrasi hanya bisa tumbuh dan berdampak nyata jika ia dirawat oleh pemilih-pemilih yang teguh pada prinsip di bilik suara, dan terus dijaga melalui partisipasi aktif dan pengawasan warganya dalam kehidupan sehari-hari.

■ **Ajrina Wildia**, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Universitas Pendidikan Indonesia.

PARPOL SATIRE: EKSPRESI BARU DARI PARTISIPASI POLITIK

Oleh: **Bazli Banin Danisha Falah**

Pada bulan Mei lalu, sebuah “partai” di India masuk berita karena simbol dan pernyataannya yang sengaja menarik perhatian. Dinamakan “Cockroach Janata Party” (CJP) atau “Partai Rakyat Kecoak”, mereka memelintirkan nama partai yang sedang berkuasa untuk mewakili segmen penduduk yang abai dari politik saat ini, dengan syarat keanggotaannya berupa orang yang “menganggur, malas, sering menghabiskan waktu di internet dan mampu untuk mengeluh secara profesional.”

Partai CJP lahir atas fenomena media sosial yang menanggapi komentar hakim Mahkamah Agung saat membandingkan kaum muda pengangguran dengan kecoak, yang menyerang sistem kenegaraan. Mereka membawa manifesto yang berisi representasi perempuan di politik, reformasi yudisial dan media, beserta petisi untuk memberhentikan Menteri Pendidikan atas pembocoran soal ujian nasional.

Selain sekadar tren di media sosial, kecoak menjadi suatu simbol dari kalangan generasi Z di India yang tidak berhasil mendapatkan pendidikan yang bagus dan pekerjaan yang layak. Mereka rela mencap dirinya sebagai “parasit” yang malas dan tidak produktif karena bagi mereka, masalah pengangguran tidak bisa diabaikan atau dibasmi begitu saja oleh pemerintah, tetapi perlu diakomodasi melalui

penciptaan pelatihan dan lapangan kerja yang meritokratis.

Meski berlingkungan di balik alat parodi, mereka menyampaikan pesan bahwa kaum muda yang bersatu dapat menjadi kekuatan politik yang dapat menandingi elite.

Sebelum ini, sudah terdapat banyak partai politik dengan beragam kesuksesan yang menjadikan satire sebagai inti dari identitas dan strateginya, terutama di Eropa. *Official Monster Raving Loony Party* (Partai Resmi Monster Gila yang Mengamuk) di Inggris merupakan kelanjutan dari *National Teenage Party* (Partai Remaja Nasional) yang berhasil mengkampanyekan penurunan syarat usia pemilih menjadi 18 tahun, dengan alasan, “Remaja perlu dapat memilih jika politisi bertindak seperti remaja.” Sejak terbentuknya partai pada 1982, bahkan kebijakan “gila” mereka seperti paspor untuk hewan peliharaan telah diadopsi.

Kemudian Die PARTEI, partai politik satir asal Jerman dibentuk di 2004 untuk menyindir usaha para politisi dalam mengakomodasi sebanyak mungkin kelompok melalui kepanjangannya yaitu “*Partai Buruh, Supremasi Hukum, Perlindungan Hewan, Promosi Elite, dan Inisiatif Demokrasi Akar Rumput*,” dan mereka kini memiliki dua kursi di Parlemen Eropa. Terakhir, Partai Bir di Austria dibentuk tahun 2015 dan menjanjikan bir gratis bagi setiap rumah tangga, sekaligus menyindir bahwa “cerita mabuk” dari partai populis kanan di pemerintah sebaiknya dilakukan oleh “profesional” seperti mereka, pada Pilpres 2022, pemimpin mereka berhasil meraih peringkat ketiga.

Apa yang membuat CJP berbeda dari partai satire sebelumnya adalah mereka bukan kasus terisolasi, melainkan bagian dari fenomena gerakan

generasi Z pasca-pandemi yang melindas berbagai negara berkembang di Asia dan Afrika dengan tema yang serupa seputar pengangguran, korupsi, dan sikap elitis dari politisi. Para demonstran muda berhasil memicu mundurnya perdana menteri di Bangladesh pada Agustus 2024, dan presiden di Madagaskar pada Oktober 2025. Partai-partai baru di luar kelompok pemerintah maupun oposisi yang sudah ada berhasil memenangkan pemilu di Sri Lanka pada September 2024 dan di Nepal pada Maret 2026, setelah adanya “demonstrasi generasi Z” tersebut. Namun, untuk negara besar federal seperti India, kesuksesan serupa jauh lebih sulit untuk dicapai. Untuk sekarang, CJP lebih bertindak sebagai kelompok penekan dan *agenda-setter*, alih-alih partai yang mencari kekuasaan konkret.

Tetap saja, penggunaan satire sebagai sarana penyampaian pesan politik telah menarik perhatian dari beberapa akademisi ilmu politik, khususnya dampaknya terhadap legitimasi dan partisipasi demokrasi. Boukes & Hameleers (2020) menyoroti bahwa kritik berbentuk satire dapat menembus *echo chamber* dan kepercayaan teguh untuk menunjukkan inkonsistensi dalam retorika politisi populis.

Sedangkan Holbert (2013) cenderung lebih kontekstual dan mengatakan satire dapat bersifat sinis terhadap institusi demokrasi secara keseluruhan, tetapi bisa mendukung pemikiran reflektif dan kritis. Satire baginya paling efektif ketika menekankan informasi untuk tindakan nyata, isu-isu penting yang diabaikan oleh elite politik, serta mengungkapkan kesombongan elite tersebut.

Sementara Baumgartner & Lockerbie (2018) menunjuk pada acara televisi satire politik yang umum di Amerika Serikat dalam potensinya untuk memobilisasi masyarakat sesuai pandangannya. Maka, penggunaan

humor dalam satire dapat lebih efektif dalam menyerang targetnya ketika tidak menyebutkan kelemahannya secara langsung dan memicu audiensi untuk berpikir lebih dalam.

Salah satu kritik terhadap satire adalah kerawannya untuk salah dianggap sebagai fakta, terutama terkait kejadian dan individu atau kelompok nyata. Dalam konteks ini, keampuhan strategi pesan CJP terletak pada menjadikan dirinya dan basis pendukungnya sebagai objek cemooh secara tersurat, tetapi secara tersirat menjadi refleksi terhadap kondisi kehidupan bernegara di India dan sikap abai dari elite politik, sehingga penafsiran secara harfiah pun akan sulit mengubahnya menjadi misinformasi.

Selain itu, meskipun CJP tidak memiliki struktur atau hierarki layaknya partai politik yang semestinya, CJP turut menjalankan salah satu fungsi partai politik seperti dirincikan oleh Budiardjo (2008), yakni sarana komunikasi politik, dengan mengagregasikan aspirasi warga muda pengangguran, dan sebaliknya, juga menginformasikan perkembangan kebijakan yang relevan bagi mereka. Jika dikelola dengan benar, CJP juga dapat berpotensi untuk menjalankan rekrutmen politik yang mengubah jutaan anak muda tanpa ideologi jelas menjadi agen perubahan dengan kepercayaan yang ditanam atas kepentingan mereka.

Semacam “partai anti-partai” ini juga relevan ketika berbicara tentang Indonesia. Marcus Mietzner (2019) mengobservasi bahwa intervensi dari aparat negara untuk meningkatkan tingkat partisipasi, sementara persyaratan pendaftaran dan perolehan kursi bagi partai dipersulit, berarti bahwa tidak ada jalan bagi mereka yang tidak puas terhadap

sistem politik selain turun ke jalan, terutama ormas Muslim konservatif. Masalah seperti pengangguran dan pernyataan yang merendahkan dari pejabat negara yang memicu terbentuknya CJP juga muncul di Indonesia, dan terus menjadi motivasi demonstrasi terus-terusan antara tahun 2025 dan 2026.

Tagar seperti #kaburajadulu menjadi simbol penting dari sentimen pesimisme dan ketidakpuasan terhadap kehidupan anak muda yang akan atau baru saja lulus pendidikan. Namun, operasi untuk memecah belah dari aparatus negara selama ini telah cukup dalam menyandingkan kelompok demonstran dengan para konservatif Muslim tersebut dan “membingungkan” arah gerakan. Selain itu, demonstrasi di ruang nyata sering dikaitkan dengan mahasiswa atau ormas secara sempit, sehingga orang terdampak pengangguran, yang secara luas lebih acuh tak acuh terhadap politik, dikesampingkan dari sarana partisipasi demokratis ini.

Secara keseluruhan, partai dan kelompok satire dapat menjangkau segmen masyarakat yang tidak tertarik terhadap politik dengan membercandai keprihatinan mereka sendiri, sekaligus merumuskan tujuan dan rencana aksi yang konsisten dan akomodatif antar golongan. Kesamaan antara India dan Indonesia juga datang dari reaksi pemerintah dalam mengaitkan gerakan penentangan kepada antek-antek asing dari negara tetangga dan George Soros.

Saya sarankan gerakan satire dapat menyindir sesama kaum anak muda sebagai asing terhadap pemerintah dan sebaliknya.

■ **Bazli Banin Danisha Falah**, Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI).

BARAK MILITER BUKAN SOLUSI KENAKALAN REMAJA

Oleh: **Dhika Saputra**

Kebijakan pengiriman siswa atau remaja yang dianggap bermasalah ke barak militer yang digagas dan diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat atau Kang Dedi Mulyadi ini menimbulkan perdebatan yang luas, bahkan hingga lingkup pengamat nasional ikut berbicara tentang ini di ruang publik. Kebijakan ini menilai bahwa pembinaan berbasis disiplin militer mampu membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, dan mengurangi perilaku menyimpang remaja.

Namun, dari sudut pandang lain, pendekatan tersebut menunjukkan kecenderungan militerisasi terhadap persoalan sosial, dengan menjadikan institusi militer sebagai instrumen utama menyelesaikan masalah kenakalan remaja yang sejatinya merupakan persoalan pendidikan, keluarga, dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini dikhawatirkan menggeser fungsi pendidikan yang bersifat humanis menjadi pembinaan yang lebih menekankan kepatuhan dan disiplin melalui pola komando, sehingga kurang menyentuh akar persoalan yang menyebabkan remaja terlibat dalam perilaku menyimpang.

Dari aspek hukum kebijakan, hal tersebut berpotensi bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, pasal 28b ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun

1945, yang menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua, dalam UU Nomor 35 tahun 2014, perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 54, yang mengamanatkan bahwa anak di lingkungan pendidikan harus memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Kemudian, ketiga, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh melalui pendekatan edukatif, bukan pendekatan koersif. Apabila pembinaan lebih menonjolkan pola militer dibandingkan pendampingan psikologis dan sosial, maka terdapat risiko terjadinya penyimpangan dari prinsip perlindungan hak anak dan tujuan pendidikan nasional.

Kontroversi terhadap kebijakan ini semakin menguat pada Mei 2025, sejumlah orang tua siswa bersama aktivis perlindungan anak melaporkan program pengiriman siswa ke barat militer kepada komisi Nasional hak asasi manusia (Komnas HAM). Laporan tersebut muncul karena terdapat kekhawatiran bahwa pelaksanaan program dilakukan tanpa pedoman hukum yang jelas, belum memiliki standar operasional yang baku, serta belum sepenuhnya melibatkan persetujuan orang tua secara bebas dan sadar (*informed consent*).

Beberapa keluarga juga mengaku khawatir melihat anak mereka akan mengalami tekanan psikologis akibat lingkungan pembinaan yang identik dengan budaya komando dan kedisiplinan militer. Menurut pelapor, persoalan kenakalan remaja seharusnya diselesaikan melalui

mekanisme pendidikan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan keluarga, bukan dengan pendekatan yang menyerupai pendidikan semi militer.

Menanggapi laporan tersebut, Komnas HAM menyatakan akan melakukan pemantauan dan meminta pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta perlindungan anak. Fakta ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan tidak hanya dirasakan oleh peserta program, tetapi juga oleh orang tua yang merasa kehilangan ruang untuk menentukan bentuk pembinaan terbaik bagi anaknya.

Di sisi lain, kontroversi tersebut mencerminkan adanya ketidaksepahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai batas kewenangan negara dalam melakukan intervensi terhadap pendidikan karakter remaja. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa suatu kebijakan yang bertujuan baik tetap harus memiliki legitimasi hukum, transparansi, serta akuntabilitas agar memperoleh kepercayaan publik.

Jika ditinjau dari perspektif sosiologi dan pengembangan masyarakat kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan kedisiplinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang remaja dipengaruhi oleh faktor keluarga yang tidak harmonis, kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, pergaulan bebas, penyalahgunaan media digital, hingga minimnya akses terhadap layanan kesehatan mental.

Dalam konteks tersebut, penggunaan barang militer berpotensi menyederhanakan persoalan menjadi sekadar masalah kurang disiplin,

padahal akar masalahnya jauh lebih luas. Pendekatan militer memang mampu menciptakan kepatuhan selama masa pelatihan, tetapi belum terdapat bukti yang kuat bahwa metode tersebut mampu menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan setelah remaja kembali ke lingkungan asalnya.

Sebaliknya, pendekatan berbasis masyarakat yang melibatkan keluarga, sekolah, pekerja sosial, psikolog, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah dinilai lebih mampu membangun perubahan karakter secara bertahap. Model pembinaan seperti konseling psikologis, pendidikan karakter, pelatihan keterampilan hidup, kegiatan kepemudaan, serta pemberdayaan keluarga telah banyak direkomendasikan dalam berbagai kajian karena mampu memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan ketahanan remaja terhadap pengaruh negatif lingkungan.

Oleh sebab itu, penyelesaian kenakalan remaja seharusnya lebih menekankan pada pendekatan preventif, rehabilitatif, dan partisipatif daripada pendekatan yang bercorak represif atau militeristik. Kerjakan publik yang baik bukan hanya menghasilkan kedisiplinan tetapi juga mampu menciptakan rasa aman, penghormatan terhadap hak anak, dan perubahan perilaku yang berlangsung secara berkelanjutan.

Kebijakan barak militer bagi remaja di Jawa Barat menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan menciptakan kedisiplinan dan kewajiban negara melindungi hak anak. Meskipun tujuan kebijakan tersebut adalah menekan angka kenakalan remaja, pendekatan militerisasi terhadap persoalan sosial berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan anak, supremasi pendidikan sipil, dan pembuangan karakter yang berorientasi pada hak asasi manusia.

Pemerintah daerah seharusnya mengedepankan kebijakan yang berbasis bukti (evidence base policy), memperkuat layanan konseling, pendidikan karakter, pemberdayaan keluarga dan rehabilitasi sosial sehingga penanganan kenakalan remaja tidak hanya menghasilkan kepatuhan sesaat, tetapi juga perubahan perilaku yang berkelanjutan.

■ **Dhika Saputra**, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta).

ALARM MERAH INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Oleh: **Fakhira Khairunnisa**

Sejak masa reformasi, indeks demokrasi Indonesia (IDI) cenderung mengalami pasang surut, seiring berkembangnya kebebasan sipil dan partisipasi politik masyarakat. Menurut *Economist Intelligence Unit* pada tahun 2024 lalu indeks demokrasi Indonesia berada pada angka 6,44 dari 10, atau terjadi penurunan sebesar 0,09% dari tahun 2023 di angka 6,53. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan indeks demokrasi Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2025 lalu juga mengalami penurunan di angka 78,19 dari tahun sebelumnya 79,81. Lantas, mengapa hal ini menjadi penting?

Indeks demokrasi Indonesia (IDI) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI secara singkat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi telah dijalankan di Indonesia. IDI diukur berdasarkan tiga komponen utama, pertama, kebebasan sipil (*civil liberty*) yang mencakup kebebasan berpendapat, berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, hak-hak politik (*political rights*) yang meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilu, keterlibatan perempuan, dan kebebasan politik. Ketiga, Lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*) yang bertujuan menilai kinerja lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan partai politik serta pengaruh media massa dalam sistem demokrasi.

Indeks demokrasi Indonesia merupakan tolak ukur untuk melihat apakah demokrasi di Indonesia telah dijalankan dengan benar. Hal ini menjadi penting karena demokrasi membentuk kehidupan sehari-hari kita, dimulai dari cara kita menyampaikan pendapat hingga cara pemerintah merespons pendapat tersebut. Penurunan terhadap IDI menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan data *Economist Intelligence Unit* di atas, indeks demokrasi Indonesia Indonesia tergolong kedalam demokrasi yang cacat (*flawed democracy*). Penurunan ini diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya terkait berbagai permasalahan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024. Selain itu praktik-praktik politik yang lebih mementingkan sebagian kelompok tertentu dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan IDI, yang akhirnya juga berpengaruh pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik.

Partai politik politik seharusnya menjadi jembatan untuk penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Namun, apabila partai politik hanya ada untuk memastikan agenda partainya masing-masing tentunya masyarakat akan merasa kehilangan salah satu aktor demokrasi yang seharusnya mengangkat aspirasinya di pemerintahan. Selain permasalahan pada partai politik dan pemilu, pendidikan politik masyarakat dapat mempengaruhi Indeks demokrasi, karena semakin masyarakat memahami terkait pengaruh politik dalam kehidupannya, maka masyarakat akan semakin teliti dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Penurunan indeks demokrasi Indonesia ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mulai mengalami otoritarianisme, apabila skor ini terus menurun maka Indonesia bisa saja berubah kategori menjadi negara *hybrid*, dimana pemerintahan sipil bercampur dengan militer. Perubahan dari negara demokrasi menjadi otoriter tentunya sangat berbahaya bagi Indonesia. Apabila akhirnya pemerosotan terus terjadi, maka Indonesia akan kembali mengulang sejarah dan merusak seluruh upaya yang diperjuangkan untuk reformasi.

Dari data sebelumnya kita tidak hanya dapat melihat akibat dari penurunan demokrasi di atas kertas. Namun, saat ini masyarakat juga telah merasakan akibat dari rusaknya demokrasi. Misalnya, pemerintahan yang tidak peka pada masyarakat melalui berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, kemudian represi terhadap media massa dan seterusnya, dan sebagainya.

Dalam berdemokrasi, setiap kebijakan pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebutuhan dan pendapat dari masyarakat, tidak hanya kepentingan dan kebutuhan kelompok tertentu, karena nantinya kebijakan itu akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Setidaknya ada beberapa masalah-masalah yang dapat ditimbulkan apabila Indonesia terus mengalami penurunan dalam penerapan demokrasi, dan tentunya sangat mengkhawatirkan. Namun masih terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Misalnya, dengan meningkatkan kualitas pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam pemilu di tahun 2024 lalu harus menjadi salah satu poin utama agar negara ini dapat berbenah diri, karena pemilu yang transparan dan akuntabel seharusnya menjadi pondasi utama agar negara dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada.

Kemudian memastikan peran dan fungsi partai politik dan lembaga legislatif berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, partai politik selaku jembatan aspirasi masyarakat di pemerintahan seharusnya lebih berfokus pada kepentingan publik dan bukan hanya kepentingan partainya semata. Selain itu, terkait lembaga legislatif yang tidak hanya berwenang dalam membentuk aturan tetapi, juga sebagai pengawas dan rem bagi pemerintahan juga memerlukan perbaikan dalam menjalankan fungsinya. Ini diperlukan agar dalam pelaksanaan pemerintahan terbentuk *check and balances* yang berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, dengan mendorong keterbukaan informasi publik dan partisipasi warga. Selain keterbukaan akses terhadap data yang disediakan pemerintah, tentunya kebebasan pers juga diperlukan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang transparan dan akurat terkait setiap tindakan dan kebijakan pemerintah. Tak kalah penting juga, memperkuat pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Dan terakhir, memastikan supremasi hukum tanpa diskriminasi. Sebab, penegakan supremasi hukum merupakan salah satu jaminan untuk menjaga keamanan hak warga negara, salah satunya kebebasan sipil. Hal itu juga sebagai pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Pada akhirnya, masih banyak hal yang perlu dibenahi baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk perbaikan demokrasi. Meskipun kalimat ini sering sekali muncul, tetapi kita terus berusaha untuk optimis, agar seluruh upaya tersebut tidak menjadi angan-angan belaka. Sebagai masyarakat kita harus terus menyampaikan aspirasi dan terus mengawasi setiap kebijakan pemerintah, karena masyarakat juga berhak untuk turut serta dalam jalannya pemerintahan.

■ **Fakhira Khairunnisa**, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

DEMOKRASI DI BAWAH BAYANG-BAYANG KECERDASAN BUATAN

Oleh: **Fakhriyah Khoirun Nisa**

Ruang digital kini dipenuhi gelombang kecerdasan buatan (AI) yang berkembang begitu pesat. Akibatnya, batas antara hiburan, informasi, dan manipulasi semakin kabur. Kita sedang memasuki lanskap baru ketika realitas digital diproduksi secara massal oleh algoritma. Dalam situasi ini, pemilih tidak lagi sekadar menerima informasi politik secara pasif, tetapi terus-menerus dibentuk oleh sistem yang mengatur apa yang mereka lihat, dengar, dan percayai.

Di era digital, AI bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan ikut menentukan arah percakapan publik. Politik sering kali lebih diukur dari tingkat viralitas konten dibandingkan kualitas gagasan yang ditawarkan. Akibatnya, ruang publik lebih banyak dipenuhi emosi, sensasi, dan hiburan daripada diskusi yang rasional mengenai kebijakan.

Fenomena tersebut tampak dari viralnya lagu *"MBG Mas Bahlil Ganteng"* di media sosial. Pakar komunikasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan, menilai fenomena ini menunjukkan bagaimana satire politik dengan cepat berubah menjadi komoditas digital. Kritik yang semula bertujuan menyampaikan pesan politik akhirnya lebih

banyak dikonsumsi sebagai hiburan. Ketika hal itu terjadi, substansi kritik memudar dan perhatian publik bergeser dari persoalan kebijakan menuju sekadar perebutan perhatian.

Manipulasi juga muncul melalui penggunaan teknologi untuk membangun kembali narasi sejarah. Kampanye yang menampilkan wajah dan suara mendiang Presiden Soeharto, misalnya, memperlihatkan bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan romantisme masa lalu. Alih-alih menghadirkan sejarah secara utuh, teknologi justru menyederhanakan fakta yang kompleks menjadi narasi yang mudah diterima algoritma. Strategi seperti ini berpotensi memengaruhi pemilihan muda yang belum memiliki pengalaman maupun ingatan kolektif mengenai periode tersebut.

Hal serupa terlihat pada kampanye Prabowo-Gibran yang banyak memanfaatkan visual bergaya kartun, maskot digital, dan citra hasil kecerdasan buatan. Bagi sebagian masyarakat, pendekatan ini mungkin hanya dianggap sebagai strategi pemasaran politik yang kreatif. Namun, bagi masyarakat yang memiliki literasi politik dan literasi digital rendah, banjir visual tersebut dapat memengaruhi cara mereka memandang kandidat. Perlahan, perhatian publik bergeser dari rekam jejak dan program menuju citra yang dibangun secara digital.

Di sinilah letak tantangan terbesar AI. Teknologi ini mampu mempelajari preferensi psikologis pengguna melalui jejak digital, lalu menyajikan konten yang sesuai dengan keyakinan mereka. Akibatnya, ruang digital berubah menjadi echo chamber, yakni ruang yang terus memperkuat pandangan lama tanpa memberi kesempatan bertemu perspektif berbeda. Polarisasi pun semakin tajam, sementara ruang dialog yang sehat semakin menyempit.

Ketergantungan politik pada platform digital juga menghadirkan persoalan lain. Memang, teknologi memudahkan penyebaran informasi. Namun, pada saat yang sama, algoritma platform menentukan informasi mana yang paling banyak dilihat publik. Kajian Universitas Airlangga mengingatkan bahwa ketika platform hanya mengejar keterlibatan pengguna demi keuntungan ekonomi, isu-isu penting seperti penegakan hukum, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sering kali kalah oleh konten yang sensasional. Ancaman terhadap demokrasi bukan lagi semata-mata sensor negara, melainkan banjir disinformasi yang membuat informasi yang benar tenggelam di tengah konten yang lebih menarik secara visual.

Dalam kondisi seperti itu, perilaku politik masyarakat ikut berubah. Keputusan politik tidak selalu lahir dari pertimbangan rasional, tetapi sering dipengaruhi oleh arus informasi yang telah disusun dan dipersonalisasi berdasarkan data pengguna. Tanpa disadari, preferensi politik dapat diarahkan melalui manipulasi yang berlangsung secara halus.

Di balik efisiensi kampanye berbasis AI, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni ketidakadilan teknologi (*tech injustice*). Penggunaan AI generatif untuk memproduksi materi kampanye secara massal mengurangi ruang bagi pekerja kreatif lokal, seperti ilustrator, desainer grafis, dan seniman visual. Mereka harus bersaing dengan mesin yang mampu menghasilkan ratusan gambar hanya dalam hitungan detik. Efisiensi yang diperoleh dunia politik akhirnya dibayar dengan semakin sempitnya ruang ekonomi bagi para pekerja kreatif.

Menyadari risiko tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang penggunaan foto berbasis kecerdasan buatan sebagai materi kampanye pemilu. Langkah ini penting untuk menjaga kejujuran informasi yang diterima pemilih. Larangan tersebut bukan dimaksudkan

menghambat inovasi, melainkan mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat menyesatkan publik melalui visual yang tampak nyata, tetapi sebenarnya merupakan hasil rekayasa.

Meski demikian, regulasi pemilu saja belum cukup. Perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat daripada kemampuan hukum mengaturnya. Karena itu, pemerintah perlu segera menyusun regulasi yang komprehensif mengenai kecerdasan buatan. Aturan tersebut bukan untuk menghambat inovasi, melainkan memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab, melindungi hak publik, serta mencegah AI menjadi alat manipulasi politik.

Pada akhirnya, maraknya politik artifisial tidak boleh membuat masyarakat bersikap apatis. Justru kondisi ini menjadi pengingat bahwa kewargaan digital (*digital citizenship*) harus dibangun dengan lebih kuat. Setiap warga perlu memiliki kemampuan memverifikasi informasi, membandingkan berbagai sumber, dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang hanya mengandalkan sensasi visual.

Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas nalar warganya. Karena itu, jangan biarkan pilihan politik kita dibentuk sepenuhnya oleh algoritma dan rekayasa visual. Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada pemilih yang mampu berpikir kritis, memeriksa informasi secara cermat, dan berani menempatkan substansi di atas sekadar viralitas.

■ **Fakhriyah Khoirun Nisa**, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

GENERASI MELEK DIGITAL BELUM TENTU MELEK DEMOKRASI

Oleh: **Fuji Asih**

Ketika saya mengikuti kegiatan Akademi Demokrasi Perludem, ada satu momen yang membekas di pikiran saya, yaitu ketika sesi simulasi membuat partai politik. Setiap kelompok diminta membuat satu partai politik dengan ideologinya masing-masing. Bagi saya, yang menarik bukanlah ideologinya, melainkan bagaimana kita menjual ideologi partai agar terasa merakyat dan mudah diterima di masyarakat.

Realitas ini menyadarkan saya bahwa eksistensi partai politik tidak selalu soal manifestasi ideologi, yang tercermin dalam visi, misi, dan program kerja. Ada satu aspek yang krusial, yaitu: Bagaimana partai membangun citra di mata publik. Menariknya, citra ini bisa dibentuk secara mandiri terlepas dari realitas yang sesungguhnya.

Ini mengingatkan saya pada dinamika politik negara kita, terutama pada Pemilu 2024 kemarin. Kita sering melihat bagaimana seorang figur yang dulunya lekat dengan rekam jejak yang kontroversial, tiba-tiba tampil dengan tampilan yang berubah 180 derajat, yang benar-benar berbeda menjelang pemilu. Melalui strategi *rebranding* yang lucu dan emosional di media sosial, citra baru yang terkesan hangat ini terbukti ampuh

menggeser perhatian publik dari rekam jejak masa lalu.

Kenyataan ini, membawa sebuah refleksi sederhana bagi saya. Demokrasi dalam praktiknya jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan, bukan hanya duduk berkumpul menentukan ideologi dan program kerja, tetapi jauh lebih rawan dimanipulasi demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Kerawanan itu semakin besar ketika saya menghubungkannya dengan siapa yang hari ini menentukan arah demokrasi Indonesia, yaitu generasi muda.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari total pemilih terdaftar dalam pemilu 2024, Generasi Z dan Generasi Milenial mencapai 58,38% dari total keseluruhan pemilih Indonesia. Artinya, lebih dari separuh masa depan politik negara ini ada ditangan generasi yang tumbuh besar di era digitalisasi. Sekilas, ini tampak seperti kabar baik. Generasi yang dianggap paling 'melek digital' seharusnya paling mudah mengakses informasi, mengecek fakta dan berpikir kritis sebelum menentukan pilihan politiknya. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, sepanjang semester pertama 2024, terdapat 2.119 berita hoaks, dan hampir separuhnya, sekitar 48,9% bertema politik, dan berita hoaks tentang isu pemilu sekitar 31,6% temuan. Dari data tersebut, yang lebih menarik, platform penyebar hoaks pemilu terbanyak bukan Facebook atau WhatsApp seperti dulu, melainkan TikTok dan YouTube, dua platform yang paling akrab dengan keseharian Gen Z.

Masalah ini juga diakui oleh pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, sepanjang periode tahapan Pemilu 2024, antara 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024, terdapat 3.235 sebaran berita hoaks terkait pemilu, dan hanya 1.974 di antara yang berhasil

di *take down* dari platform digital. Sisanya, sebanyak 1.261 konten dibiarkan tetap beredar dan hanya diberi label peringatan. Artinya, hampir 40% hoaks yang teridentifikasi tetap bisa diakses publik meski sudah diketahui sebagai informasi yang menyesatkan. Kenyataan ini memperlihatkan sebuah ironi, yakni generasi yang secara jumlah paling dominan menentukan arah demokrasi justru berada di ruang informasi yang paling rentan disusupi disinformasi.

Dari sinilah kita sadar bahwa kemampuan mengakses informasi tidak selalu sejalan dengan kedewasaan politik. Kita perlu lebih jeli membedakan ‘melek digital’ dan ‘melek demokrasi’. Melek digital berarti lancar menggunakan aplikasi, memahami tren, dan tahu cara membuat konten viral. Sedangkan melek demokrasi adalah memahami bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kebijakan dirumuskan dan yang tak kalah penting bagaimana narasi politik bisa direkayasa untuk menutupi hal-hal yang mestinya kita kritisi.

Pengalaman saya di sesi simulasi, mengajarkan sesuatu yang tidak akan saya dapatkan hanya dengan *scrolling* media sosial, yaitu pemahaman bahwa branding yang terlihat merakyat dan menyentuh hati bisa jadi adalah strategi yang sengaja dirancang untuk membuat kita berhenti bertanya lebih jauh. Membuat branding yang sesuai dengan ideologi kelompok saya saja butuh pemikiran yang matang. Apalagi branding politik yang sesungguhnya, pasti dirancang oleh tim profesional yang berpengalaman dengan tujuan untuk meyakinkan jutaan orang. Sehingga wajar jika pemilih muda yang hanya mengenal calon lewat potongan video pendek di media sosial, kesulitan membedakan mana citra yang jujur dan mana yang sekedar pencitraan.

Bagi kebanyakan dari kita, keterlibatan dalam demokrasi berhenti di bilik suara lima tahun sekali. Tetapi jauh sebelum mencoblos, ada proses panjang yang menentukan siapa dan apa yang akhirnya kita pilih. Dari mana kita mendapat informasi soal calon isu apa yang kita anggap penting, dan narasi mana yang harus kita percaya. Proses inilah yang hari ini banyak dibentuk dan diatur oleh media sosial, sebuah platform yang serba cepat, emosional, tapi sayangnya rentan tersusupi hoaks.

Karena itu, penting untuk kita memiliki kemampuan literasi demokrasi. Literasi demokrasi bukan sekedar tahu kapan pemilu berlangsung atau siapa saja calonnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk bertanya lebih kritis. Kenapa sebuah partai atau tokoh tiba-tiba tampil begitu merakyat? Kenapa narasi tertentu terasa begitu menyentuh emosi saya? Adakah kepentingan yang disembunyikan dibalik citra yang baik itu?

Terakhir, Gen Z memang mendominasi angka. Tapi angka besar tanpa kemampuan berpikir kritis terutama literasi demokrasi hanya akan menjadikan generasi ini target empuk bagi mereka yang paham betul cara memainkan persepsi publik. Sudah saatnya kita, generasi muda, tidak bangga menjadi mayoritas pemilih. Kita juga harus memastikan diri kita layak menyandang predikat itu, dengan belajar bagaimana demokrasi sesungguhnya bekerja, bukan sekedar apa yang kita lihat di media sosial kita.

■ **Fuji Asih**, Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ketua Divisi Publikasi dan Dokumentasi Badan Legislatif Mahasiswa Prodi (BLMP).

KETIKA MASA DEPAN ANAK MENJADI MATA UANG POLITIK

Oleh: **Hasna Tsaqila**

"Anak adalah masa depan bangsa."

Kalimat itu mungkin menjadi salah satu frasa yang paling sering diucapkan dalam pidato politik Indonesia. Setidaknya dalam tiga pemilu terakhir, isu anak hampir tidak pernah absen dari visi dan misi para kandidat. Pendidikan gratis, peningkatan kualitas sekolah, penurunan stunting, perlindungan anak, pembangunan sumber daya manusia, hingga visi Generasi Emas 2045 terus menjadi bagian dari narasi kampanye.

Hal tersebut dapat dipahami. Anak bukan hanya kelompok usia, tetapi juga simbol masa depan bangsa. Janji politik yang menysasar anak hampir selalu memperoleh legitimasi publik karena menyentuh nilai yang dianggap universal: setiap anak berhak tumbuh sehat, aman, dan memperoleh kesempatan yang sama.

Ironisnya, anak sendiri tidak pernah ikut memilih. Mereka tidak memiliki hak suara. Mereka tidak menentukan hasil pemilu. Mereka tidak dapat menghukum politisi yang mengingkari janji melalui kotak suara. Namun, wajah merekalah yang paling sering muncul ketika negara ingin menunjukkan bahwa pembangunan sedang berjalan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang jarang diajukan: Apakah anak benar-

benar menjadi pusat pembangunan demokrasi, atau justru menjadi wajah yang memperkuat narasi politik?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menghitung jumlah program pemerintah maupun banyaknya janji kampanye. Demokrasi tidak berhenti pada retorika politik. Ia diuji melalui kemampuan negara membangun sistem yang secara konsisten memenuhi hak-hak anak.

Dalam perspektif *child rights approach*, anak dipandang sebagai *rights holder*, yaitu pemegang hak yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan, serta partisipasi. Sebaliknya, negara merupakan *duty bearer* yang memiliki kewajiban untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfil*) hak-hak tersebut. Kewajiban ini tidak berhenti pada peluncuran program baru, tetapi mencakup penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang inklusif, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, pengasuhan yang mendukung perkembangan anak, jaminan sosial bagi keluarga rentan, lingkungan yang aman, serta kesempatan bagi anak untuk membangun hubungan sosial yang bermakna sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child*.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya banyaknya program yang menysasar anak, melainkan sejauh mana negara menjalankan perannya sebagai duty bearer secara konsisten.

Apabila menggunakan indikator kesejahteraan anak, Indonesia memang menunjukkan sejumlah kemajuan. Prevalensi stunting nasional menurun dari 37,2% pada 2013 menjadi 21,5% pada 2023, kemudian kembali turun menjadi 19,8% pada 2024 (Kementerian Kesehatan RI melalui SSGI, 2024–2025). Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan status gizi anak sekaligus mengindikasikan bahwa berbagai intervensi kesehatan dan gizi

memberikan hasil positif. Prevalensi perkawinan anak juga mengalami penurunan, angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023. (KemenPPPA)

Namun, data tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Penurunan prevalensi perkawinan anak terjadi bersamaan dengan perubahan regulasi melalui revisi Undang-Undang Perkawinan pada 2019, dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun. Pada periode yang sama, permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama meningkat secara signifikan. Artinya, penurunan prevalensi tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai hilangnya praktik perkawinan anak, melainkan perlu dianalisis bersama perubahan mekanisme hukum, administrasi, dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

Di sisi lain, berbagai tantangan masih bertahan. Kasus kekerasan terhadap anak masih terus dilaporkan setiap tahun. Kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas masih terjadi, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan di wilayah-wilayah tertentu. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga miskin juga menghadapi risiko lebih besar mengalami deprivasi gizi, keterbatasan akses layanan kesehatan, kualitas pendidikan yang rendah, hingga kerentanan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan belum sepenuhnya dinikmati secara merata.

Namun disinilah paradoks demokrasi mulai terlihat.

Setiap periode pemilu, perhatian terhadap isu anak meningkat. Namun, perhatian politik tidak selalu diikuti oleh penguatan sistem perlindungan anak yang bersifat jangka panjang. Padahal, sistem perlindungan anak tidak dibangun hanya melalui satu program atau satu periode pemerintahan. Ia membutuhkan investasi yang berkelanjutan dalam layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, penguatan keluarga, pekerja sosial, layanan perlindungan anak, serta koordinasi antar lembaga.

Pemerintah sebagai *duty bearer* bertanggung jawab memastikan setiap anak memperoleh hak-hak dasarnya tanpa diskriminasi. Keberhasilan negara tidak cukup diukur dari banyaknya bantuan yang disalurkan atau program yang diluncurkan, melainkan dari apakah setiap anak benar-benar memperoleh akses terhadap layanan yang berkualitas, hidup dalam lingkungan yang aman, memiliki hubungan sosial yang mendukung perkembangan mereka, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan kemiskinan.

Demokrasi yang sehat seharusnya tidak hanya menghasilkan kebijakan yang populer, tetapi juga membangun institusi yang mampu menjamin pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Investasi pada anak sering kali tidak menghasilkan keuntungan politik yang instan. Dampaknya baru terlihat bertahun-tahun kemudian, bahkan setelah masa jabatan seorang pemimpin berakhir.

Di sinilah anak menempati posisi yang unik dalam demokrasi. Mereka adalah kelompok yang paling bergantung pada negara, tetapi memiliki kekuatan politik yang paling kecil. Mereka tidak dapat memilih pemimpin, tidak dapat melobi parlemen, dan tidak dapat memengaruhi agenda politik secara langsung. Justru karena itulah kualitas demokrasi

dapat diukur dari bagaimana negara memperlakukan mereka yang tidak memiliki daya tawar politik.

Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memenangkan pemilu. Demokrasi juga tentang siapa yang tetap dilindungi ketika baliho telah diturunkan, kampanye telah selesai, dan perhatian publik mulai bergeser. Barangkali pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi, *“Apakah pemerintah memiliki program untuk anak?”* Hampir semua pemerintahan memilikinya.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: *“Apakah janji-janji tersebut berhasil membangun sistem kesejahteraan anak yang kuat, konsisten, dan mampu bertahan melampaui siklus politik lima tahunan?”*

■ **Hasna Tsaqila**, Mahasiswa Universitas Indonesia (UI).

IRONI TRIAS POLITICA DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Oleh: **Hilmi Hafizh Muhammad**

Dalam tatanan politik ideal, keberlangsungan sistem demokrasi sangat bergantung pada komitmen moral dan fungsi para aktornya. Larry Diamond (2008) menegaskan bahwa institusi demokrasi hanyalah cangkang kosong tanpa adanya aktor, yakni partai politik, parlemen, eksekutif, dan peradilan. Aktor-aktor ini memegang mandat konstitusional untuk mengartikulasikan kehendak rakyat menjadi kebijakan publik serta menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*).

Namun, realitas politik kontemporer di Indonesia, pasca reformasi justru menampilkan anomali yang mengkhawatirkan. Peran yang semula diamanatkan sebagai aktor demokrasi, kini bergeser secara peyoratif menjadi “penghianat demokrasi”, sebuah metafora untuk menggambarkan perilaku elite yang secara paksa merebut, merusak, dan membajak ruang demokrasi demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Mengapa pergeseran watak ini terjadi?

Pilar utama *trias politica* mensyaratkan adanya pemisahan kekuasaan yang tegas agar fungsi pengawasan (*oversight function*) berjalan secara optimal. Namun, fenomena pasca-pemilu di Indonesia berulang kali menunjukkan pola yang bertolak belakang; terbentuknya koalisi

pemerintahan yang terlampau gemuk (*oversized coalition*). Alih-alih bertindak sebagai penyeimbang dan menginterupsi kebijakan eksekutif yang ugul-ugalan, parlemen (legislatif) justru bersekongkol dengan pemerintah (eksekutif).

Koalisi yang dominan ini mematikan fungsi oposisi secara sistematis. Implikasinya sangat fatal pada kualitas produk hukum. Undang-undang krusial yang menentukan hajat hidup orang banyak seperti, UU KPK, UU Cipta Kerja (Omnibus Law), hingga pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disahkan dalam waktu yang sangat singkat dengan meminimalkan, atau bahkan mengabaikan secara sengaja, partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Parlemen tidak lagi berfungsi sebagai wadah agregasi suara konstituen, melainkan sekadar stempel legalitas bagi agenda politik-ekonomi elite.

Ketika legislatif dan eksekutif telah menyatu dalam satu orkestra kepentingan, benteng terakhir keadilan teoretis berada di tangan yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Namun, ruang suci ini tak luput dari intervensi para tikus. Fenomena pencopotan hakim MK secara mendadak oleh DPR (seperti kasus Hakim Aswanto) atau upaya terus-menerus untuk merevisi UU MK guna mengatur ulang masa jabatan hakim menunjukkan gejala penjinakan (*taming*) lembaga peradilan secara terstruktur.

Konsep *State Capture* yang dirumuskan oleh Hellman dan Kaufmann (2000) menjelaskan, fenomena ini secara presisi. *State capture* adalah kondisi di mana para aktor kuat (baik politisi maupun oligarki bisnis) membentuk aturan main dasar di sebuah negara melalui korupsi sistemik

dan manipulasi regulasi. Elite di Indonesia tidak lagi sekadar menyuap hakim di panggung belakang untuk memenangkan perkara tertentu; mereka melangkah lebih jauh dengan membajak mekanisme seleksi dan institusi hukum. Tujuannya, untuk memastikan keputusan-keputusan yudikatif masa depan tidak akan mengganggu stabilitas politik, mengamankan investasi oligarki, atau menjegal ambisi pelestarian kekuasaan.

Akar dari disfungsi *trias politika* di atas bermuara pada kegagalan partai politik. Partai politik di Indonesia telah mengalami proses de-ideologisasi dan terjebak dalam lingkaran personalisasi petinggi partai. Pengelolaan partai bergeser dari institusi publik berbasis kaderisasi, menjadi layaknya ‘perusahaan keluarga’ atau kepemilikan privat para ketua umum dan penyokong dana (*bohir*).

Dalam iklim politik modal tinggi, rekrutmen politik tidak lagi didasarkan pada rekam jejak, kompetensi, atau keberpihakan ideologis terhadap rakyat kecil. Partai politik cenderung memfokuskan kompasnya pada aspek popularitas instan dan kekuatan finansial calon. Akibatnya, figur yang diusung sering kali adalah artis, selebgram, atau pengusaha besar yang minim pemahaman tata kelola negara. Partai politik mengabaikan perannya sebagai jembatan aspirasi rakyat dan mengubah dirinya menjadi sekadar kendaraan elektoral berkala demi mengamankan logistik dan konsesi kekuasaan.

Meminjam perspektif Dramaturgi Erving Goffman dalam karya klasiknya, *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959), fenomena kemunduran demokrasi ini dapat dipahami sebagai benturan antara perilaku elite di panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*).

Di panggung depan, para aktor politik menampilkan manajemen kesan (*impression management*) yang sangat rapi di hadapan publik. Mereka menggunakan retorika kebangsaan, jargon kesejahteraan rakyat, serta simbol-simbol konstitusional demi memoles citra sebagai pelayan publik yang taat hukum. Rapat-rapat paripurna di DPR dikemas seolah penuh perdebatan sengit, dan proses legislasi dipoles agar tampak berjalan sesuai tata tertib formal.

Namun, realitas substantifnya tersimpan rapat di panggung belakang. Pada ruang-ruang tertutup, di luar jangkauan kamera publik, terjadi transaksi kepentingan antara elite politik, ketua umum partai, dan oligarki bisnis. Di sinilah kesepakatan pembagian kekuasaan dirumuskan. Undang-undang pesanan dirancang, dan strategi untuk menjinakkan lembaga hukum diputuskan. Melalui dramatisasi politik ini, prosedur demokrasi dipinjam sekadar untuk memberikan stempel keabsahan formal atas praktik korupsi state capture yang terjadi di balik layar.

Pergeseran aktor menjadi “pengkhianat demokrasi” membawa dampak destruktif yang menjalar ke berbagai sendi kehidupan bernegara. Salah satu dampak yang paling nyata adalah menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Fenomena ini sejalan dengan temuan berbagai lembaga pemantau internasional yang menempatkan Indonesia dalam kategori *Flawed Democracy* (demokrasi cacat) (Hivos, 2025) serta mengalami *democratic backsliding* atau kemunduran demokrasi (2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya mengalami kemerosotan dari sisi prosedural, tetapi juga secara substantif akibat melemahnya mekanisme *checks and balances* serta terkikisnya independensi lembaga hukum.

Dampak tersebut juga tercermin dalam proses pembentukan kebijakan publik. Ketika kewenangan penyusunan regulasi dikuasai oleh segelintir elite, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat ekstraktif dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan publik. Akibatnya, regulasi lebih diarahkan untuk melindungi akumulasi modal dibandingkan menjamin hak-hak buruh, menjaga kelestarian lingkungan hidup, maupun mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.

Pada saat yang sama, kemerosotan demokrasi turut memengaruhi cara masyarakat memandang politik. Politik tidak lagi dipahami sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan bersama (*bonum commune*), melainkan sekadar arena perebutan kekuasaan dan keuntungan ekonomi di antara para elite. Pergeseran persepsi tersebut mendorong tumbuhnya apatisisme politik, menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara, serta meningkatnya sikap sinis, terutama di kalangan generasi muda, yang pada akhirnya semakin menjauhkan masyarakat dari partisipasi demokratis.

Menyelamatkan masa depan Indonesia dari cengkeraman para “penghianat demokrasi” membutuhkan intervensi struktural yang radikal. Langkah mendesak pertama adalah mengembalikan fungsi *Trias Politica* ke asalnya. Hal ini menuntut adanya keberanian sosiopolitik untuk memulihkan independensi mutlak ruang yudikatif (MK dan MA) dari intervensi cabang kekuasaan lain. Fungsi pengawasan parlemen juga harus dipulihkan dengan memastikan hadirnya kekuatan oposisi yang sehat dan jaminan ruang partisipasi publik yang bermakna dalam setiap pembuatan undang-undang.

Kemudian reformasi partai politik. Regulasi mengenai kegiatan dan pendanaan partai politik harus dirombak total melalui skema pembiayaan negara yang transparan dan akuntabel guna memutus rantai ketergantungan partai pada dana-dana gelap oligarki. Selama partai politik masih dikelola layaknya kartel privat yang memuja popularitas buta dan uang, selama itu pula panggung politik Indonesia hanya akan diisi oleh para pembajak yang bersandiwara atas nama rakyat.

Struktur demokrasi harus dikembalikan fungsinya sebagai pelayan kedaulatan warga negara, bukan instrumen pemuas syahwat politik para pemburu rente.

■ **Hilmi Hafizh Muhammad**, Mahasiswa Universitas Indonesia (UI).

BELAJAR DEMOKRASI, MENGHIDUPI DEMOKRASI

Oleh: **Mulya Wiguna**

Demokrasi seringkali dipahami sebatas proses memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Setelah pemilu selesai banyak orang menganggap bahwa seluruh urusan negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat yang telah terpilih. Cara pandang seperti ini membuat demokrasi hanya dipahami sebagai prosedur politik lima tahunan, padahal hakikat demokrasi jauh lebih luas. Demokrasi merupakan sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sekaligus menuntut partisipasi aktif warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan aspirasi, dan menjaga agar kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Di tengah tantangan berupa polarisasi politik, penyebaran disinformasi, sampai pesatnya perkembangan teknologi digital, pendidikan demokrasi menjadi semakin penting terutama bagi generasi muda. Melalui materi yang saya peroleh dalam Akademi Demokrasi Perludem, saya memahami bahwa belajar demokrasi bukan sekadar mengetahui konsep dan sistem ketatanegaraan tetapi juga belajar menghidupi nilai-nilainya dalam setiap tindakan, keputusan, dan interaksi di kehidupan sehari-hari.

Salah satu pemahaman paling penting yang saya peroleh adalah bahwa demokrasi bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin melainkan

seperangkat nilai yang menjadi dasar kehidupan, kebebasan, kesetaraan, partisipasi, serta akuntabilitas bukan hanya konsep yang tertulis dalam konstitusi tetapi nilai yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Demokrasi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk berpendapat, memperoleh informasi, maupun berpartisipasi dalam kehidupan politik dapat terjamin apabila demokrasi dijalankan secara sehat. Sebaliknya, demokrasi tidak akan bermakna apabila hak-hak warga negara dibatasi atau diabaikan.

Pengetahuan baru saya soal *checks and balances* juga mengubah cara pandang saya terhadap penyelenggaraan negara. Sekarang saya memahami bahwa sistem demokrasi menempatkan pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan, media massa, partai politik, dan masyarakat sipil sebagai aktor yang saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya keseimbangan tersebut setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Demokrasi yang sehat bukan diukur dari seberapa sering pemilu dilaksanakan melainkan dari sejauh mana kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum, menghormati hak-hak warga negara, serta terbuka terhadap kritik dan pengawasan masyarakat.

Dari refleksi ini saya menyadari bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga oleh kepedulian setiap warga negara. Ketika masyarakat memilih bersikap apatis, tidak mau menyampaikan aspirasi, ataupun membiarkan penyimpangan tanpa kritik, demokrasi perlahan kehilangan makna substantifnya.

Perkembangan teknologi informasi menghadirkan ruang demokrasi yang baru. Media sosial memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, berdiskusi, sampai mengawasi kebijakan pemerintah dengan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain ruang digital juga menghadirkan tantangan yang tidak kalah besar. Penyebaran disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian, serta polarisasi politik sering kali memperkeruh ruang publik dan menghambat terciptanya dialog yang sehat. Kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), juga membawa tantangan baru terkait etika digital dan perlindungan data pribadi.

Saya sadar, bahwa menjadi generasi digital tidak cukup hanya mampu menggunakan teknologi tetapi juga harus memiliki tanggung jawab dalam mengelola informasi. Kebiasaan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya merupakan bentuk partisipasi sederhana yang berdampak bagi kualitas demokrasi. Begitu pula dengan menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan argumentasi berbasis data dibandingkan emosi. Media sosial seharusnya menjadi ruang untuk bertukar gagasan dan memperkuat literasi, bukan sarana memperluas kebencian atau perbedaan.

Dengan demikian demokrasi di era digital hanya dapat berkembang apabila masyarakat memiliki literasi digital yang baik sekaligus menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi.

Lewat Demokrasi Akademi saya juga sadar, bahwa demokrasi juga membutuhkan keterampilan bukan hanya pengetahuan. Kemampuan berpikir kritis, berbicara di depan umum, bernegosiasi, menyelesaikan konflik, merupakan bekal yang memungkinkan seseorang berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan demokrasi. Saya menyadari bahwa nilai-nilai tersebut sebenarnya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika mengikuti organisasi kampus, kepanitiaan, maupun forum musyawarah. Perbedaan pendapat yang muncul

dalam proses pengambilan keputusan bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk belajar menghargai pandangan orang lain dan mencari solusi terbaik melalui dialog.

Pengalaman tersebut membuat saya memahami bahwa demokrasi dimulai dari hal-hal sederhana. Keberanian menyampaikan pendapat harus diiringi dengan kesediaan mendengarkan orang lain. Kritik harus disampaikan secara santun dan disertai solusi. Begitu pula keputusan bersama harus dihormati sebagai hasil musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Setelah mempelajari berbagai materi tersebut, saya menyadari bahwa menjaga demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga negara, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara.

Belajar demokrasi bukan sekadar memahami teori tentang sistem pemerintahan atau proses pemilu. Lebih dari itu demokrasi merupakan nilai yang harus diwujudkan melalui sikap menghargai perbedaan, menjaga kebebasan yang bertanggung jawab, aktif berpartisipasi, serta berani mengawasi jalannya kekuasaan. Oleh karena itu, generasi muda tidak cukup hanya menjadi penonton dalam kehidupan demokrasi, tetapi harus menjadi pelaku yang mampu menjaga ruang dialog, memperkuat literasi digital dan berkontribusi dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih inklusif, dan adil.

■ **Mulya Wiguna**, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten.

DEMOKRASI YANG INKLUSIF MELALUI PEMENUHAN HAK KESEHATAN PEREMPUAN SEPANJANG SIKLUS KEHIDUPAN

Oleh: **Puji Akmaliana Binti Asbaruna**

Berpartisipasi dalam kegiatan Akademi Demokrasi memperluas pemahaman saya bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, keberadaan partai politik, ataupun pergantian kekuasaan. Demokrasi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui penghormatan terhadap hak-hak warga negara, kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu bentuk nyata penerapan nilai demokrasi yang saya temui dalam bidang yang saya tekuni adalah pemenuhan hak kesehatan perempuan. Bagi saya, kualitas demokrasi dapat tercermin dari sejauh mana perempuan memperoleh akses yang setara terhadap layanan kesehatan, informasi yang benar, dan kesempatan untuk menentukan pilihan yang berkaitan dengan kesehatannya sendiri.

Berbagai materi yang saya peroleh selama Akademi Demokrasi semakin menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pelayanan kesehatan. Setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta sesuai dengan kebutuhannya tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan sosial, budaya, maupun ekonomi masih membuat sebagian perempuan belum sepenuhnya dapat menikmati hak tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan bukan hanya persoalan layanan medis, melainkan juga bagian dari praktik demokrasi yang menjunjung kesetaraan dan keadilan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pengakuan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia. Hak atas kesehatan telah diakui dalam Konstitusi WHO, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, bukan sekadar terbebas dari penyakit. Definisi ini menunjukkan bahwa kesehatan perempuan perlu dipahami secara menyeluruh sepanjang siklus kehidupannya.

Seorang perempuan mungkin tidak mengalami gangguan fisik, tetapi tetap menghadapi tekanan psikologis, kekerasan, diskriminasi, atau keterbatasan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraannya. Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan tidak dapat dilepaskan dari upaya menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan menghargai martabat setiap individu.

Pemenuhan hak tersebut penting dimulai sejak masa remaja. Pada fase ini, perempuan membutuhkan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi yang benar, mudah dipahami, dan berbasis bukti ilmiah.

Sayangnya, pembahasan mengenai kesehatan reproduksi masih sering dianggap sebagai hal yang tabu sehingga banyak remaja mencari informasi dari sumber yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Padahal, WHO menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus tersedia bagi setiap orang sepanjang kehidupannya.

Pemenuhan hak tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan, tetapi juga mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, akses terhadap informasi kesehatan yang berkualitas juga merupakan bagian dari demokrasi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pengetahuan yang benar.

Memasuki masa reproduksi, perempuan dihadapkan pada berbagai keputusan penting, mulai dari perencanaan kehamilan, penggunaan kontrasepsi, hingga upaya menjaga kesehatan reproduksi. Idealnya, setiap keputusan diambil berdasarkan informasi yang memadai dan sesuai dengan kehendak perempuan itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya, pilihan tersebut tidak jarang dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, maupun tekanan dari lingkungan keluarga. Padahal, demokrasi yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, serta memperoleh penghormatan atas keputusan yang menyangkut tubuh dan kesejahteraan.

Prinsip tersebut menjadi semakin penting pada masa kehamilan dan persalinan. Menurut UNFPA (Badan kesehatan seksual dan reproduksi PBB), ratusan perempuan masih meninggal setiap hari akibat penyebab yang sebenarnya dapat dicegah selama kehamilan dan persalinan.

Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pelayanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan belum terpenuhinya hak asasi perempuan.

Sebagai seorang bidan, saya memahami bahwa keberhasilan pelayanan kebidanan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi klinis, tetapi juga oleh kemampuan tenaga kesehatan dalam menghargai hak, martabat, dan suara setiap perempuan. Oleh karena itu, perempuan perlu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan mengenai pelayanan yang diterimanya sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki hak untuk menentukan pilihan.

Pemenuhan hak kesehatan perempuan juga tidak berhenti pada aspek kesehatan fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, saya masih sering melihat bahwa kesehatan mental perempuan belum memperoleh perhatian yang memadai. Banyak perempuan memikul tanggung jawab besar di dalam keluarga maupun dunia kerja, tetapi belum memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan keluhan atau memperoleh dukungan psikologis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, diperlukan lingkungan sosial yang mendukung serta kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, demokrasi berperan sebagai ruang untuk memperjuangkan kebutuhan kelompok yang selama ini kurang terdengar.

Sebagai tenaga kesehatan, saya meyakini bahwa profesi kesehatan memiliki peran strategis dalam memperkuat praktik demokrasi di tengah masyarakat. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pelayanan yang menghormati hak pasien, edukasi kesehatan yang berbasis bukti, serta pemberian layanan tanpa diskriminasi. Dalam praktik kebidanan, seorang bidan tidak hanya bertanggung jawab memberikan asuhan klinis, tetapi juga memberdayakan perempuan agar mampu memahami kondisi kesehatannya dan mengambil keputusan secara mandiri. Pemberdayaan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang menjadi salah satu nilai utama dalam demokrasi.

Selain melalui pelayanan kesehatan, penguatan demokrasi juga dapat dilakukan melalui peningkatan literasi kesehatan masyarakat. Di era digital, informasi kesehatan dapat diperoleh dengan sangat mudah, tetapi tidak semuanya memiliki dasar ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu berperan aktif memberikan edukasi yang akurat sekaligus membantu masyarakat memilah informasi yang valid dan menghindari penyebaran misinformasi. Dengan literasi kesehatan yang baik, masyarakat akan lebih mampu mengambil keputusan yang rasional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan kesehatannya.

Mengikuti Akademi Demokrasi membuat saya semakin memahami bahwa demokrasi bukan sekadar mekanisme politik, melainkan juga fondasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat. Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dijamin dalam negara demokratis.

Ketika perempuan memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, serta kebebasan untuk mengambil keputusan mengenai kesehatannya sendiri, mereka akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi secara aktif dalam keluarga, masyarakat, maupun pembangunan bangsa. Dengan demikian, memperjuangkan kesehatan perempuan sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

■ **Puji Akmaliana Binti Asbaruna**, Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta III

MINORITAS MEMILIH, TETAPI TAK PERNAH DIWAKILI

Oleh: **Rahmad Aidil Ali Lubis**

Berbagai wacana mengenai partai politik yang berbasis advokasi di Indonesia mulai mencuat di tengah ketidakpastian ideologi dan arah partai politik. Kemunculan isu parpol berbasis advokasi adalah salah satu bentuk kekecewaan masyarakat dalam ketidakmampuan partai mengatasi isu yang dianggap penting dan mendesak. Banyaknya partai politik di Indonesia, baik yang duduk di parlemen maupun yang berada di luar parlemen terbukti gagal dalam menghadirkan advokasi politik bagi masyarakat dan ruang demokrasi yang inklusif bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali.

Munculnya Partai Hijau Indonesia adalah salah satu upaya untuk menyuarakan dan mengadvokasi isu-isu lingkungan khususnya, dan isu marjinal umumnya. Muncul juga wacana partai hewan yang berfokus pada isu-isu konservasi dan perlindungan hewan. Kedua contoh tersebut merupakan upaya dari banyaknya tuntutan publik akan partai advokasi yang memperjuangkan isu lingkungan dan hewan. Namun, yang juga penting untuk ditanyakan ialah bagaimana dengan kelompok manusia yang nyata-nyata memiliki hak pilih, seperti kelompok Syiah, Ahmadiyah, Saksi Yehuwa dan lain sebagainya?

Berdasarkan laporan Setara Institute (2025), Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) menunjukkan, Indonesia masih berada

pada angka yang mengkhawatirkan. Laporan tersebut menunjukkan sepanjang tahun 2025 tercatat 221 peristiwa pelanggaran KBB dan 331 tindakan pelanggaran. Meski angka ini lebih rendah dibanding tahun 2024, namun penurunannya belum bisa dianggap sebagai penurunan yang substantif.

Sedangkan aktor pelaku pelanggaran beragam, setidaknya ada dua aktor yaitu, aktor negara dengan jumlah 128 tindakan dan aktor non-negara dengan 197 tindakan. Aktor negara terdiri dari Pemerintah Daerah (71), Kepolisian (15), TNI (6), Kejaksaan (6), Satpol PP (6), Kementerian Agama (5). Sedangkan aktor non-negara terdiri dari kelompok warga (61), Organisasi masyarakat (51), MUI (23), Tokoh agama (9), FKUB (9), dan Individu (9).

Setara Institute juga menilai terjadi peningkatan keterlibatan kelompok warga, hal itu menunjukkan bahwa intoleransi telah mengakar di tingkat masyarakat, bukan hanya berasal dari kebijakan negara. Setara Institute menilai intoleransi telah berkembang dari sekadar penolakan menjadi aksi kekerasan. Misalnya, pembubaran retret di Cidahu Sukabumi dan penyerangan rumah doa di Padang Sarai Sumatera Barat.

Kedua, diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah meningkat, dari 8 kasus di 2024 menjadi 12 kasus di 2025. Ketiga, Umat Kristen dan Katolik tetap menjadi korban terbesar, dengan permasalahan utama tetap berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, penolakan masyarakat, penghentian kegiatan ibadah serta hambatan administratif. Menurut Setara, diskriminasi tersebut karena PBM Dua Menteri Tahun 2026, karena masih memberi ruang veto sosial terhadap pembangunan rumah ibadah.

Data-data tersebut menunjukkan, masih adanya permasalahan

sosial mengenai hak-hak dasar kelompok minoritas agama yang jelas sudah dijamin oleh UUD 1945 mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lebih jauh, hal itu merupakan permasalahan dalam demokrasi Indonesia. Karena pemilu Indonesia baru sebatas mewujudkan inklusivitas prosedural, sekadar diberi hak mencoblos di TPS.

Namun di sisi lain, pemilu di Indonesia telah gagal dalam memberikan inklusivitas substansial, dimana tidak adanya aktor politik di parlemen yang berani mengadvokasi hak-hak sipil kaum minoritas agama secara konkret dan konsisten.

Mengapa partai politik hari ini terkesan “gagap” dalam membela hak-hak minoritas? Aspinall dan Mietzner (2020) menjelaskan, bahwa pelemahan institusional partai politik diakibatkan oleh personalisasi politik serta meningkatnya polarisasi sosial-keagamaan. Hal itu menyebabkan partai semakin berorientasi pada kepentingan elektoral dan elite, bukan pada representasi agenda ideologis maupun perlindungan hak-hak warga negara. Kondisi ini menjelaskan mengapa isu-isu yang berkaitan dengan kelompok minoritas sering kali tidak menjadi prioritas dalam kompetisi politik.

Selain itu, Indonesia saat ini telah terjebak dalam kondisi yang disebut dengan tirani mayoritas. Tirani mayoritas terjadi ketika kehendak kelompok mayoritas secara eksklusif berlaku dalam sistem pemerintahan demokratis, yang berpotensi mengakibatkan penindasan terhadap kelompok minoritas. Hal tersebut dapat menjelaskan mengapa partai yang berhaluan nasionalis maupun Islamis sekalipun memilih bungkam saat terjadi diskriminasi terhadap minoritas.

Advokasi terhadap kelompok marjinal yang jumlah suaranya sedikit dianggap sebagai sebuah tindakan “bunuh diri” karena rentan memicu sentimen negatif dari basis massa mayoritas yang konservatif. Hal

tersebut bisa dibuktikan melalui data mengenai sentimen kebencian terhadap kelompok minoritas di ranah siber yang dipublikasikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada Pemilu 2024.

Sebanyak 26,9% atau 182.118 dari total 678.016 teks percakapan yang dipantau mengandung ujaran kebencian. Percakapan yang bermuatan kebencian tersebut menysar kelompok minoritas agama seperti Kristen, Katolik, Syiah, Ahmadiyah. Selain itu, etnis Tionghoa, kelompok LGBTQ dan penyandang disabilitas juga menjadi sasaran ujaran kebencian.

Dengan kondisi yang demikian memprihatinkan, terjadi apa yang disebut dengan alienasi politik, yaitu ketakutan elektoral partai politik *mainstream*, akibatnya kelompok minoritas mengalami keterasingan politik. Mereka mendatangi TPS, tetapi di saat yang sama mereka menyadari bahwa tidak ada satu pun individu ataupun partai yang benar-benar mewakili nasib hak-hak sipil mereka. Kondisi ini juga menciptakan partisipasi politik yang rendah dari kelompok minoritas, karena tidak ada partai yang benar-benar memperjuangkan nasib dan hak asasi kelompok minoritas.

Pendirian partai yang berfokus pada advokasi kelompok minoritas saat ini masih terhambat UU Pemilu, mengenai syarat pendirian parpol di Indonesia masih sangat berat. Misalnya, syarat yang mengharuskan partai memiliki kepengurusan 100% di Provinsi dan 75% di kabupaten/kota. Syarat tersebut tentu mengharuskan sebuah partai memiliki modal besar, hingga akhirnya mematikan peluang lahirnya partai berbasis gerakan ideologis atau partai lokal. Hanya parpol yang memiliki modal besar yang bisa lolos.

Selain itu, ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sebesar 4% juga menjadi tembok penghambat. Akibat dari persebaran geografis kelompok minoritas keagamaan di Indonesia bersifat menyebar di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkonsentrasi di satu wilayah tertentu, sistem proporsional terbuka dengan ambang batas tinggi akan otomatis mengeliminasi partai gerakan dan alternatif.

Partai advokasi kelompok minoritas agama bukanlah hal yang mustahil dan utopis. Di India, ada beberapa partai yang berbasis komunitas untuk mengangkat derajat kelompok minoritas seperti *Bahujan Samaj Party* (BSP), partai nasional yang didirikan untuk membela kaum Dalit (kasta terendah/terpinggirkan dalam strata sosial) dan kelompok minoritas keagamaan lainnya.

Partai itu berhasil membuktikan bahwa kelompok paling bawah bisa merebut kekuasaan politik di negara bagian besar seperti Uttar Pradesh. *All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen* (AIMIM), partai politik yang mengadvokasi hak-hak sipil, pendidikan, dan perlindungan konstitusional bagi minoritas Muslim di India. *Shiromani Akali Dal* (SAD), partai berbasis regional-keagamaan yang secara spesifik mengadvokasi hak-hak politik, budaya dan agama komunitas Sikh di wilayah Punjab, India.

Kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya bisa diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih (*voter turnout*) di TPS setiap lima tahun sekali. Melainkan dari sejauh mana sistem yang ada mampu melindungi kelompok paling rentan. Sudah seharusnya pemerintah mendorong reformasi UU Pemilu untuk melonggarkan syarat verifikasi partai politik, agar parpol yang berbasis gerakan isu minoritas memiliki kesempatan yang sama.

Selain itu, sudah seharusnya KPU menuntut komitmen masing-masing parpol untuk berkomitmen pada penegakan hak asasi manusia sebagai platform wajib dalam visi-misi parpol. Demokrasi yang sehat dan matang sudah seharusnya tidak membiarkan ajang pemilu sebagai alat tirani mayoritas untuk membungkam kelompok minoritas. Pemilu harus menjadi ruang yang inklusif, dimana semua suara—sekecil apapun, memiliki kesempatan untuk didengar dan diwakili.

■ **Rahmad Aidil Ali Lubis**, Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

WARISAN BERACUN *DIVIDE ET IMPERA*: SENJATA POLITIK PALING EFEKTIF

Oleh: **Rahma Noor Zakia**

Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang sebuah strategi politik kuno yang terbukti sangat ampuh yakni *divide et impera* atau politik belah bambu (pecah belah dan kuasai). Ironisnya, setelah lebih dari tujuh dekade merdeka, hantu kolonialisme ini tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti kulit, beradaptasi dengan algoritma media sosial, dan terus memakan korban dari kalangan masyarakat sipil.

Lalu mengapa taktik yang digunakan oleh penjajah di masa lalu ini masih sangat relevan bahkan menjadi strategi politik paling sukses di Indonesia masa kini?

Secara historis, *divide et impera* adalah kunci kesuksesan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dan pemerintah kolonial Belanda dalam menundukkan Nusantara yang luas. Belanda menyadari bahwa mereka kalah jumlah secara drastis. Mustahil menaklukkan kerajaan-kerajaan besar dengan konfrontasi militer langsung.

Sebagai gantinya, mereka memanfaatkan celah konflik internal. Kita mengingat bagaimana VOC mendukung Aru Palakka untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin di Makassar, atau bagaimana mereka

memihak Sultan Haji untuk menggulingkan ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Dengan mengeksploitasi perbedaan dan ambisi individu, Belanda membuat orang Nusantara saling membunuh, sementara mereka duduk manis meraup monopoli rempah-rempah.

Kondisi Indonesia saat ini membuktikan bahwa strategi *divide et impera* masih sangat relevan. Bedanya, jika dulu dalangnya adalah pemerintah kolonial, kini aktor utamanya sering kali adalah elite politik lokal, oligarki, dan sayangnya, sistem algoritma media sosial secara natural juga mengamplifikasi polarisasi.

Hari ini, masyarakat Indonesia terus-menerus disibukkan dengan berbagai konflik horizontal. Perhatian publik sengaja dipecah agar masyarakat sipil tidak pernah bersatu menuntut akuntabilitas atas isu-isu struktural yang lebih besar, seperti korupsi, perampasan ruang hidup, atau ketimpangan ekonomi.

Beberapa kasus nyata konflik horizontal yang merobek kohesi sosial kita belakangan ini meliputi “Perang Gender” dan nilai konservatif. Di media sosial, sering terjadi pertarungan sengit antara kelompok feminis dan kelompok yang memegang teguh nilai patriarki atau konservatif. Isu-isu seperti *childfree*, peran perempuan di ranah domestik, hingga upah buruh perempuan sering direduksi menjadi saling serang, alih-alih mencari solusi atas ketimpangan sistemik.

Kemudian, persekusi terhadap kelompok minoritas dan queer. Sentimen terhadap kelompok rentan, termasuk komunitas queer (LGBTQ+), sering kali dipolitisasi dan dijadikan “kambing hitam” moral untuk mendulang simpati mayoritas. Penolakan, persekusi, dan diskriminasi dibiarkan (atau bahkan didukung secara tersirat oleh aktor politik lokal) sebagai cara mudah untuk mendapatkan legitimasi moral dari kelompok konservatif, mengalihkan pandangan dari kegagalan pemerintah menyediakan kesejahteraan.

Politik *divide et impera* memiliki dampak yang sangat merusak bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi kita tereduksi menjadi sekadar elektoral dan prosedural, sehingga kehilangan esensi substansialnya. Pertama, taktik ini mengalihkan isu, ketika masyarakat akar rumput sibuk bertengkar soal siapa politisi yang lebih suci, atau kelompok mana yang paling bermoral, elite ekonomi-politik dapat dengan mudah mengesahkan undang-undang yang merugikan rakyat bermodal tanpa banyak perlawanan (misalnya, pengesahan UU Cipta Kerja atau revisi UU KPK).

Kedua, ia menghancurkan solidaritas kelas. Demokrasi yang sehat membutuhkan civil society (masyarakat sipil) yang kuat. Namun, karena masyarakat sipil terfragmentasi oleh sentimen identitas, mereka tidak memiliki posisi tawar untuk mengawasi kekuasaan. Secara objektif namun sinis, harus diakui bahwa *divide et impera* adalah strategi politik yang paling sempurna dan efisien untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini sangat berkaitan erat dengan karakteristik geografis dan demografis negara sebagai negara kepulauan (*archipelago*) dengan ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa, dan keragaman agama yang luar biasa.

Keragaman ini adalah kekayaan, namun di tangan politisi pragmatis, ini adalah bahan bakar yang sangat mudah dipantik. Secara geografis, jarak antarwilayah membuat ketimpangan pembangunan terjadi. Secara sosiologis, primordialisme (keterikatan pada identitas suku/agama) masih lebih kuat dibandingkan kesadaran kelas ekonomi.

Bagi elite yang ingin melanggengkan kekuasaan, jauh lebih murah dan mudah untuk menyebarkan narasi kebencian antar-kelompok daripada harus membangun program kesejahteraan yang merata, memperbaiki fasilitas pendidikan, atau menegakkan hukum secara adil. Keragaman Indonesia secara tragis menjadi kelemahan terbesarnya ketika dieksploitasi oleh politik pecah belah.

Meski terlihat suram, bukan berarti siklus ini tidak bisa diputus. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil misalnya, meningkatkan literasi politik dan digital. Publik harus dilatih untuk tidak reaktif terhadap algoritma media sosial yang memang dirancang untuk memancing kemarahan (*outrage*). Kesadaran bahwa trending topic sering kali adalah hasil rekayasa (*buzzer*) adalah langkah awal.

Membangun politik solidaritas (Interseksionalitas), yakni gerakan sosial harus mulai mencari titik temu. Buruh, mahasiswa, kelompok perempuan, dan minoritas harus menyadari bahwa musuh mereka bukanlah satu sama lain, melainkan sistem oligarki yang menindas mereka semua secara ekonomi dan struktural.

Masyarakat harus terus memaksa percakapan publik kembali pada isu riil seperti harga bahan pokok, akses kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi, serta menolak terjebak dalam perdebatan identitas yang tidak berkesudahan. Selama kita masih melihat sesama warga negara yang berbeda pilihan atau identitas sebagai musuh, kita hanya sedang mengulangi sejarah, menjadi pion sukarela dari strategi *divide et impera* di abad ke-21.

■ **Rahma Noor Zakia**, Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jember.

CATATAN ATAS PUTUSAN MK TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL

SIAPA MENGISI JEDA DEMOKRASI LOKAL?

Oleh: **Rikza Anung Andita Putra**

Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, perhatian publik lebih banyak tertuju pada perubahan desain keserentakan pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah. Perdebatan berkembang mengenai jadwal penyelenggaraan pemilu, hubungan antara pemilu nasional dan pemilu daerah, hingga implikasinya terhadap sistem kepemiluan Indonesia. Namun ada satu pertanyaan yang justru belum banyak dibicarakan, yaitu siapa yang akan memimpin daerah ketika masa jabatan kepala daerah berakhir sementara pemilihan kepala daerah berikutnya belum dilaksanakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Hukum positif Indonesia pun belum menghadirkan desain pemerintahan transisi yang utuh untuk menjembatani jeda antara berakhirnya masa jabatan kepala daerah dengan pelaksanaan pemilihan berikutnya. Di situlah persoalan konstitusional mulai muncul.

Sekilas persoalan ini tampak administratif. Seolah hanya menyangkut siapa yang akan menandatangani keputusan atau menjalankan roda pemerintahan untuk sementara waktu. Padahal yang dipertaruhkan jauh

lebih mendasar. Selama lebih dari dua dekade Reformasi, pemerintahan daerah dibangun di atas satu prinsip bahwa gubernur, bupati, dan wali kota memperoleh legitimasi melalui pemilihan yang demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Karena itu, setiap perubahan terhadap siklus kepemimpinan daerah semestinya juga diikuti dengan kejelasan mengenai sumber legitimasi pemerintahan selama masa transisi.

Sampai hari ini terdapat beberapa kemungkinan yang dapat ditempuh. Masa jabatan kepala daerah dapat diperpanjang melalui perubahan regulasi. Pemerintahan transisi dapat dijalankan melalui mekanisme suksesi tertentu. Negara juga dapat membentuk model *caretaker government* yang baru. Pilihan lainnya adalah kembali menggunakan mekanisme Penjabat Kepala Daerah, sebagaimana pernah diterapkan pada masa transisi sebelumnya. Semua alternatif tersebut masih terbuka. Namun justru karena belum ada desain yang pasti, pembahasan mengenai implikasi konstitusionalnya menjadi penting dilakukan sejak sekarang.

Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa mekanisme Penjabat Kepala Daerah menjadi instrumen yang digunakan negara untuk mengisi kekosongan jabatan. Mekanisme tersebut memang menjamin pemerintahan tetap berjalan. Akan tetapi, apabila skema yang sama kembali dipilih sebagai konsekuensi desain baru pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, muncul pertanyaan yang mendasar. Apakah Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk mengatur pemerintahan transisi yang berlangsung lebih panjang?

Pertanyaan tersebut penting karena keberlangsungan pemerintahan

memang tidak boleh terhenti hanya karena masa jabatan kepala daerah berakhir. Dalam hukum tata negara dikenal prinsip *constitutional continuity* yang menempatkan kesinambungan pemerintahan sebagai kebutuhan konstitusional. Namun negara demokrasi tidak hanya berbicara mengenai keberlanjutan administrasi. Demokrasi juga menuntut keberlanjutan legitimasi politik. Pemerintahan boleh terus berjalan, tetapi sumber kewenangan pemerintahan tetap harus memperoleh dasar legitimasi yang jelas.

Jika Penjabat Kepala Daerah kembali menjadi pilihan, daerah memang tidak mengalami kekosongan pemerintahan. Namun kepala daerah yang memimpin tidak memperoleh mandat elektoral sebagaimana kepala daerah definitif. Di sinilah muncul situasi yang saya sebut sebagai *extended administrative interregnum*, yaitu suatu periode ketika pemerintahan tetap berjalan, tetapi legitimasi demokratis berada dalam posisi yang berbeda dibandingkan keadaan normal.

Apakah kondisi tersebut otomatis bertentangan dengan konstitusi? Belum tentu. Namun keadaan itu menghadirkan sejumlah pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban yang jelas. Sejauh mana kewenangan Penjabat Kepala Daerah dapat dijalankan? Apakah mereka dapat mengambil kebijakan strategis yang akan mengikat kepala daerah hasil pemilihan berikutnya? Kepada siapa mereka sesungguhnya bertanggung jawab, kepada masyarakat daerah atau kepada pemerintah pusat? Bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pejabat yang tidak lahir dari proses politik lokal? Dan bagaimana negara memastikan bahwa kebutuhan administratif tidak berkembang menjadi bentuk baru sentralisasi pemerintahan daerah?

Di titik inilah isu utamanya sebenarnya bukan mengenai figur Penjabat Kepala Daerah. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum adanya rezim hukum yang secara komprehensif mengatur pemerintahan transisi. Indonesia memang memiliki berbagai ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan. Namun sampai hari ini belum ada pengaturan yang secara utuh menjelaskan batas kewenangan, masa jabatan, mekanisme akuntabilitas, maupun hubungan antara pemerintahan transisi dengan institusi demokrasi lokal.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan pendekatan yang berbeda. Australia dan Kanada menerapkan *caretaker convention* yang membatasi pemerintah transisi hanya pada urusan rutin. Jepang mempercepat penyelenggaraan pemilu baru sehingga masa transisinya berlangsung sangat singkat. Di Amerika Serikat maupun Brasil, kekosongan jabatan umumnya diisi melalui mekanisme suksesi yang telah ditentukan konstitusi. Di berbagai negara tersebut, yang dijaga bukan hanya kesinambungan pemerintahan, melainkan juga kesinambungan legitimasi demokrasi.

Dalam perspektif hukum tata negara, persoalan ini memperlihatkan ketegangan antara *rule of law* dan *democratic legitimacy*. Negara dapat saja membentuk mekanisme yang sah untuk mengisi kekosongan jabatan. Akan tetapi, legalitas prosedural tidak otomatis menjawab persoalan legitimasi demokratis. Ronald Dworkin mengingatkan, bahwa hukum harus dibaca sebagai satu kesatuan moral yang menjaga integritas konstitusi. Sementara Pierre Rosanvallon menegaskan, bahwa legitimasi pemerintahan modern tidak hanya diukur dari efektivitas birokrasi, tetapi juga dari kedekatan dan hubungan representatif dengan masyarakat yang diperintah.

Karena itu, pembahasan mengenai siapa yang akan mengisi jeda pemerintahan daerah tidak seharusnya menunggu sampai masa transisi benar-benar terjadi. Justru sekarang merupakan momentum untuk merancang desain konstitusional yang memberikan kepastian mengenai mekanisme pengisian jabatan, pembatasan kewenangan pemerintahan transisi, serta model akuntabilitas yang tetap menghormati prinsip otonomi daerah dan kedaulatan rakyat.

Pembentukan kerangka hukum khusus mengenai pemerintahan transisi atau *Caretaker Act* menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Tujuannya bukan untuk menolak kemungkinan adanya Penjabat Kepala Daerah. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa siapa pun yang mengisi masa transisi tetap bekerja dalam batas kewenangan yang jelas, tidak mengambil kebijakan strategis yang melampaui mandatnya, serta tetap berada dalam mekanisme pengawasan yang demokratis.

Pada akhirnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mungkin telah menjawab persoalan mengenai desain keserentakan pemilu. Namun putusan tersebut juga menyisakan satu pertanyaan yang belum memperoleh jawaban, yaitu bagaimana negara akan mengelola transisi pemerintahan daerah setelah masa jabatan kepala daerah berakhir.

Yang sedang dipertaruhkan bukan semata siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Jauh lebih penting dari itu, negara perlu memastikan bahwa jeda pemerintahan tidak berubah menjadi jeda demokrasi. Sebab dalam negara hukum yang demokratis, kesinambungan pemerintahan memang harus dijaga. Namun kesinambungan itu tidak boleh dibangun dengan mengorbankan

legitimasi yang menjadi fondasi utama pemerintahan daerah sejak awal Reformasi.

■ **Rikza Anung Andita Putra**, Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

DEMOKRASI YANG TUMBUH DALAM SABA KAMPUNG KOTA

Oleh: **Safira Irawa**

Dua hari pada penghujung Februari lalu, di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, dipenuhi diskusi, lokakarya, dan pentas seni dalam Festival Saba Kampung. Warga dari berbagai kampung kota yang tengah menghadapi penggusuran dan sengketa agraria berkumpul di sana, termasuk perwakilan dari Padarincang dan Dago Elos.

Empat bulan kemudian, tepatnya pada 29 Juni 2026, jaringan warga yang sama kembali berkumpul. Kali ini bertempat di depan Balai Kota Jakarta. Mereka menuntut kejelasan hak atas ruang hidup, pendidikan, dan mata pencaharian.

Sebagai bagian dari pers mahasiswa yang ikut mengawal, kedua peristiwa tersebut menjadi ruang belajar yang menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya hadir dalam pemilihan umum (pemilu). Demokrasi juga hidup dalam pertemuan-pertemuan warga, ruang dialog, penyusunan gagasan bersama, hingga aksi kolektif untuk memperjuangkan hak-hak yang belum terpenuhi.

Pada dasarnya, demokrasi berangkat dari pengakuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, konsep tersebut berakar pada tradisi musyawarah dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat (Hanafi, 2016).

Praktik 'saba', tradisi Betawi saling mengunjungi antar wilayah yang dihidupkan kembali oleh warga kampung kota, adalah salah satu contoh bagaimana nilai-nilai demokrasi tumbuh sejalan dengan semangat itu.

Menariknya, tidak ada satu kampung yang datang hanya membawa masalahnya sendiri. Pengalaman setiap kampung justru dipertemukan untuk menemukan pola persoalan yang sama (Syifa, 2026). Dari sanalah solidaritas tercipta lewat kemampuan warga membangun kepentingan bersama melalui pengalaman yang berbeda-beda.

Tuntutan yang diperjuangkan warga pun merupakan hak-hak paling mendasar. Hak atas ruang hidup, pendidikan, dan pekerjaan seharusnya melekat pada setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ironisnya, banyak anak dari keluarga kampung kota tidak terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan karena data kependudukan mereka belum tercatat di kelurahan setempat (Alwi, 2026).

Lebih lagi, banyak warga mengaku hanya didatangi ketika masa kampanye berlangsung, tetapi kembali diabaikan setelah hasil pemilu ditetapkan. Partisipasi warga seolah hanya bernilai ketika suara mereka dibutuhkan untuk memenangkan pertarungan politik. Di sini kualitas demokrasi patut dipertanyakan.

Padahal, kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji kampanye semata, melainkan melalui konsistensi pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga setelah pemilu usai. Ketika berbagai persoalan dasar terus berlarut tanpa penyelesaian, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi perlahan akan terkikis. Demokrasi kehilangan maknanya apabila partisipasi warga berhenti di bilik suara.

Hal tersebut terlihat dalam aksi di Balai Kota Jakarta. Sebelum

menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, warga terlebih dahulu menyusun risalah kebijakan yang memuat persoalan hunian, pendidikan, hingga kondisi ekonomi mereka. Aspirasi yang disampaikan disusun berdasarkan pengalaman lapangan, data, dan kebutuhan nyata masyarakat. Langkah tersebut memperkuat posisi tawar warga dalam proses audiensi karena tuntutan yang diajukan memiliki dasar yang jelas.

Di sinilah media memiliki peran penting. Liputan yang berimbang bukan sekadar menyampaikan bahwa sebuah aksi berlangsung, tetapi juga menjelaskan mengapa aksi tersebut dilakukan, bagaimana prosesnya, dan persoalan apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan. Media berfungsi sebagai penyambung suara publik sekaligus pengawas terhadap komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai tuntutan masyarakat.

Meskipun tidak memiliki kewenangan politik, pers mahasiswa memiliki tugas untuk mendokumentasikan berbagai persoalan di luar kampus yang kerap luput dari perhatian media arus utama. Melalui liputan mengenai Festival Saba Kampung maupun aksi warga di Balai Kota, mereka turut menghadirkan konteks mengenai problematika yang melatarbelakanginya.

Kerja jurnalistik itu sendiri merupakan bagian dari pendidikan demokrasi. Proses mencari data, memverifikasi informasi, mewawancarai berbagai narasumber, hingga menyusun laporan secara berimbang mengajarkan bahwa setiap informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan.

Peran tersebut semakin penting di tengah perkembangan demokrasi digital. Kemudahan menyebarkan informasi melalui media sosial membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, namun di lain sisi ikut menghadirkan tantangan berupa hoaks sampai disinformasi, serta potongan informasi tanpa konteks.

Oleh karena itu, selain menuntut kebebasan berekspresi, diperlukan tanggung jawab dalam menggunakan ruang publik digital. Kemampuan memverifikasi informasi, memeriksa sumber berita, serta membedakan fakta dan opini menjadi bagian dari praktik demokrasi yang tidak kalah penting dibandingkan menggunakan hak pilih dalam pemilu. Tanpa budaya literasi digital, ruang akan dipenuhi informasi yang menyesatkan dan berpotensi menggerus kualitas pengambilan keputusan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pers mahasiswa berperan menyajikan informasi yang akurat. Dengan pemberitaan berbasis data dan praktik cek fakta, mereka ikut mendorong masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima.

Pengalaman mengawal isu-isu ini selama beberapa bulan terakhir membuka pandangan baru kalau demokrasi tidak berhenti pada aksi di jalan atau pemilu lima tahunan. Ia tumbuh ketika warga bersedia duduk bersama, menyusun data, mengawasi kebijakan, dan terus menagih janji yang telah dibuat pemerintah.

Festival Saba Kampung, aksi di Balai Kota, hingga rencana audiensi lanjutan pada 13 Juli 2026 memperlihatkan bahwa ruang dialog patut untuk dijaga. Sebab demokrasi bukan hanya soal siapa yang memegang kekuasaan, melainkan bagaimana kekuasaan terus diawasi oleh warga negara.

Syahdan, tindakan demokratis tidak selalu berwujud dengan aksi demonstrasi besar. Itu bisa dimulai dari kebiasaan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, keberanian mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, hingga ketekunan mendokumentasikan permasalahan di sekitar secara akurat. Dari kampung kota, bilik redaksi pers mahasiswa, hingga ruang digital, praktik demokrasi sehari-hari harus terus dirawat bersama.

■ **Safira Irawa**, Mahasiswa Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktika.

DEMOKRASI DIMULAI DARI CARA KITA BERMEDIA SOSIAL

Oleh: **Shovi Yasmin**

Akademi Demokrasi memberikan pemahaman baru bagi saya bahwa demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui cara masyarakat berpartisipasi, menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, serta menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab.

Salah satu materi yang paling berkesan bagi saya adalah pembahasan tentang demokrasi di ruang digital dan keterampilan demokratis. Materi tersebut membuka perspektif saya bahwa media sosial menjadi ruang publik yang memiliki pengaruh besar terhadap demokrasi. Saya menyadari bahwa saat ini media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda (Gen-Z).

Informasi mengenai kebijakan pemerintah, isu sosial, maupun berbagai peristiwa penting dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform digital, seperti platform Instagram dan X (Twitter). Sebelum mengikuti pelatihan ini, saya menganggap media sosial hanya sebagai tempat memperoleh informasi dan hiburan saja. Namun, saya kemudian memahami bahwa media sosial juga menjadi ruang partisipasi politik

yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, hingga berpartisipasi dalam dukungan terhadap suatu gerakan sosial. Hal tersebut, menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memperluas kesempatan warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Selain itu, saya juga menyadari bahwa ruang digital menghadirkan tantangan yang tidak sedikit, bahwa informasi menyebar dengan cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Saya melihat ada sebagian masyarakat yang mempercayai suatu informasi hanya karena banyak dibagikan atau berasal dari akun yang memiliki banyak pengikut (*followers*). Padahal, informasi tersebut belum tentu benar.

Disinformasi maupun potongan informasi yang tidak secara utuh dapat membentuk opini masyarakat yang keliru atau salah, yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, saya belajar menjadi warga digital yang baik tidak cukup hanya aktif menyampaikan pendapat, tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis sebelum menerima maupun menyebarkan suatu informasi.

Selain itu, materi mengenai analisis informasi dan pengambilan keputusan berbasis data juga memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Selama ini saya sering melihat perdebatan di media sosial yang didasarkan pada opini pribadi tanpa didukung oleh data yang valid. Bahwa dalam demokrasi, setiap argumentasi seharusnya dibangun berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan data dapat membantu masyarakat memahami suatu persoalan secara lebih objektif serta menilai apakah suatu kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan kemampuan membaca data secara kritis, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan ataupun klaim yang tidak memiliki dasar yang kuat. Saya memperoleh pemahaman bahwa demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, melainkan juga mengenai tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.

Di media sosial sering kali saya menemukan perbedaan pandangan atau opini yang berubah menjadi saling menghina atau menyerang pribadi seseorang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mampu membedakan kritik terhadap suatu gagasan dengan serangan terhadap individu. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan pendapat orang lain dan menyampaikan argumentasi secara santun dan berbasis data.

Sebagai mahasiswa hukum, materi dalam Akademi Demokrasi semakin memperkuat keyakinan saya bahwa menjaga demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga negara, tetapi masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan publik, menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, serta menjaga ruang publik agar tetap sehat.

Partisipasi tersebut tidak selalu diwujudkan melalui kegiatan politik yang besar. Tindakan sederhana seperti memverifikasi informasi sebelum membagikannya, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta memberikan kritik yang membangun juga merupakan bentuk partisipasi demokratis yang sehat. Melalui materi-materi itu, saya merefleksikan kebiasaan menggunakan media sosial dalam membagikan suatu informasi hanya karena judulnya menarik tanpa membaca isi berita secara menyeluruh.

Setelah mengikuti Akademi Demokrasi, saya mulai membiasakan diri membaca informasi secara utuh, memeriksa sumbernya, serta membandingkan dengan sumber lain yang lebih kredibel sebelum membagikannya. Saya juga lebih berhati-hati ketika memberikan komentar agar tidak memperkeruh perdebatan di ruang digital. Meskipun terlihat sederhana, saya percaya bahwa perubahan kebiasaan tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi kecil dalam menjaga kualitas demokrasi.

Saya juga ingin terus meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menyusun argumentasi berdasarkan data, serta menyampaikan pendapat secara logis dan bertanggung jawab. Menurut saya, demokrasi yang berkualitas tidak hanya bergantung pada sistem politik yang baik, tetapi juga pada kualitas warga negaranya.

Melalui Akademi Demokrasi, saya belajar bahwa demokrasi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi dimulai dari tindakan sederhana, seperti menghormati perbedaan pendapat, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menyampaikan kritik secara santun, serta berani berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai yang saya pelajari dalam pelatihan Akademi Demokrasi dapat saya terapkan agar saya dapat menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjaga serta memperkuat demokrasi Indonesia.

■ **Shovi Yasmin**, Mahasiswa Universitas Indonesia (UI)

MASALAH DEMOKRASI DAN GEJALA NO VIRAL NO JUSTICE

Oleh: **Wildan Irsyad**

Definisi demokrasi sebagai dua suku kata dalam bahasa Yunani, yakni “*demos*” (rakyat) dan “*kratos*” (kekuasaan), telah melahirkan rumusan penerapan baru dalam perkembangan politik bernegara. Nilai etimologis tersebut belum menjelaskan bagaimana penerapan dari kekuasaan yang terlegitimasi, sehingga menjadi akar yang melahirkan berbagai konsep demokrasi baru.

The Federalist Papers adalah salah satu bentuk konsep demokrasi. Pemaknaan demokrasi yang kemudian banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat kini adalah definisi yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat ke-16 pada tahun 1863, Abraham Lincoln yaitu “*Government of the people, by the people, for the people*” atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Frasa “dari rakyat” menegaskan sumber legitimasi kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Sementara “oleh rakyat” menuntut pembentukan pemerintahan dibentuk melalui partisipasi oleh rakyat. Adapun makna kata “untuk rakyat” adalah tolak ukur utama seluruh kebijakan pemerintahan tidak lain dan tidak bukan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya melayani segelintir elite.

Penempatan rakyat sebagai hulu legitimasi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagai hilir demokrasi telah menjadi nilai dasar dalam penyelenggaraan sistem demokrasi bernegara. Dalam praktiknya, setiap negara yang kemudian menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan selalu melahirkan mekanisme yang berbeda. Menurut *Peter A. Hall dan Rosemary C. R. Taylor (1996)* dalam *Political Science and The Three New Institutionalisms*, institusi sebuah negara terbentuk atas proses sejarah yang telah dilalui sebagai instrumen penyelesaian masalah di masa lampau.

Institusi bersifat mengikat pada aktor-aktor politik negara, melalui aturan formal maupun informal yang kemudian membentuk batasan-batasan perilaku politik dari para aktor dalam menjalankan perannya. Dari institusi itu lahir perilaku politik sebagai upaya patuh kepada batasan-batasan yang ditetapkan oleh institusi (*Institutional Constraint*). Ketika institusi yang telah ada terus berjalan bahkan diperkuat melalui praktik politik waktu ke waktu, maka terbentuklah *Path Dependence*, yaitu kondisi ketika pilihan institusional hari ini dipengaruhi oleh pilihan institusional di masa lampau.

Demokrasi di Amerika Serikat sebagai negara dengan julukan "*The World's Oldest Continuous Democracy*" telah menjadi *American Ethos*, sebuah nilai yang telah dianut oleh masyarakatnya. Amerika Serikat menggunakan mekanisme penerapan berupa demokrasi representasi (*Representative Democracy*), masyarakat menjalankan sistem demokrasi secara tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih untuk menjalankan peran dalam pemerintahan sebagai legislasi.

Dalam sistem pemilihan presiden, Amerika Serikat memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan banyak negara demokrasi lainnya. Rakyat tidak memilih presiden secara langsung, melainkan memilih elektoral di tingkat negara bagian sebagai bentuk representasi suara rakyat.

Dari segi perhitungan, mayoritas negara bagian (48 negara bagian + District of Columbia) menggunakan sistem *Winner-Take-All*. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak (pluralitas) di suatu negara bagian akan mendapatkan seluruh suara elektoral dari negara bagian tersebut, meskipun selisih kemenangannya sangat tipis. Suara yang diberikan kepada kandidat lain di negara bagian itu tidak menghasilkan suara elektoral sama sekali.

Dengan mekanisme ini, seorang kandidat bisa mendapatkan 0 suara elektoral dari suatu negara bagian meskipun memperoleh sebagian suara rakyat disana, sementara kandidat lain mendapatkan 100% suara elektoral negara bagian tersebut. Akibatnya, seorang kandidat bisa unggul jauh dalam popular vote nasional, tetapi tetap kalah dalam *Electoral College*, atau sebaliknya.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang banyak melewati sejarah dari masa orde lama, orde baru, reformasi, hingga saat ini. Dan memang, penerapan sistem demokrasi langsung membawa asas partisipasi bermakna dan kesetaraan suara sebagai implementasi pemilihan secara langsung. Namun dalam penerapannya makna demokrasi yang seharusnya berangkat dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat mulai bergeser menjadi dari kelompok elite, dijalankan oleh pihak yang ditunjuk untuk kemudian melanggengkan monopoli oligarki.

Munculnya tagar *No Viral No Justice* adalah bentuk nyata bagaimana pemerintah enggan melayani rakyat sebelum sebuah permasalahan dianggap terlalu berisik hingga merusak citra atau mengusik. Akhirnya, kesejahteraan rakyat seolah bukan lagi tujuan dari pemberian legitimasi, padahal hal tersebut merupakan hilir dari demokrasi. Untuk itu, kesadaran kolektif perlu dibangun sebagai upaya merawat ekosistem perpolitikan di negara ini sehingga di kemudian hari wewenang negara tidak jatuh ke tangan segelintir elite. Misalnya melalui diskusi dan tukar pikiran perlu dilestarikan agar masyarakat sadar bahwa hak mereka bukan sekadar untuk bersuara.

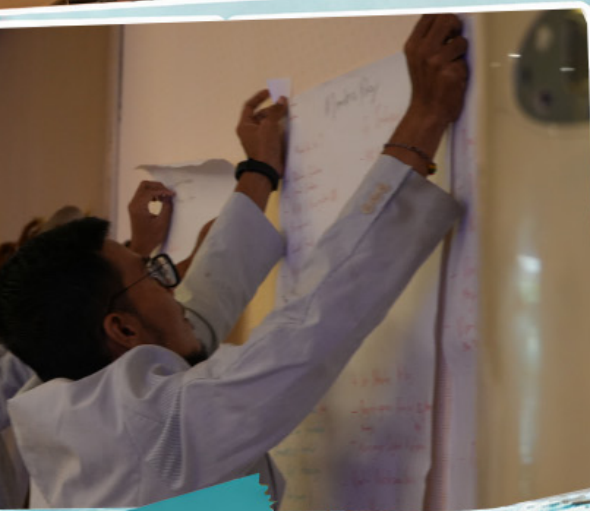
Suara rakyat yang selalu dianggap penting ketika proses kampanye, bukan lantas dianggap sebagai hal yang tidak berguna ketika sudah duduk dalam kekuasaan. Jika suara rakyat hanya dilihat sebagai seremonial semata, maka kesejahteraan hanyalah mimpi di siang bolong.

■ **Wildan Irsyad**, Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)



AKADEMI DEMOKRASI GURU





BELAJAR DEMOKRASI DENGAN MEMPRAKTIKKAN DEMOKRASI

Oleh: **Eva Wira**

Demokrasi sering kali dikaitkan dengan pemilihan umum dan persaingan politik. Sebelum mengikuti Akademi Demokrasi Perludem, sebagian besar orang biasanya beranggapan bahwa demokrasi pada dasarnya adalah tentang memilih pemimpin melalui proses pemilihan. Perlu disadari bahwa demokrasi mencakup lebih dari sekadar pemungutan suara. Demokrasi adalah cara hidup yang mengedepankan kebebasan, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, penghormatan terhadap keberagaman, dan perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai ini tidak boleh hanya tertuang dalam undang-undang dan lembaga pemerintah. Nilai-nilai tersebut juga harus menjadi bagian dari perilaku kita sehari-hari sebagai warga negara. Pengalaman ini mengubah pandangan kita mengenai pentingnya mempraktikkan demokrasi setiap hari terutama di era digital saat ini.

Salah satu pelajaran paling berharga dari akademi ini adalah prinsip “Belajar demokrasi dengan mempraktikkan demokrasi.” Demokrasi tidak dapat dipahami hanya melalui buku teks di kelas; sebaliknya, demokrasi harus dipraktikkan melalui diskusi, kolaborasi, sikap saling menghormati, dan partisipasi yang bertanggung jawab. Selama mengikuti akademi,

kita belajar menyampaikan pendapat sama pentingnya dengan mendengarkan berbagai sudut pandang.

Setiap individu memiliki hak yang setara, tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, status sosial, atau afiliasi politik. Hak asasi manusia bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah, melainkan hak dasar yang melekat pada setiap orang sejak lahir. Oleh karena itu, pemerintah memikul tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut melalui hukum yang adil dan lembaga-lembaga demokratis. Tanpa perlindungan hak asasi manusia, demokrasi kehilangan maknanya, karena warga negara tidak dapat secara bebas menyampaikan gagasan atau berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Topik penting lainnya yang dibahas adalah pengambilan keputusan secara demokratis. Keputusan demokratis tidak ditentukan semata-mata oleh suara mayoritas; sebaliknya, keputusan tersebut harus melibatkan partisipasi publik, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menyumbangkan gagasan sebelum keputusan diambil.

Kita menyadari bahwa partisipasi demokratis tidak boleh berhenti begitu pemilihan umum usai, karena warga negara juga memikul tanggung jawab untuk memantau kinerja pemerintah dan memberikan kritik yang membangun bila diperlukan. Diskusi mengenai pemilihan umum juga mengubah pemahaman kita tentang representasi. Pemilu bukan sekadar persaingan antar-kandidat politik, pemilu merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa suara warga negara terwakili dalam pemerintahan.

Sebagai warga negara muda, kita harus menolak praktik-praktik politik yang tidak sehat ini dan memperjuangkan pemilu yang berintegritas, kompetensi, serta kepentingan publik, alih-alih demi keuntungan pribadi. Pelajaran lain yang berkesan bagi kita adalah diskusi mengenai peran organisasi masyarakat sipil. Demokrasi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada lembaga pemerintah, warga negara juga membutuhkan organisasi yang memantau kebijakan publik, memperjuangkan hak-hak kelompok marginal, dan mendorong partisipasi publik.

Organisasi masyarakat sipil memainkan peran vital dalam memperkuat akuntabilitas dengan memastikan pemerintah tetap transparan dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Organisasi-organisasi ini juga mengedukasi warga negara mengenai hak dan tanggung jawab mereka, sehingga menjadikan demokrasi lebih inklusif dan partisipatif. Selain itu, tak kalah penting juga media sebagai pilar keempat demokrasi. Jurnalisme independen membantu masyarakat mengakses informasi yang akurat dan memantau kinerja pejabat publik.

Saat ini, siapa pun dapat membuat dan menyebarkan informasi melalui platform media sosial dalam hitungan detik. Meskipun hal ini meningkatkan partisipasi publik, situasi tersebut juga menghadirkan tantangan baru, karena misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan propaganda dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan informasi yang telah terverifikasi (Bulya & Izzati, 2024).

Akibatnya, literasi digital muncul sebagai salah satu kompetensi demokratis paling penting di abad ke-21. Literasi ini melampaui sekadar keterampilan teknis; ia mencakup kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, memverifikasi sumber, melindungi data pribadi,

dan berperilaku secara etis di dunia maya. Warga negara dengan kemampuan literasi digital yang kuat lebih terlindungi dari risiko menjadi korban misinformasi dan lebih mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam diskursus demokrasi. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penguatan literasi digital memperkuat ketahanan demokrasi dengan memitigasi pengaruh informasi palsu dan mendorong partisipasi publik yang berlandaskan data akurat (Helsyanto & Puspitasari, 2025).

Demokrasi di era digital juga sangat erat kaitannya dengan kemajuan Kecerdasan Buatan (AI). AI menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan layanan publik, memperluas akses informasi, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Namun, teknologi juga menghadirkan risiko signifikan karena dapat digunakan untuk membuat *deepfake*, gambar yang dimanipulasi, propaganda otomatis, dan pesan politik yang menyesatkan.

Jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, teknologi-teknologi ini berpotensi memengaruhi opini publik dan mengikis kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah, perusahaan teknologi, institusi pendidikan, dan warga negara harus berkolaborasi untuk mendorong penggunaan AI yang etis sembari memperkuat literasi digital dan keterampilan verifikasi fakta sebelum informasi disebarluaskan secara daring (Nasuha, 2025).

Salah satu aspek paling menginspirasi dari Akademi Demokrasi Perludem adalah pengakuan akan peran strategis kaum muda dalam menegakkan demokrasi. Banyak orang beranggapan bahwa demokrasi semata-mata merupakan tanggung jawab politisi atau pejabat pemerintah. Namun, akademi ini menunjukkan bahwa demokrasi bergantung pada partisipasi

aktif warga biasa. Kaum muda dapat berkontribusi dengan bergabung dalam organisasi masyarakat sipil, terlibat dalam diskursus publik, menjadi sukarelawan untuk program sosial, serta mempromosikan toleransi dan transparansi di lingkungan mereka. Bahkan tindakan sederhana seperti menghargai berbagai pendapat atau melaporkan informasi yang keliru merupakan kontribusi bermakna bagi kehidupan demokrasi.

Akademi ini juga menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai demokrasi di dalam institusi pendidikan. Sekolah dan universitas tidak boleh hanya mengajarkan teori demokrasi, mereka harus memberikan kesempatan kepada siswa dan mahasiswa untuk mempraktikkan demokrasi secara langsung. Kegiatan seperti diskusi kelas, debat, pemilihan pengurus organisasi siswa/mahasiswa, proyek kolaboratif, dan pengabdian masyarakat dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, empati, dan rasa tanggung jawab.

Pengalaman-pengalaman ini mempersiapkan kaum muda menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang memahami hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat demokratis. Secara pribadi, pengalaman belajar ini mendorong kita untuk merefleksikan perilaku kita sendiri sebagai warga negara.

Sebagai pengguna aktif media sosial, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, mendorong dialog yang saling menghargai, dan berkontribusi secara positif terhadap lingkungan digital. Demokrasi akan tetap kokoh hanya jika warga negara secara konsisten mempraktikkan nilai-nilai demokrasi, baik di dunia nyata maupun di ranah digital. Penghormatan terhadap keberagaman menjadi salah satu fondasi terkuat bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Akademi ini menginspirasi kita untuk menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab seseorang yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip demokrasi tetapi juga menerapkannya dalam keseharian. Kedepannya, kita berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, menyebarkan informasi yang akurat, menghormati ragam pendapat, serta mendorong orang lain untuk mempraktikkan demokrasi melalui tindakan nyata.

■ **Eva Wira**, Guru Pendidikan Pancasila di SMAN 22 Jakarta.

DEMOKRASI INTERNAL PARTAI KUNCI KUALITAS DEMOKRASI

Oleh: **Robi Kurniawan**

Pemahaman terkait demokrasi sering dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam pelaksanaannya, kedaulatan tersebut diwujudkan melalui mekanisme demokrasi perwakilan (representatif), yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menyusun kebijakan, membuat peraturan, serta menjalankan pemerintahan. Di dalam sistem tersebut, partai politik memiliki posisi sangat penting dan strategis karena menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat dengan negara sebagai penjaga kepentingan nasional. Oleh sebab itu, kualitas demokrasi suatu negara sangat tergantung dari kualitas partai politik yang dimilikinya.

Materi mengenai partai politik memberikan pemahaman bahwa keberadaan partai bukan sekadar sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan. Partai politik memiliki fungsi yang jauh lebih luas, yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat, mengagregasikan berbagai kepentingan yang berbeda, melaksanakan pendidikan politik, merekrut calon pemimpin, serta menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Dengan demikian, partai politik merupakan aktor demokrasi yang memungkinkan demokrasi berjalan secara efektif di tengah

masyarakat yang memiliki latar belakang, kebutuhan, dan kepentingan yang beragam.

Namun, realitas yang berkembang menunjukkan bahwa citra partai politik di mata masyarakat masih jauh panggang dari api, dan ini merupakan tantangan yang perlu dijawab oleh partai politik. Tidak sedikit masyarakat yang memandang partai politik hanya aktif ketika mendekati pemilu. Selain itu, masih sering ditemukan praktik politik yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan publik, sirkulasi elit yang tidak mendorong regenerasi. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan melemahkan partisipasi politik warga negara.

Menurut saya, salah satu penyebab utama rendahnya kepercayaan masyarakat adalah belum optimalnya demokrasi internal partai politik. Demokrasi seharusnya tidak hanya diterapkan dalam proses pemilihan umum, tetapi juga dalam tata kelola organisasi partai. Rekrutmen calon pemimpin hendaknya dilakukan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan kompetensi, bukan semata-mata karena kedekatan personal, hubungan kekeluargaan, ataupun kekuatan modal. Apabila proses rekrutmen dilakukan secara meritokrasi, partai akan menghasilkan kader-kader berkualitas yang memiliki integritas, kapabilitas, dan komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, peran partai politik sebagai pendidikan politik juga perlu menjadi perhatian utama. Selama ini pendidikan politik seringkali

dipahami sebatas kegiatan kampanye atau sosialisasi menjelang pemilu dengan pemasangan spanduk yang begitu mencolok di berbagai sudut jalan atau tempat, iklan berkali kali muncul dalam media elektronik atau media sosial. Padahal, pendidikan politik merupakan proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat agar mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat yang memiliki pengetahuan politik yang baik akan lebih kritis dalam memilih pemimpin, lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan, dan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya.

Sebagai seorang pendidik, saya melihat bahwa sekolah memiliki peran dalam membangun budaya demokrasi sejak dini. Pendidikan demokrasi tidak cukup hanya disampaikan melalui teori di dalam kelas, tetapi juga perlu diwujudkan melalui praktik nyata. Misalnya, pemilihan ketua OSIS dilakukan secara langsung, jujur, dan adil; penyusunan aturan kelas yang sering disebut sebagai kesepakatan kelas melibatkan seluruh peserta didik; serta pembelajaran memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab tanpa ada rasa takut untuk berpendapat. Pengalaman-pengalaman tersebut akan sendirinya membentuk karakter demokratis yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan untuk implementasi nilai-nilai demokratis yang dapat dilakukan adalah memperkuat budaya dialog dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Demokrasi bukan hanya tentang menang dan kalah melalui

pemungutan suara, tetapi juga tentang kemampuan menghargai perbedaan pendapat serta mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan bersama, serta menerima keputusan bersama dan mewujudkannya untuk menuju tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap individu perlu membiasakan diri untuk mendengarkan pendapat orang lain, memberikan argumentasi secara rasional, dan menerima hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab.

Di lingkungan sekolah, tindakan demokratis dapat diwujudkan melalui forum diskusi, musyawarah kelas, debat ilmiah, maupun kegiatan organisasi siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis sekaligus menghargai keberagaman pandangan. Sementara itu, di lingkungan masyarakat, budaya demokrasi dapat diperkuat melalui partisipasi aktif dalam musyawarah warga, kegiatan organisasi kemasyarakatan, maupun penyampaian aspirasi kepada pemerintah secara santun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di era digital, tindakan demokratis juga harus diwujudkan dalam penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi seringkali disertai dengan meningkatnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan literasi digital agar mampu memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Sikap kritis terhadap informasi merupakan bagian penting dari perilaku demokratis karena keputusan politik yang baik harus didasarkan pada informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilu yang dilaksanakan secara berkala, tetapi juga oleh kualitas institusi politik dan kualitas warga negaranya. Partai politik yang demokratis akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, sementara masyarakat yang memiliki literasi politik yang baik akan mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara konstruktif. Hubungan yang sehat antara partai politik, pemerintah, dan masyarakat akan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sebagai warga negara sekaligus pendidik, saya meyakini bahwa tindakan demokratis harus dimulai dari lingkungan terdekat. Menghargai pendapat orang lain, membangun budaya musyawarah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menggunakan media digital secara bertanggung jawab, serta memberikan pendidikan politik kepada generasi muda merupakan langkah-langkah sederhana yang memiliki dampak besar terhadap penguatan demokrasi.

Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi konsep yang dipelajari di dalam buku, tetapi benar-benar menjadi budaya yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Apabila setiap individu mampu menjalankan perannya secara bertanggung jawab, maka cita-cita mewujudkan demokrasi yang berkualitas, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat akan semakin mudah untuk dicapai.

■ **Robi Kurniawan**, Guru Pendidikan Pancasila SMA Yasporbi Jakarta.

GURU SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM LITERASI DEMOKRASI

Oleh: **Tri Gayuh Waluyati**

Menurut saya, pahlawan pendidikan memiliki peranan penting membentuk pikiran dan masa depan siswa. Pahlawan datang berbagai bentuk, mulai dari guru berusaha lebih keras untuk menginspirasi peserta didik, hingga administrator dan agen perubahan yang bekerja tanpa lelah menciptakan lingkungan belajar aman dan inklusif. Guru memainkan peran penting membentuk masa depan para pelajar muda dengan terlibat dalam pembelajaran timbal balik dan membantu siswa mengkritik asumsi serta mempertimbangkan alternatif.

Guru adalah motor utama penggerak transformasi karakter. Dalam literasi demokrasi dan kebhinekaan, peran guru sebagai agen perubahan sangat vital untuk menciptakan ruang kelas yang inklusif, kritis, dan menghargai perbedaan, guna mencetak generasi penerus bangsa yang toleran.

Menurut saya, peran guru sebagai agen perubahan dapat dilakukan melalui dua aspek penting. Aspek pertama adalah membangun literasi demokrasi di ruang kelas. Guru tidak hanya mengajarkan teori tentang demokrasi atau sistem pemerintahan, tetapi juga menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam proses belajar mengajar. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang terbuka sehingga setiap peserta didik berani

menyampaikan pendapat, bertanya, dan memberikan masukan tanpa takut disalahkan. Dengan begitu, peserta didik belajar bahwa setiap orang berhak didengar dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar.

Dalam pembelajaran, guru juga dapat menggunakan metode diskusi, debat, musyawarah, dan pemecahan masalah secara bersama-sama. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik belajar menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, dan mengambil keputusan secara demokratis. Selain itu, guru perlu membimbing peserta didik agar mampu memeriksa kebenaran informasi yang mereka terima, terutama dari media sosial. Kemampuan berpikir kritis ini penting agar mereka tidak mudah percaya pada berita bohong dan dapat menggunakan media digital secara bijak.

Sebagai guru Bahasa Indonesia, saya menerapkan nilai-nilai demokrasi tersebut dalam berbagai materi pembelajaran. Pada kelas X Fase E, misalnya, materi teks laporan hasil observasi saya kaitkan dengan praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik melakukan observasi sederhana, seperti mengamati pelaksanaan pemilu atau bentuk-bentuk demokrasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, kemudian menyusun laporan berdasarkan hasil pengamatan.

Pada materi teks negosiasi, peserta didik belajar menyelesaikan perbedaan pendapat melalui dialog dan musyawarah. Mereka berlatih membuat teks negosiasi berdasarkan masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan simulasi musyawarah untuk menyusun program kerja suatu organisasi atau membahas sebuah kebijakan. Pada materi advokasi kebijakan publik, peserta didik

menyusun naskah advokasi sederhana tentang suatu isu dan melakukan permainan peran sebagai pemerintah atau organisasi masyarakat. Melalui kegiatan ini, mereka belajar menyampaikan pendapat secara santun dan berdasarkan alasan yang kuat.

Sementara itu, pada kelas XI Fase F, materi teks berita saya gunakan untuk mengenalkan pentingnya perlindungan data pribadi, keterbukaan informasi publik, literasi digital, serta bahaya disinformasi. Peserta didik juga belajar tentang *citizen journalism* dan peran media sosial dalam demokrasi. Mereka didorong untuk menulis berita, artikel, atau opini yang dapat dipublikasikan di media sekolah maupun media digital. Pada materi karya ilmiah, peserta didik menulis hasil penelitian sederhana mengenai isu-isu yang sedang berkembang, seperti kecerdasan artifisial (AI), keadilan teknologi (*tech justice*), polarisasi opini, dan fenomena *echo chamber* di media sosial. Dengan cara ini, pembelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membantu peserta didik menjadi warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Aspek kedua adalah membangun sikap toleransi dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Ruang kelas merupakan miniatur masyarakat yang terdiri atas peserta didik dengan latar belakang suku, agama, budaya, maupun kondisi sosial yang beragam. Karena itu, guru memiliki peran penting sebagai penghubung yang mampu menciptakan suasana belajar yang harmonis dan saling menghargai.

Peran tersebut dimulai dari memberikan teladan kepada peserta didik. Guru harus bersikap adil, objektif, dan tidak membedakan peserta didik berdasarkan latar belakang apa pun. Sikap guru yang menghargai

setiap individu akan menjadi contoh nyata bagi peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain.

Selain menjadi teladan, guru juga perlu menumbuhkan rasa empati dan sikap inklusif. Salah satu caranya adalah dengan merancang kegiatan belajar secara berkelompok yang melibatkan peserta didik dari latar belakang yang berbeda. Melalui kegiatan tersebut, mereka dapat saling mengenal, memahami perbedaan, bekerja sama, dan membangun rasa saling memiliki sebagai bagian dari satu komunitas belajar.

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, saya juga berusaha mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kebhinekaan ke dalam materi ajar. Saya menyusun modul ajar yang selaras dengan Profil Pelajar Pancasila sekaligus mengaitkannya dengan isu-isu demokrasi yang relevan. Materi pembelajaran dapat dikembangkan melalui pembahasan mengenai sistem dan tata kelola pemilu, demokratisasi partai politik, peran teknologi digital dalam demokrasi, partisipasi warga negara, serta evaluasi lembaga penyelenggara pemilu dan penegakan hukum. Dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, termasuk materi yang dikembangkan oleh Perludem, peserta didik tidak hanya belajar keterampilan berbahasa, tetapi juga memahami pentingnya demokrasi, toleransi, dan partisipasi aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan, guru tentu menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah masih adanya bias budaya, pengaruh negatif media sosial, serta lingkungan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai demokrasi dan kebhinekaan. Kondisi ini membuat guru perlu memiliki strategi yang tepat agar pembelajaran tetap mampu membentuk karakter peserta didik.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah membangun kerja sama dengan orang tua dan pihak sekolah. Nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan saling menghargai tidak cukup diajarkan di ruang kelas, tetapi juga perlu diterapkan di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, guru dapat melibatkan orang tua dan komite sekolah dalam berbagai kegiatan sehingga pendidikan karakter yang diberikan di sekolah dapat terus diperkuat di rumah.

Selain itu, guru juga perlu terus mengembangkan kompetensinya. Mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, atau program seperti Guru Penggerak menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dalam memimpin pembelajaran, mengelola kelas yang inklusif, serta menerapkan metode belajar yang lebih kreatif dan partisipatif. Dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman, guru akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan sekaligus mampu menjadi teladan dalam membangun generasi yang demokratis, kritis, dan menghargai keberagaman.

■ **Tri Gayuh Waluyati**, Guru Bahasa Indonesia dan Sejarah SMAN 1 Babakan Madang, Kabupaten Bogor.



AKADEMI DEMOKRASI FASILITATOR





KETIKA LAYAR MENJADI ARENA: KSBE DAN UTANG KEADILAN DIGITAL BAGI PEREMPUAN POLITIK

Oleh: **Annisa Alfath**

Ada satu ilusi yang perlu kita bongkar sejak awal: bahwa ruang digital adalah ruang yang aman, netral, dan setara bagi siapa saja yang masuk ke dalamnya. Bagi perempuan yang berpolitik di Indonesia, ilusi itu runtuh setiap kali unggahan kampanye mereka dibanjiri komentar merendahkan, setiap kali wajah mereka ditempel di meme bernuansa seksual, atau setiap kali pesan pribadi berisi ancaman masuk ke telepon genggam mereka tanpa mereka minta. Inilah yang secara hukum di Indonesia disebut Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), kekerasan bermuatan seksual yang dilakukan melalui atau dengan bantuan teknologi digital, dan yang kian menjadi wajah baru dari kekerasan terhadap perempuan dalam politik.

KSBE bukan sekadar “versi online” dari pelecehan yang sudah lama kita kenal. Ia punya karakter sendiri yang membuatnya lebih sulit dihentikan: terjadi lewat media sosial, aplikasi perpesanan, dan platform digital, melanggar consent dan privasi; kontennya mudah disalin, disebar ulang, dan direplikasi tanpa batas oleh siapa pun, bukan hanya pelaku awal, tidak mengenal batas ruang dan waktu karena bisa terjadi 24 jam

sehari, sementara pelakunya sering bersembunyi di balik akun anonim; dan yang paling berbahaya, kekerasan ini terus-menerus dinormalisasi, dianggap sekadar “candaan” atau “risiko bermedia sosial”.

Data yang ada sejauh ini sudah cukup untuk membuat kita berhenti dan berpikir serius. Studi SAFEnet mencatat 323 insiden serangan digital yang menyasar akun peserta Pemilu 2024, meningkat tajam dari 302 insiden pada 2022, 193 insiden pada 2021, dan 147 insiden pada 2020. Tren ini naik terus, bukan turun. Studi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) tahun 2024 menemukan bahwa 26,3 persen calon anggota legislatif perempuan mengalami langsung KSBE selama Pemilu 2024, dan hampir separuh responden (43,8 persen) pernah menyaksikan KSBE terjadi pada rekan sesama caleg. Sebanyak 75 persen mengaku kekerasan ini paling banyak muncul selama masa kampanye, sementara 46,9 persen mengalaminya sejak masa pencalonan, artinya, ancaman ini sudah menanti perempuan bahkan sebelum mereka resmi maju bertarung.

Temuan *Women Research Institute* (WRI) dalam risetnya tentang Pemilu 2024 memperkuat gambaran ini dari sisi lain: 40% pemilih mengaku pernah mendengar atau menyaksikan kekerasan terhadap kandidat perempuan, dan pelecehan verbal serta psikologis, dengan media sosial sebagai kanal utama pada separuh kasus menjadi bentuk yang paling sering dilaporkan. 82% perempuan politik menyatakan kekerasan terhadap mereka meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Namun hanya segelintir yang berani bersuara: 69% memilih diam. Pola ini konsisten dengan apa yang ditemukan pada KSBE secara khusus,

kekerasan yang tidak terlihat, namun berdampak serius, meminjam istilah SAFEnet.

Bentuknya beragam namun berulang, seperti komentar merendahkan dan lelucon seksis yang disebar untuk merusak citra, tuduhan tak berdasar yang menegaskan narasi bahwa perempuan tidak pantas berpolitik, disinformasi yang sengaja dirancang melemahkan kepercayaan pemilih, julukan-julukan merendahkan seperti “pemanis politik” atau “pelengkap kuota”, serangan terkoordinasi dari akun anonim dan bot yang menciptakan efek viral, hingga manipulasi rekaman percakapan untuk merusak kredibilitas seorang politisi perempuan. Semua ini punya satu tujuan yang sama: membungkam, mempermalukan, dan mendorong perempuan keluar dari arena publik.

Di sinilah letak persoalan yang lebih besar dari sekadar etika bermedia sosial: ini adalah persoalan keadilan teknologi (tech justice) yang belum berpihak pada perempuan. Kerangka hukum kita, UU TPKS, KUHP hasil pembaruan, dan UU ITE sesungguhnya sudah mengakui KSBE sebagai bentuk kekerasan seksual yang bisa diproses secara hukum, lengkap dengan instrumen pembuktian digital. Tapi hukum di atas kertas tidak otomatis menjadi perlindungan di lapangan. Mayoritas partai politik di Indonesia belum memiliki SOP yang jelas soal pelaporan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk yang berbasis elektronik. Tidak ada unit pengaduan independen, tidak ada satgas, dan sanksi terhadap pelaku, apalagi jika ia punya posisi strategis di partai nyaris tak terdengar. Akibatnya korban memilih diam, bukan karena tidak terluka, melainkan karena tahu suara mereka kemungkinan besar tidak akan ditindaklanjuti.

Keadilan teknologi berarti mengakui bahwa ruang digital bukan ruang hampa kekuasaan. Algoritma yang mempercepat penyebaran konten, anonimitas yang melindungi pelaku, dan lambannya respons platform terhadap laporan pelecehan, semua ini adalah pilihan desain yang

punya konsekuensi nyata bagi siapa yang merasa aman berbicara dan siapa yang memilih diam. Selama partai politik, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan platform digital belum membangun mekanisme perlindungan yang konkret dan dapat diakses, KSBE akan terus menjadi harga yang harus dibayar perempuan hanya karena mereka memutuskan untuk berpolitik.

Demokrasi yang inklusif tidak bisa dibangun di atas ruang digital yang membiarkan setengah dari populasinya dibungkam lewat layar. Jika kita ingin lebih banyak perempuan berani maju dan bertahan dalam politik, maka melindungi mereka dari KSBE bukan lagi pilihan tambahan—ia adalah syarat mutlak bagi pemilu yang benar-benar setara.

■ **Annisa Alfath**, Peneliti Perludem.

PECUNIA NON OLET DALAM DEMOKRASI

Oleh: **Ajid Fuad Muzaki**

Suatu ketika di Roma, Kaisar Vespasianus membuat keputusan yang bagi banyak orang terdengar ganjil. Ia mengenakan pajak atas urine yang dikumpulkan dari toilet umum sebagai salah satu sumber pemasukan Kekaisaran Romawi. Ketika putranya, Titus, memprotes kebijakan itu, Vespasianus hanya mengangkat sekeping uang dan bertanya apakah uang tersebut berbau? Setelah Titus menjawab tidak, sang kaisar berkata, *pecunia non olet*—"uang tidak berbau".

Ungkapan itu bertahan jauh melampaui zamannya. Ia menjadi simbol dari cara kekuasaan membenarkan dirinya sendiri. Selama sesuatu menghasilkan keuntungan, asal-usulnya dianggap tidak lagi penting. Tak ada yang terlalu kotor jika bisa dijadikan sumber laba.

Berabad-abad kemudian, Voltaire menghidupkan kembali kisah tersebut sebagai sindiran terhadap raja-raja Prancis yang gemar memungut pajak dari rakyat. Kritiknya sederhana: kekuasaan memiliki kemampuan mengubah sesuatu yang semestinya dipersoalkan menjadi sesuatu yang tampak wajar. Ia melihat bahwa kekuasaan bisa memberi nilai pada apapun, bahkan pada hal yang menjijikkan.

Logika itu ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti wajah. Ratusan tahun kemudian, dalam demokrasi modern, "uang tidak berbau" menjelma menjadi cara berpikir yang membenarkan hampir segala hal sepanjang mampu menghasilkan kemenangan politik.

Cara berpikir seperti itu rupanya tidak hanya hidup di istana atau ruang-ruang kekuasaan masa lalu. Ia terus muncul dalam berbagai bentuk, termasuk dalam demokrasi modern. Dalam praktik demokrasi hari ini, kemenangan politik sering kali ditentukan bukan dari gagasan dan program, tetapi juga oleh kemampuan menggerakkan sumber daya yang besar.

Ungkapan *pecunia non olet* menemukan relevansinya dalam demokrasi modern ketika biaya politik terus meningkat. Sebagaimana ditunjukkan Sri Yanuarti (2025) dalam kajian BRIN mengenai pendanaan partai politik, mahalnnya biaya kontestasi pemilu dan kebutuhan operasional partai mendorong ketergantungan pada sumber pendanaan di luar partai, termasuk korporasi dan kelompok pemilik modal. Persoalannya bukan sekadar dari mana uang itu berasal, melainkan kepentingan apa yang mengikutinya.

Di sinilah demokrasi menghadapi paradoksnya. Pemilu memang berlangsung secara bebas dan menghasilkan pemerintahan yang sah secara prosedural. Namun, legitimasi elektoral tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan publik. Jika proses menuju kemenangan dipenuhi berbagai kompromi transaksional, hasil pemilu sangat mungkin beresiko lebih banyak mencerminkan keseimbangan kepentingan para penyandang dana dan elite politik daripada aspirasi warga negara.

George J. Stigler (1971) menyebut fenomena tersebut sebagai *regulatory capture*, yakni ketika regulasi lebih banyak dibentuk untuk melayani kepentingan kelompok yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik daripada kepentingan masyarakat luas. Ernesto Dal Bó (2006) kemudian

menjelaskan, kondisi tersebut terjadi ketika regulator atau pembentuk kebijakan tidak lagi bertindak demi kepentingan publik, melainkan lebih mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang seharusnya diatur.

Dalam situasi seperti itu, regulasi yang semestinya menjadi instrumen perlindungan publik justru berpotensi berubah menjadi fasilitas yang menguntungkan segelintir pihak. Akibatnya, negara tidak lagi sepenuhnya bertindak sebagai wasit yang netral, melainkan perlahan menjadi arena tempat berbagai kepentingan privat bernegosiasi dan memenangkan pengaruhnya.

Kerentanan tersebut tercermin dalam kualitas kelembagaan parlemen. *Indonesian Parliamentary Center (IPC)* melalui Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025 memberikan skor 2,55 dari skala 5,00 (Grade C) terhadap kinerja kelembagaan DPR RI. Penilaian yang mengadopsi *Indicators for Democratic Parliaments* dari Inter-Parliamentary Union (IPU) itu menunjukkan bahwa standar parlemen demokratis di Indonesia baru terpenuhi sebagian dan masih menyisakan kelemahan mendasar. Dua aspek yang memperoleh nilai terendah adalah penggunaan hak pengawasan (skor 1,57 atau Grade D) dan pengelolaan konflik kepentingan (skor 1,88 atau Grade D). Temuan ini memperlihatkan bahwa DPR belum optimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah sekaligus belum memiliki mekanisme yang kuat untuk mencegah benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Pada aspek etika dan integritas, IPC menemukan bahwa mekanisme pencegahan dan penanganan konflik kepentingan anggota DPR masih sangat lemah. Indikator pengelolaan konflik kepentingan hanya memperoleh skor 1,88 (Grade D), menunjukkan belum adanya sistem yang efektif untuk memastikan anggota parlemen terbebas dari pengaruh kepentingan pribadi, bisnis, maupun afiliasi politik ketika menjalankan fungsi legislasi. Penegakan kode etik, keterbukaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran etik dinilai belum berjalan secara konsisten.

Kelemahan yang tidak kalah serius terlihat pada fungsi pengawasan. Penggunaan hak-hak konstitusional DPR: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, hanya memperoleh skor 1,57 (Grade D), menjadikannya indikator dengan nilai terendah dalam IKP 2025. Padahal, ketiga instrumen tersebut merupakan mekanisme utama yang dimiliki parlemen untuk mengawasi jalannya pemerintahan, meminta pertanggungjawaban eksekutif, serta menjaga prinsip *checks and balances*. Rendahnya penggunaan hak-hak tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR belum dijalankan secara maksimal.

IPC juga mencatat bahwa kualitas legislasi masih menghadapi persoalan serius. Prosedur pembentukan undang-undang hanya memperoleh skor 2,29, sementara pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang setelah disahkan mendapat skor 2,31. Temuan ini menunjukkan bahwa perhatian DPR masih lebih besar pada proses pengesahan rancangan undang-undang dibandingkan evaluasi terhadap efektivitas implementasinya. Di sisi lain, keterbukaan dokumen legislasi, seperti

naskah akademik, draft RUU, daftar inventarisasi masalah (DIM), maupun rekaman pembahasan, belum dilakukan secara konsisten sehingga membatasi kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan secara bermakna.

Persoalan serupa juga ditemukan dalam fungsi penganggaran. Meskipun DPR aktif membahas dan menyetujui APBN, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran hanya memperoleh skor 2,35. Keterbatasan akses terhadap data, kapasitas analisis, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan membuat fungsi kontrol parlemen terhadap penggunaan anggaran negara belum berjalan secara efektif.

Berbagai temuan tersebut menunjukkan persoalan demokrasi tidak berhenti pada ada atau tidaknya pemilu yang bebas. Tantangan lebih besar justru muncul setelah pemilu usai, ketika lembaga-lembaga demokrasi harus bekerja menjaga akuntabilitas kekuasaan. Parlemen semestinya menjadi institusi yang memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik. Namun, ketika fungsi pengawasan melemah dan proses legislasi berlangsung tanpa transparansi yang memadai, ruang bagi kepentingan-kepentingan sangat mungkin memengaruhi kebijakan.

Dalam konteks tersebut, sangat penting perbaikan kelembagaan demokrasi. Karena ketika partai politik dan kandidat bergantung pada sumber pendanaan yang besar, muncul hubungan timbal balik yang sulit dihindari. Kita tahu, dukungan finansial sering kali menciptakan adanya akses terhadap kebijakan, proyek pemerintah, konsesi sumber daya alam, kemudahan perizinan, atau regulasi yang menguntungkan penyandang dana.

Di sinilah logika *pecunia non olet* bekerja secara diam-diam. Uang dipandang netral, sementara konsekuensi politik yang mengikutinya seolah tidak terlihat.

Masalahnya, pengaruh tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk suap atau pelanggaran hukum yang mudah dibuktikan. Dalam banyak kasus, bentuknya jauh lebih halus. Penyandang dana memperoleh akses lebih besar kepada pembuat kebijakan, ikut memengaruhi agenda legislasi, atau memiliki kesempatan menyampaikan kepentingannya sebelum masyarakat luas mengetahui adanya suatu rancangan kebijakan.

Akibatnya, demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kualitas representasinya mengalami kemunduran. Pemilu tetap dilaksanakan, parlemen tetap bersidang, undang-undang tetap disahkan, dan pemerintahan tetap terbentuk secara konstitusional. Namun, substansi kebijakan semakin menjauh dari kepentingan publik. Demokrasi akhirnya kehilangan rohnya sebagai sistem yang menjamin kesetaraan pengaruh setiap warga negara.

Sejarah jarang mengulang peristiwa yang sama. Yang berulang adalah cara kekuasaan membenarkan dirinya. Dulu, Vespasianus meyakinkan bahwa uang tidak berbau. Kini, demokrasi kerap meyakinkan kita bahwa mahalnya biaya politik hanyalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Padahal, setiap biaya selalu menuntut imbal balik. Dan ketika imbal balik itu hadir dalam bentuk kebijakan, regulasi, atau akses terhadap kekuasaan, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan sekadar integritas politik, melainkan makna demokrasi.

■ **Ajid Fuad Muzaki**, Peneliti Perludem.

MENGAPA KITA GAGAL BERDEMOKRASI?

Oleh: **Iqbal Kholidin**

Setiap kali kontestasi politik usai dan menyisakan residu konflik, tudingan selalu diarahkan ke tempat yang sama, yaitu rendahnya pendidikan politik masyarakat. Politisi menuding rakyat yang belum dewasa dalam berkompetisi, seakan kekacauan politik semata-mata bersumber dari ketidakmatangan pemilih. Narasi ini diputar seperti kaset rusak, seakan pendidikan politik adalah satu-satunya obat yang absen dari tubuh bangsa ini.

Padahal, kalau kita membedah persoalan ini dengan jujur, diagnosis itu keliru besar. Masalah utama kita hari ini bukan minimnya pendidikan politik, melainkan lumpuhnya pendidikan demokrasi.

Dua istilah ini kerap dicampuradukkan, padahal hulu dan hilirnya berbeda. Pendidikan politik mengurus soal teknis, prosedural, dan kalkulasi kekuasaan, seperti cara memilih, memenangkan kandidat, dan memahami struktur pemerintahan. Di wilayah ini masyarakat kita sudah sangat melek, tahu cara memobilisasi massa, hafal fungsi TPS, bahkan mahir memperdebatkan elektabilitas dari warung kopi sampai media sosial. Berbeda dengan itu, pendidikan demokrasi seyogianya menyentuh perkara yang jauh lebih dalam.

John Dewey dalam *Democracy and Education* (1916) menegaskan bahwa

demokrasi bukan sekadar bentuk pemerintahan, melainkan cara hidup bersama yang harus dialami dan dipraktikkan, bukan sekadar dihafal. Celakanya, kita sering terjebak dalam ilusi bahwa kita sudah dididik menjadi warga negara yang baik. Kita merasa cukup karena sudah belasan tahun mengunyah Pendidikan Pancasila dan PPKn, dari seragam putih-merah sampai bangku kuliah, padahal doktrinasi sepanjang itu jauh dari memadai untuk membentuk warga yang demokratis.

Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970) menyebut model semacam ini sebagai pendidikan gaya bank, tempat murid diperlakukan sebagai celengan kosong yang tinggal diisi dengan setoran hafalan dari guru. Model ini melatih kepatuhan, bukan daya kritis, dan justru itulah yang selama ini kita jalankan. Bandingkan dengan pengalaman kita sendiri, berapa kali di ruang kelas kita diminta menimbang dua pandangan yang bertentangan, mengambil sikap, lalu mempertanggungjawabkannya. Hampir tidak pernah, sebab yang kita latih justru refleks menghafal jawaban yang sudah disediakan lengkap dengan kuncinya di halaman belakang.

Pelajaran kewarganegaraan kita lebih sering dirancang untuk mencetak kepatuhan ketimbang nalar kritis. Kita dipaksa menghafal bunyi pasal, butir sila, dan bagan tata negara demi angka di lembar ujian, sehingga tumbuh menjadi penonton formalitas negara alih-alih aktor demokrasi. Kita tidak pernah diajari cara berdialog secara setara, mengelola perbedaan kepentingan dengan sehat, atau merawat hak minoritas.

Ki Hadjar Dewantara, dalam esai “Pendidikan” yang dihimpun dalam Karya Ki Hadjar Dewantara (1962), sudah menawarkan jalan lain lewat

Sistem Among. Baginya, mendidik berarti menuntun tumbuhnya kodrat anak dan bukan menundukkannya, sehingga guru semestinya berdiri di belakang untuk memberi dorongan alih-alih di depan untuk memberi perintah, persis semangat tut wuri handayani. Ironisnya, sekolah kita justru berjalan ke arah yang berlawanan.

Pancasila yang semestinya hidup sebagai jiwa demokrasi malah dikerdilkan menjadi hafalan prosedural yang mati. Yudi Latif dalam *Negara Paripurna* (2011) mengingatkan bahwa Pancasila lahir sebagai etika kebangsaan yang deliberatif, sebuah ruang perjumpaan gagasan yang hidup, bukan mata pelajaran yang selesai di ujian. Ketika ia dihafalkan tanpa dihayati, yang tersisa hanyalah cangkang tanpa isi.

Yang lahir dari ketimpangan ini adalah sebuah paradoks. Kita menjadi bangsa yang cakap secara teknis merebut dan mempertahankan kekuasaan, tetapi justru rapuh dalam hal-hal yang menjadi inti demokrasi. Generasi kita piawai bertarung di gelanggang politik, namun nyaris buta huruf terhadap nilai-nilai yang membuat pertarungan itu layak disebut demokratis.

Kita juga lupa mengajarkan hal paling mendasar, bahwa demokrasi bukan tempat konflik ditiadakan, melainkan tempat konflik dikelola tanpa saling memusnahkan. Chantal Mouffe dalam *The Democratic Paradox* (2000) menegaskan bahwa lawan politik semestinya diperlakukan sebagai pihak yang sah untuk berbeda, bukan sebagai musuh yang harus dihabisi. Tanpa kesadaran itu, setiap perbedaan pendapat cepat mengeras menjadi permusuhan, dan setiap kekalahan dianggap sebagai aib yang tak boleh diterima.

Pendidikan demokrasi pada dasarnya adalah soal nilai, tentang menghargai beda pendapat, melindungi yang lemah, bersikap toleran, dan tunduk pada supremasi hukum. Begitu nilai-nilai ini absen, politik menyusut menjadi ajang menang-menangan angka. Ruang publik kita hari ini memperlihatkannya dengan telanjang, ketika demokrasi direduksi menjadi ritual lima tahunan di bilik suara lalu dianggap selesai.

Mayoritarianisme, gagasan bahwa yang paling banyak berhak menentukan segalanya, telah berubah menjadi dogma baru. Alexis de Tocqueville dalam *Democracy in America* (1835) sudah memperingatkan bahaya tirani mayoritas, ketika suara terbanyak dipakai untuk membungkam yang lain, dan di media sosial logika itu mengeras menjadi kultur mengeroyok siapa pun yang berbeda, seolah jumlah pengikut adalah ukuran kebenaran. Tidak heran bila kritik substansial gampang dikriminalisasi, sementara caci maki dan hoaks berlindung di balik tameng kebebasan berpendapat. Inilah yang oleh Fareed Zakaria (1997) disebut demokrasi illiberal, sistem yang rajin menggelar pemilu tetapi abai pada kebebasan dan perlindungan hak yang menjadi ruhnya.

Kontradiksi ini dipelihara oleh lingkungan kita sendiri. Di dalam kelas, murid diajari tentang keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi begitu keluar dari gerbang sekolah, mereka menyaksikan korupsi merajalela, hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta politik dinasti yang dipertontonkan tanpa malu. Lebih parah lagi, ekosistem sekolah dan kampus kita sendiri masih otoriter. Banyak guru dan dosen anti-kritik, ruang diskusi yang berbeda haluan dipersempit,

dan pemilihan organisasi siswa kerap disetir birokrasi. Anak muda kita mendengar teori demokrasi di kelas, tetapi merasakan praktik otoritarianisme dalam keseharian, sehingga yang mereka serap bukanlah nilai di papan tulis melainkan jarak antara kata dan perbuatan orang dewasa. Tidak heran bila yang tumbuh kemudian bukan keyakinan, melainkan sinisme.

Kalau kita salah mendiagnosis dan hanya menambah dosis pendidikan politik yang prosedural, kita sedang menyuntikkan obat yang keliru. Yang lahir hanyalah pemilih dan politisi yang makin pragmatis, lihai memanfaatkan celah hukum demi kekuasaan, tetapi miskin moralitas bernegara. Sudah waktunya kita berhenti menjadikan pendidikan politik sebagai kambing hitam, sebab masalah terbesar bangsa ini adalah kita memiliki terlalu banyak orang yang paham cara merebut kekuasaan dan terlalu sedikit yang paham cara merawat kemanusiaan serta keadilan setelah kekuasaan diraih.

Membenahi pendidikan demokrasi secara mendasar adalah satu-satunya jalan keluar. Kurikulum Pancasila perlu dirombak agar lebih dialogis, kultur sekolah diubah menjadi partisipatif, dan debat berbasis data dibiasakan di ruang publik. Ini bukan soal menambah jam pelajaran atau mengganti nama mata kuliah, melainkan soal mengubah cara kita memperlakukan anak muda, dari objek yang ditertibkan menjadi warga yang diajak berpikir.

Kelas yang sehat adalah kelas tempat murid boleh membantah gurunya dengan argumen, tempat perbedaan tidak dihukum, dan tempat keputusan bersama dirundingkan alih-alih diketuk dari atas. Selama pembenahan itu terus kita tunda, kita akan tetap terjebak dalam demokrasi yang cacat, demokrasi yang megah di permukaan prosedur tetapi keropos di dalam substansi.

■ **Iqbal Kholidin**, Peneliti Perludem.

ATURAN DISKRIMINATIF VERSUS DEMOKRASI

Oleh: **Usep Hasan Sadikin**

Penurunan kualitas demokrasi Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembentuk hukum yang melahirkan aturan diskriminatif. Freedom House secara konsisten menilai bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu, tetapi juga oleh penghormatan terhadap hak-hak sipil, kesetaraan di hadapan hukum, dan pembatasan terhadap tindakan pemerintah yang bersifat diskriminatif atau sewenang-wenang. Bahkan, dalam laporan Freedom in The World 2026, secara khusus Indonesia dinilai punya tantangan serius dalam mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Pengalaman saya mendampingi berbagai proses advokasi kebijakan juga memperlihatkan pola yang berulang. Demokrasi lebih sering melemah melalui aturan-aturan yang tampak administratif, teknis, bahkan dianggap sepele. Ketika sebuah regulasi mulai membedakan hak warga negara berdasarkan identitasnya, saat itulah tanda demokrasi terus menurun kualitasnya.

Banyak pembentuk peraturan menganggap persoalan diskriminasi hanya berkaitan dengan niat. Selama tidak bermaksud mendiskriminasi, mereka merasa kebijakannya tidak bermasalah. Padahal, dalam praktik ketatanegaraan, yang dinilai bukan sekadar niat, melainkan akibat yang ditimbulkan oleh sebuah norma. Sebuah aturan dapat bersifat

diskriminatif meskipun dibuat dengan alasan administratif, efisiensi birokrasi, atau bahkan perlindungan negara.

Karena itu, saya melihat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 maupun kebijakan yang mewajibkan persetujuan suami bagi ASN perempuan yang hendak mengajukan mutasi memiliki persoalan yang sama. Keduanya menjadikan identitas sebagai dasar perlakuan hukum yang berbeda. Yang satu berpotensi memberi stigma kepada kelompok sosial tertentu, sementara yang lain secara eksplisit membedakan kapasitas hukum perempuan dan laki-laki dalam birokrasi.

Dalam berbagai penelitian mengenai demokrasi yang saya kerjakan, ukuran paling sederhana untuk menilai apakah sebuah aturan selaras dengan demokrasi sebenarnya bukan terletak pada seberapa populer sebuah kebijakan. Aspek popularitas ini biasa jadi pertimbangan politisi atau pejabat negara dengan motif meningkatkan elektabilitas untuk pemilu berikutnya. Tapi, seiringnya, negara malah memperlakukan setiap warga negara secara berbeda.

Padahal, kesetaraan membedakan demokrasi dengan sistem politik lainnya. Demokrasi dibangun di atas gagasan bahwa setiap warga negara memiliki nilai politik yang sama. Dalam praktik elektoral, prinsip ini dikenal melalui ungkapan one person, one vote, one value (OPOVOV). Tidak ada suara yang lebih bernilai hanya karena seseorang laki-laki, perempuan, kaya, miskin, profesor, buruh, bangsawan, ataupun pejabat negara.

Prinsip ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan revolusi besar dalam sejarah politik. Demokrasi menghapus hierarki identitas yang selama berabad-abad menjadi dasar distribusi kekuasaan.

Dalam monarki, status bangsawan menentukan siapa yang layak memimpin. Dalam teokrasi, identitas agama tertentu memperoleh posisi yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya. Dalam sistem kasta, kelahiran menentukan hak politik seseorang. Demokrasi hadir justru untuk membongkar seluruh hierarki tersebut. Karenanya, saya selalu melihat dengan hati-hati setiap regulasi yang mulai menghidupkan kembali perbedaan berdasarkan identitas.

Misalnya, kewajiban memperoleh izin suami bagi ASN perempuan yang hendak mutasi. Persoalannya bukan sekadar prosedur administrasi. Dalam kajian hukum, norma seperti ini mengandung pesan bahwa perempuan belum sepenuhnya dipandang sebagai subjek hukum yang otonom. Negara menempatkan keputusan perempuan bergantung pada persetujuan pihak lain. Yang menjadi pertanyaan kemudian sederhana: mengapa syarat serupa tidak diberlakukan kepada ASN laki-laki yang hendak mutasi? Ketika standar hukumnya berbeda hanya karena jenis kelamin, di situlah prinsip kesetaraan mulai bergeser.

Hal yang sama juga perlu menjadi perhatian ketika suatu regulasi mengaitkan identitas sosial tertentu dengan ancaman negara. Dalam pengalaman saya menelaah berbagai kebijakan keamanan dan demokrasi, regulasi yang menyasar identitas hampir selalu melahirkan persoalan implementasi. Aparat kesulitan menentukan batasan yang objektif, sementara kelompok masyarakat yang disebut dalam regulasi terlanjur memperoleh stigma sebagai pihak yang patut dicurigai.

Negara hukum semestinya mengatur perilaku, bukan identitas. Yang harus dihukum adalah tindakan yang melanggar hukum, bukan siapa seseorang atau kelompok mana yang ia miliki.

Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi konstitusional yang sangat kuat untuk mencegah lahirnya aturan seperti itu. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada saat yang sama, Pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia adalah negara

hukum. Dua ketentuan ini sering dipahami secara terpisah, padahal keduanya saling melengkapi. Demokrasi memastikan kekuasaan berasal dari rakyat, sedangkan negara hukum memastikan kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang terhadap rakyat.

Ketika saya membaca berbagai putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan, pola argumentasinya hampir selalu kembali pada prinsip persamaan di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan yang sangat jelas bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama dan bebas dari diskriminasi.

Karena itu, Indonesia juga membangun mekanisme koreksi melalui hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam praktik advokasi kebijakan, mekanisme ini sangat penting. Tidak semua peraturan yang diterbitkan pemerintah otomatis benar secara hukum. Justru beberapa regulasi yang paling bermasalah sering kali lahir pada level peraturan di bawah undang-undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa setiap peraturan harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Jika terdapat peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, tersedia mekanisme uji materiil di Mahkamah Agung. Mekanisme ini bukan sekadar prosedur hukum, melainkan bagian dari sistem perlindungan demokrasi agar pemerintah tidak menggunakan kewenangan regulasinya untuk mengurangi hak konstitusional warga negara.

Dari pengalaman mengikuti perkembangan berbagai pengujian peraturan, saya melihat satu pelajaran penting. Demokrasi tidak selalu membutuhkan perubahan besar untuk mengalami kemunduran. Cukup dengan membiarkan satu demi satu aturan diskriminatif tetap berlaku, standar kesetaraan akan bergeser secara perlahan hingga akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Karena itu, setiap aturan yang membedakan hak warga negara berdasarkan identitas perlu dipertanyakan sejak awal. Demokrasi tidak menuntut semua orang memiliki latar belakang yang sama, tetapi memastikan setiap orang diperlakukan sama oleh negara. Itulah ukuran paling mendasar dari negara demokrasi sekaligus negara hukum.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa bebas rakyat memilih dalam pemilu. Yang tidak kalah penting adalah apakah setelah pemilu usai, negara tetap memperlakukan setiap warga negaranya sebagai manusia yang setara. Ketika jawaban atas pertanyaan itu mulai meragukan, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar satu peraturan, melainkan arah demokrasi Indonesia sendiri.

■ **Usep Hasan Sadikin**, Peneliti Perludem.

PROFIL PENULIS



Agssel Jesisca merupakan aktivis mahasiswa dan pengiat isu perempuan menuangkan tulisan yang eksploitatif tentang moral. Saat ini sedang menjalani studi di Fakultas Hukum salah satu kampus Tangerang Selatan.



Ahmad Najmi Tsaqib merupakan salah satu siswa berprestasi yang menempuh pendidikan di MAN 12 Jakarta Barat. Najmi dikenal sangat aktif di bidang kepemimpinan, sosial, politik, pendidikan, budaya, dan seni sastra. Ahmad Najmi Tsaqib atau dikenal dengan panggilan Najmi lahir di Jakarta pada tanggal 09 September 2008. Prestasi Najmi meliputi bidang akademik dan non-akademik. Beberapa prestasinya di bidang akademik di antaranya *Honorable Mention Lokasia* 2025 bidang Sosial-Humaniora, juara OSN-K Geografi 2026, *Finalis Urban Debate Competition 2026*, *Bronze Medal Germanic Olympiad 2025*, dan lain sebagainya.

Adapun di bidang non-akademik dia pernah menjadi Anggota Dewan Parlemen Pelajar 2026, Humas Duta Pelajar Kreatif Indonesia Prov. DKI Jakarta 2025, Remaja Bernegara NasDem 2025, bahkan Najmi pernah menjadi delegasi internasional perwakilan RI di *Asia-Europe Conference and Exchange Program 2025*. Najmi juga mempunyai hobi membaca buku dan menulis beberapa artikel dan opini. Ingin kenal lebih lanjut? Najmi dapat dihubungi melalui email: najmitsaqib08@gmail.com atau melalui DM Instagram: [@ahmadnajmitsaqib](https://www.instagram.com/ahmadnajmitsaqib).



Ajrina Wildia merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Universitas Pendidikan Indonesia. Selain menempuh pendidikan di bidang kelautan dan perikanan, saya memiliki minat pada isu pendidikan, demokrasi, dan pengembangan mahasiswa. Aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi, kepanitiaan, serta kegiatan pengembangan kepemimpinan yang membentuk kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Karena, menulis merupakan salah satu cara untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya gagasan-gagasan yang bermanfaat.



Ajid Fuad Muzaki adalah peneliti di Perludem yang berfokus pada isu pemilihan umum, demokrasi, tata kelola politik, dan media. Ia secara aktif melakukan penelitian, analisis kebijakan, dan studi media mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemilu serta pengembangan demokrasi. Selain berkontribusi dalam berbagai proyek penelitian dan publikasi, ia juga terlibat dalam kegiatan advokasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan analisis media.



Anggit Varnesya Okty merupakan siswi SMA Budi Mulia Kota Tangerang yang memiliki minat pada kajian sosial, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan. Ia tertarik mengeksplorasi bagaimana proses pengambilan keputusan, institusi, dan partisipasi warga memengaruhi kehidupan masyarakat. Ketertarikan tersebut mendorongnya untuk terus mengembangkan kemampuan riset, analisis, dan komunikasi sebagai bekal dalam memahami berbagai persoalan publik. Untuk informasi lebih lanjut atau keperluan korespondensi, ia dapat dihubungi melalui email avarnesya@gmail.com maupun Instagram [@vrnesyv](https://www.instagram.com/vrnesyv).



Annisa Alfath merupakan Peneliti Perludem, meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Politik dari Universitas Gadjah Mada. Fokus kajiannya meliputi politik elektoral, perempuan dalam politik, dan inklusivitas demokrasi. Saat ini, ia juga tengah mengembangkan minatnya pada isu demokrasi digital.

Annisa aktif menulis artikel serta berkontribusi dalam penyebarluasan pengetahuan kepada publik melalui buku, podcast, dan video yang membahas berbagai isu kepemiluan. Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai forum internasional sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan sekaligus untuk memperluas perspektifnya mengenai isu-isu demokrasi.



Bazli Banin Danisha Falah merupakan mahasiswa Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI). Dia tertarik dengan topik sistem elektoral dan perilaku pemilih, serta perbandingan politik sebagai metode untuk memahami perkembangan politik luar maupun dalam negeri. Untuk itu, dia turut menyebarkan pengetahuan ketika menjadi staf dan kepala Departemen Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI. Dia juga aktif berkontribusi menulis dan membuat karya grafik di Wikipedia seputar pemilu dan demografi. Dia mengikuti magang di Perludem pada tahun 2026 dengan tulisan yang dimuat dalam Rumah Pemilu. Ia dapat dihubungi melalui alamat surel bazli.banin@ui.ac.id.



Dominique Emanuela Sebastian Saragih merupakan siswi kelas XI di SMA Negeri 28 Jakarta. Penulis yang akrab disapa Niquel ini memiliki ketertarikan yang besar terhadap isu kepemudaan, sosial, dan lingkungan. Kesadarannya akan pentingnya partisipasi anak muda dalam ruang sipil dan tata kelola pemerintahan semakin

bertumbuh sejak ia menjadi bagian dari siswi angkatan pertama Akademi Demokrasi Perludem 2026. Selain aktif di bidang akademik, Niquel menyeimbangkan kesehariannya dengan terjun ke lapangan.

Ia turut berkontribusi sebagai pengurus di komunitas Marine Buddies Jakarta serta pernah menjadi relawan pengajar bagi anak-anak di Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA). Kecintaannya pada dunia keorganisasian dan komunikasi juga mengantarkannya menjadi Ketua Pelaksana IGNITE 2026 serta dipercaya sebagai Student Ambassador untuk beberapa program kepemudaan nasional, salah satunya IREC x YYSF UGM 2026. Niquel dapat dihubungi melalui surel di emanuelasebasty@gmail.com atau melalui kanal Instagram @niquenuela.



Eva Wira, Guru Pendidikan Pancasila di SMAN 22 Jakarta. Ia lahir dan dibesarkan di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Perjalanan pendidikannya membawanya merantau ke Jakarta untuk menempuh studi di IKIP Jakarta, yang kini bernama Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Selama masa perkuliahan, Eva aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya Pramuka dan Forum Diskusi Mahasiswa Eka Prasetya. Keaktifannya dalam organisasi tersebut memberikan pengalaman berharga melalui berbagai kegiatan, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, yang turut membentuk kompetensi dan karakter kepemimpinannya.

Setelah menyelesaikan pendidikan pada tahun 1995, ia mengabdikan diri sebagai pendidik di berbagai sekolah negeri dan swasta di Jakarta dan Bekasi. Selain menjalankan tugas sebagai guru, Eva juga memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan

profesionalisme. Ia aktif mengikuti seminar, simposium, dan berbagai pendidikan serta pelatihan (diklat). Saat ini, ia juga mengemban amanah sebagai Pengurus MGMP Pendidikan Pancasila (PKn) Jakarta Timur 1 periode 2024–2028. Sebagai ibu dari dua orang putri, Eva terus berupaya menyeimbangkan perannya dalam keluarga dan dunia pendidikan. Insyaallah, ia akan memasuki masa purnatugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada akhir Oktober 2031. Penulis dapat dihubungi melalui email wir4eva.22@gmail.com.



Fakhira Khairunnisa merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Memiliki minat dalam melakukan penelitian hukum dan sangat tertarik dalam pembahasan terkait hak asasi manusia, terutama dalam hukum humaniter. Saat ini, penulis sedang melakukan penelitian bersama tim mahasiswa lainnya terkait penegakan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan serta organisasi kemahasiswaan salah satunya Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum UI. Penulis berharap, untuk kedepannya penulis bisa memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di masa depan.



Fakhriyah Khoirun Nisa merupakan mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Selama menempuh pendidikan, ia aktif berkontribusi dalam berbagai organisasi dan kegiatan sukarelawan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, literasi, lingkungan, serta partisipasi anak dan pemuda. Baginya, keterlibatan dalam ruang sosial merupakan kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan sekaligus

menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Beragam pengalaman organisasi dan kegiatan kepemudaan telah dijalani, di antaranya ia tergabung dalam *Green Generation Indonesia*, Forum Pelajar Indonesia, Forum Anak Kota Bekasi, Koalisi Perempuan Indonesia Kota Bandung, dan masih banyak lagi. Melalui setiap pengalaman tersebut, Fakhriyah berharap dapat terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan, pemberdayaan generasi muda, dan penguatan partisipasi masyarakat melalui gagasan, kolaborasi, serta aksi nyata.



Fuji Asih, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Penulis lahir pada tanggal 01 Agustus 2005. Penulis aktif dalam organisasi BLMP (Badan Legislatif Mahasiswa Prodi) Pendidikan Sejarah sebagai Ketua Divisi Publikasi dan Dokumentasi. Penulis berperan aktif sebagai staf Komisi Pemilihan Raya (KPU Pemira) dalam menyelenggarakan pemilu kampus. Ketertarikan saya pada isu sejarah dan pendidikan mendorong saya untuk terus aktif menulis dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan akademik maupun organisasi.



Ganisha Aimar Adzani adalah siswi SMA Negeri 8 Depok yang tertarik pada pendidikan, kepemimpinan, serta isu sosial dan demokrasi. Aimar, begitu ia biasa dipanggil, termotivasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi lewat berbagai kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Karena latar belakang ini, Aimar bersemangat mengikuti *Academia Politica* yang diadakan oleh Generasi Melek Politik bersama Yayasan Partisipasi Muda, serta Akademi Demokrasi yang diadakan oleh Perludem. Lewat kedua

program tersebut, Aimar memperdalam pemahaman tentang pemilu, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui membaca, berdiskusi, dan berorganisasi. Di luar itu, Aimar aktif berlatih dan berkompetisi dalam paduan suara serta bermain basket.



Hilmi Hafizh Muhammad adalah Mahasiswa D3 Administrasi Perkantoran, Sekolah Vokasi, Universitas Indonesia (UI). Ia memiliki ketertarikan pada bidang filsafat, politik, dan isu sosial. Sebagai penulis baru yang bercita-cita menjadi seorang peneliti di bidang sosial dan politik; ia gemar membaca karya-karya filsafat dan pemikiran politik, serta melatih kemampuan menulis sebagai sarana mengembangkan kapasitas diri agar dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan.



Hadits Rajwa Akbar merupakan seorang siswa SMA Negeri 12 Jakarta yang memiliki ketertarikan pada bidang politik, ekonomi, kepemimpinan, dan kebijakan publik. Ia aktif mengembangkan kapasitas diri melalui berbagai organisasi, forum kepemudaan, serta kegiatan akademik maupun non akademik yang berorientasi pada pengembangan karakter, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, ia juga memiliki minat dalam dunia public speaking, kepenulisan, dan sastra, khususnya puisi.

Bagi Hadits, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang berintegritas, berpikir kritis, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan bangsa. Melalui berbagai pengalaman belajar dan berorganisasi, ia terus berupaya menjadi pribadi yang adaptif, komunikatif, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.



Iqbal Kholidin merupakan peneliti Perludem. Lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini berfokus pada penelitian di bidang demokrasi elektoral, sistem dan tata kelola pemilu, representasi politik, serta kebijakan publik. Sejak bergabung dengan Perludem pada 2024, ia terlibat dalam berbagai penelitian kuantitatif dan kualitatif, termasuk simulasi sistem pemilu, analisis data kepiluan, pengembangan basis data kepiluan, evaluasi desain sistem pemilu, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Ia merupakan salah satu penulis *Indonesia Election Archive* yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Data (Nature Portfolio), serta telah menulis berbagai artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, policy brief, dan tulisan opini yang diterbitkan di jurnal maupun media nasional dan internasional. Selain kegiatan penelitian, ia juga aktif mendiseminasikan hasil penelitian melalui forum akademik, diskusi kebijakan, media massa, serta kegiatan pemantauan pemilu di tingkat internasional.



Kevin Kilian Heryanda adalah seorang pelajar di SMAN 1 Jakarta yang aktif berorganisasi dan memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan potensi diri. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan kepemimpinan dan organisasi, seperti PIK-R BRIGHT, MPK, serta berbagai program kepemudaan. Kevin dikenal sebagai pribadi yang komunikatif, bertanggung jawab, dan senang belajar dari pengalaman baru.

Dengan semangat *growth mindset*, Kevin percaya bahwa setiap tantangan merupakan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia bercita-cita menjadi pemimpin muda yang berintegritas, inspiratif, dan mampu membawa perubahan yang bermanfaat.



M. Ilham adalah siswa kelas 12 dari SMAN 1 Babakan Madang yang memiliki ketertarikan tinggi pada isu-isu sosial, kepemimpinan, dan demokrasi. Ia pernah terpilih untuk mengikuti Pelatihan Demokrasi Siswa yang diselenggarakan oleh Perludem, serta mengikuti pelatihan PKS Muda Leadership Academy bersama PKS Muda Kota Bogor. Selain aktif dalam pelatihan kepemimpinan, Ilham juga terlibat langsung dalam gerakan sosial dengan berkampanye menyuarakan isu “Ruang Aman” bersama YouthForce ID. Melalui berbagai kegiatan dan pengalaman ini, Ilham berkomitmen untuk terus belajar, mengasah wawasan, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.



Puji Akmaliana B.A, S.Tr.Keb merupakan mahasiswa tingkat akhir Program Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Selama menempuh pendidikan, Puji aktif mengikuti praktik klinik di berbagai rumah sakit, puskesmas, dan klinik, serta memiliki pengalaman sebagai enumerator penelitian pada berbagai lembaga. Minatnya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, serta advokasi berbasis data.

Selain aktif dalam kegiatan akademik, Puji juga terlibat dalam berbagai pelatihan, seminar, dan kegiatan pengembangan kapasitas di bidang kesehatan masyarakat, demokrasi, dan pemberdayaan perempuan. Melalui tulisan dalam bunga rampai ini, Puji berharap dapat memberikan gagasan yang mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat. Puji dapat dihubungi melalui email pujiakmaliana25@gmail.com atau Instagram @ [pujiakmaliana_asbaruna](https://www.instagram.com/pujiakmaliana_asbaruna).



Rahmad Aidil Ali Lubis merupakan mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Ia memiliki ketertarikan pada kajian demokrasi, pemilihan, hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan dalam perspektif politik global. Di bidang akademik, ia juga mendalami pendekatan-pendekatan kritis dalam studi Hubungan Internasional, khususnya teori kritis, Marxisme, dan perspektif pascakolonial, untuk memahami relasi kuasa yang membentuk dinamika politik domestik maupun internasional.

Selama menempuh studi, Aidil aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya sebagai Direktur Bidang Riset, Advokasi, dan Kampanye Amnesty UPNVJ serta Tenaga Ahli Komisi III Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UPNVJ (2025). Selain itu, ia aktif menulis artikel opini dan esai mengenai isu-isu demokrasi, pemilihan, politik, dan hubungan internasional yang dipublikasikan melalui media digital dan platform Substack. Melalui kepenulisan, ia berupaya menjembatani kajian akademik dengan diskursus publik serta mendorong penguatan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berbasis hak asasi manusia.



Rania Amira merupakan siswa SMA Budi Mulia yang memiliki ketertarikan pada bidang hukum, seni, serta berbagai isu sosial. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk aktif mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kepemimpinan melalui berbagai kegiatan akademik maupun organisasi. Rania dipercaya menjadi Ketua Pelaksana *Budi Mulia Democracy Fellowship* (BMDF) 2026, sebuah program yang bertujuan menumbuhkan pemahaman serta

partisipasi aktif siswa terhadap nilai-nilai demokrasi. Selain aktif dalam kegiatan sekolah, Rania juga memiliki minat dalam penulisan dan pengembangan ide-ide kreatif sebagai sarana menyampaikan gagasan kepada masyarakat. Melalui karya tulis ini, Rania berharap dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta menginspirasi pembaca untuk terus berpikir kritis, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya.



Rikza Anung Andita Putra merupakan mahasiswa yang aktif di bidang hukum, penelitian, dan kepenulisan. Selain menempuh studi Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia juga aktif menulis artikel ilmiah dan opini dengan fokus pada isu hukum, demokrasi, konstitusi, dan kebijakan publik.



Robi Kurniawan merupakan guru Pendidikan Pancasila di salah satu SMA swasta di Jakarta. Memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap isu-isu wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, demokrasi, dan kepemimpinan nasional. Sebagai bentuk pengembangan kompetensi, Robi merupakan Alumni Training of Trainers (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI. Melalui pendidikan dan pengembangan diri yang berkelanjutan, ia berkomitmen menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta membentuk generasi muda yang berkarakter Pancasila dan cinta tanah air.



Safira Irawati merupakan mahasiswa S1 Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta. Fira memiliki ketertarikan pada isu sosial yang membuatnya menjadi anggota aktif di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktika sebagai Staf Penerbitan dengan pengalaman dalam penulisan dan publikasi artikel. Sepanjang tahun 2026 ini, ia menjadi anggota penelitian dasar fakultas yang

diadakan dosen prodinya, pemateri Jurnalisme Warga pada Festival Saba Kampung yang digelar di Kampung Bayam (Jakarta Utara), serta ketua pelaksana Lomba Opini Didaktiquest.



Syafira Sugianto merupakan mahasiswa Program Studi International Business Law Universitas Prasetiya Mulya yang memiliki ketertarikan pada hukum internasional, tata kelola digital, hak asasi manusia, dan kebijakan publik. Saat ini, ia berkiprah sebagai *Legal Writer di Juristic Indonesia*, *Legal & Administrative Officer di Women Foundation Indonesia*, serta *Local Coordinator Students For Liberty* kawasan Asia-Pasifik. Selain aktif dalam penelitian dan penulisan hukum, Syafira juga berpartisipasi dalam berbagai kompetisi dan forum internasional, di antaranya *Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition*, *International Model United Nations (MUN)*, dan *Global Youth Digital Conference (GYDC)*, serta meraih Juara III *International Law Writing Competition* Universitas Padjadjaran. Melalui penelitian dan karya tulisnya, ia berupaya mendorong pengembangan hukum yang responsif terhadap tantangan global serta perlindungan hak dan kebebasan di era digital.



Tri Gayuh Waluyati.M.Pd., biasa di panggil Bu Tri, lahir di Purbalingga pada 26 Pebruari 1983. Ia adalah seorang pendidik di SMAN 1 Babakan Madang, sebagai guru mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Sejarah, sekaligus penulis produktif yang menaruh minat besar pada dunia literasi anak. Mengabdikan sebagai guru Bahasa Indonesia sejak tahun 2006, ia aktif memotivasi siswa untuk mencintai budaya membaca dan menulis.

Di bidang kepenulisan, ia telah menelurkan empat belas

buku, termasuk enam cerita rakyat (2023). Karyanya diantaranya, Legenda Curug Leuwi Hejo, Legenda Misteri Gunung Pancar, Legenda Curug Putri Kencana, Legenda Curug Leuwi Asih, Legenda Goa Garonggang, Legenda Curug Love. Buku Antologi Cerpen (2023), Antologi Cerpen Wira Wiri Dunia, Antologi Cerpen Sepenggal Kisah Para Besti, Antologi Cerpen Diantara Lika liku, Antologi Cerpen Sepenggal Kisah Putih Abu, Antologi Cerpen Sejarah Dunia (2026), serta Antologi Puisi Sang Penggerak (2024), Antologi Puisi Cakrawala Perjalanan Melintas Ilmu (2026), dan buku parlemen Remaja (2024).

Konsistensinya dalam berkarya membuahkan sejumlah prestasi, di antaranya, penghargaan dan terpilih sebagai *Best Trainer* dalam program guru kebangsaan Ruang Guru untuk Tingkat Nasional Tahun 2024, lulusan terbaik PPPK Angkatan 165 tingkat BPSDM Jawa Barat Tahun 2025, sebagai Narasumber Tingkat Nasional dengan tema Mengokohkan Demokrasi Menuju Pilkada 2024 di Era Digital, sebagai pendamping Guru Penggerak BPSDM Jawa Barat untuk guru SMA/SMK/MA/SLB Tahun 2024. Sebagai Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kemendikbudristek tahun 2024. Saat ini aktif dalam kegiatan literasi dan dapat disapa melalui trigw26@gmail.com atau akun Instagram [tri.galuh.73](https://www.instagram.com/tri.galuh.73).



Usep Hasan Sadikin merupakan peneliti Perludem. Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam *“The Bobs-Best of Online Activism 2016”* (Deutsche Welle, Jerman). Usep terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite Keterwakilan Perempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem,

warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, Usep berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.



Valleydhio Rusyda adalah pelajar SMAN 2 Kota Bogor yang memiliki minat pada bidang kepemimpinan, komunikasi, dan pengembangan kepemudaan. Aktif dalam berbagai organisasi serta kegiatan publik, ia memiliki pengalaman sebagai master of ceremony, public speaker, dan penggerak kegiatan sosial. Ketertarikannya pada isu pendidikan, demokrasi, dan pemberdayaan generasi muda mendorongnya untuk terus berkarya melalui tulisan yang berbasis pemikiran kritis dan memberikan manfaat bagi masyarakat.